



DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2026



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Ir. FENDIAWAN TISKIANTORO, M.Si : NIP.: 19650117 199010 1 001

Jabatan Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Jawa
Tengah

Berdasar SK Gubernur Nomor
821.2/186/2019

tanggal 6 Mei 2019

Bertugas untuk dan atas nama
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Tengah
Berkedudukan di Jalan Imam
Bonjol Nomor 134 Semarang

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan serta program kerja berdasarkan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Mei 2023

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. FENDIAWAN TISKIANTORO, M.Si
NIP. 19650117 199010 1 001



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Wilayah pesisir dan laut Provinsi Jawa Tengah secara geografis terbagi menjadi 2 (dua) yaitu wilayah pantai utara (Pantura) termasuk Kepulauan Karimunjawa dan wilayah pantai selatan (Pansela). Garis pantai Provinsi Jawa Tengah yang digunakan adalah garis pantai berdasarkan Peraturan Kepala BIG Nomor 26.4 Tahun 2021 dan Laporan Pemeriksaan Hasil Supervisi Peta Dasar Unsur Garis Pantai Untuk RTRW Jawa Tengah oleh Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai Badan Informasi Geospasial pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan panjang 1.127,85 km, yang mencakup garis pantai Wilayah Pantura 651,47 km, wilayah Kepulauan Karimunjawa 132,88 km dan wilayah Pansela adalah 343,50 km. Untuk wilayah perairan Kabupaten Kendal, Kota Semarang dan Kabupaten Demak perencanaan ruang laut menggunakan garis pantai rencana sebagaimana termuat dalam peta rencana pola ruang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi. Luas wilayah laut Jawa Tengah hingga 12 mil laut ke arah laut adalah 1.732.269,32 Ha dengan luas laut wilayah Pantura 916.426,40 Ha, luas wilayah laut Karimunjawa adalah 468.576,94 Ha dan luas wilayah Pansela adalah 347.265,98 Ha (Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir (RZWP3K) Tahun 2022).

Potensi kelautan dan perikanan Jawa Tengah meliputi luas mangrove existing sebesar 15.089 Hektar dengan potensi sebesar 44.784 Hektar (Peta Mangrove Nasional, 2021). Potensi perikanan tangkap pada Laut Jawa (WPP 712) yang mencakup 8 provinsi adalah 1.034.485 ton/tahun, sedangkan Samudra Hindia (WPP 573) yang mencakup 8 Provinsi adalah 1.338.442 ton/tahun, dengan jumlah kapal 24.954 unit, jumlah nelayan 152.124 orang. Produksi perikanan budidaya di tahun 2021 sebesar 308.729.577 kg mengalami peningkatan sebesar 1.111.479 kg dibandingkan produksi tahun 2020 sebesar 307.618.098 Kg. Potensi tambak garam di Jawa Tengah tersebar di 5 (lima) Kabupaten wilayah pantai utara Jawa Tengah yaitu Jepara, Pati, Rembang, Demak dan Brebes, usaha pengembangan garam dilaksanakan di wilayah pantai selatan antara lain Kebumen, Cilacap dan Purworejo dengan luas lahan garam 6.608,78 Ha. Sedangkan Unit Pengolahan Ikan (UPI) eksportir 40 unit, jumlah UMKM pengolah hasil perikanan 8.761 unit, dan jumlah pemasar produk hasil perikanan 29.365 unit.

Pengelolaan potensi dan pemanfaatan peluang tersebut memerlukan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang matang. Perencanaan pengembangan sektor kelautan dan perikanan tersebut tidak dapat dilepaskan

dan harus mampu mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional sebagai upaya antisipasi terhadap hambatan serta tantangan dalam pengelolaan. Secara teknis, perencanaan pengelolaan yang baik harus mampu mengantisipasi karakter sumberdaya perikanan laut yang pada hakekatnya tidak dapat dibatasi berdasarkan wilayah administrasi dan bersifat terbuka dalam pemanfaatannya. Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan ke depan akan dikembangkan melalui berbagai industri kelautan dan perikanan yang berorientasi pasar dan berbasis pada kelestarian lingkungan.

Dengan demikian, pembangunan kelautan dan perikanan di Jawa Tengah diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, mengatasi penurunan produksi perikanan tangkap, peningkatan produksi perikanan budidaya, peningkatan daya dukung pesisir, peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat, peningkatan angka konsumsi ikan, serta optimalisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Untuk itu diperlukan suatu model perencanaan yang mengintegrasikan berbagai perencanaan nasional dan regional dalam bentuk Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu satu sampai dengan tiga tahun yaitu tahun 2024-2026.

Menteri Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 mengintruksikan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah transisi. Menindaklanjuti hal itu, agar pembangunan terus berjalan maka perangkat daerah perlu menyusun renstra yang selaras dengan dokumen RPD pada tingkat daerah provinsi.

Renstra PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk jangka menengah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Khusus masa transisi ini, penyusunan Renstra PD juga merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mencakup penyusunan pohon kinerja, cascading, manajemen resiko, analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja, serta perumusan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Hal lain yang termaktub dalam Rencana Strategis ini adalah perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 3 (Tiga) tahun, yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Renstra digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memperhatikan keselarasan terhadap kebijakan nasional (RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024), dinamika perubahan peraturan perundang-undangan (PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90/2019 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021), serta mendasarkan hasil evaluasi kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201950 halaman 86 sampai dengan 92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodifikasi, Klarifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah;
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 45);
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 46);
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 47);
29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
30. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 050.11/0000042 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Renstra PD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 adalah dalam rangka penyesuaian dan penyelarasan dengan kebijakan nasional, dinamika perubahan peraturan perundangan-undangan, penyesuaian kebijakan pembangunan daerah serta dinamika pembangunan baru lainnya di Jawa Tengah.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 adalah :

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan kelautan dan perikanan selama kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendukung tujuan Jawa Tengah;
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan kelautan dan perikanan kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, serta manajemen resiko Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Tengah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok yang dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 1. Perumusan kebijakan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas;
 2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas;
 4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ditopang oleh struktur/susunan organisasi adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, sebagaimana tersebut di atas.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- (1) penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- (2) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- (3) penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- (4) penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- (5) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- (6) penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- (7) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- (8) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan :

1. Subbagian Program.

Bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang program; menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbagian Keuangan.

Bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang keuangan; menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan; menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di

lingkungan Dinas; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap, kepelabuhanan dan kenelayanan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan dan kenelayanan; dan
- 3) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan:

1. Seksi Pengendalian Penangkapan, Kapal dan Alat Tangkap.

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap, menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap, menyiapkan bahan pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap, menyiapkan bahan rekomendasi teknis izin usaha Perikanan Tangkap untuk kapal perikanan ukuran 5 (lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) gross ton; menyiapkan bahan penerbitan buku kapal perikanan untuk kapal perikanan ukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) gross ton, pendaftaran kapal perikanan kurang dari 5 (lima) gross ton; Menyiapkan bahan pengelolaan Sumber Daya Ikan baik di perairan laut dan perairan umum daratan (PUD); menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Kepelabuhanan dan Kenelayanan.

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kepelabuhanan dan kenelayanan, menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang kepelabuhanan dan kenelayanan menyiapkan bahan pengembangan pelabuhan perikanan, menyiapkan bahan pengelolaan sistem informasi pelabuhan perikanan; menyiapkan bahan identifikasi dan pengembangan pelabuhan perikanan; menyiapkan bahan penyusunan tata operasional pelabuhan perikanan; pengendalian pengembangan pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran; menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kepelabuhan perikanan; menyiapkan bahan pemberdayaan nelayan; menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi statistik perikanan tangkap; menyiapkan bahan

penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan; menyiapkan bahan pemberian rekomendasi sertifikasi cara Perikanan Tangkap; menyiapkan bahan perjanjian kerjasama nelayan andon dengan provinsi lain; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan dan kenelayanan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

D. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan ruang laut;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
3. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, membawahkan:

1. Seksi Pengelolaan Ruang Laut.

Bertugas melakukan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan ruang laut; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengelolaan ruang laut; menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi rencana strategis; menyiapkan bahan penetapan rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin lokasi dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 (dua belas) mil di luar minyak dan gas bumi; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan ruang laut; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; menyiapkan bahan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; menyiapkan bahan pengelolaan data statistik dan informasi pesisir dan pulau-pulau kecil; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

E. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan

Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan SDKP.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan mempunyai fungsi :

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan; dan
- 2) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan membawahkan:

- 1) Seksi Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan.

Bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penindakan pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penindakan pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan; menyiapkan bahan pembinaan di bidang pencegahan dan penindakan pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan; menyiapkan bahan kerjasama pencegahan konflik lintas kabupaten dan lintas provinsi di bidang pencegahan dan penindakan pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan; menyiapkan bahan penggalangan, kerja sama dan koordinasi peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; menyiapkan bahan penyidikan, penanganan barang bukti, ketenagaan PPNS perikanan; menyiapkan kerjasama penegakan hukum dan penanganan tindak pidana perikanan dan kelautan; menyiapkan bahan sistim pemantauan dan pengawasan pemanfaatan ruang laut, pencemaran perairan, pemanfaatan pesisir dan pulau- pulau kecil, usaha garam, penambangan pasir, BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam, bangunan laut, pipa dan kabel bawah laut, dan pengembangan wisata bahari, kawasan konservasi perairan, jenis ikan yang dilindungi, Perikanan Tangkap yang merusak (*destructive fishing*), kapal perikanan, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengolahan, distribusi serta pelayanan sistim pemantauan kapal perikanan; menyiapkan bahan pengelolaan data statistik dan informasi bidang pengawaan sumber daya kelautan dan perikanan; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penindakan pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

F. Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas

Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan komoditas, logistik, bina mutu dan diversifikasi produk.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan komoditas;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang logistik, bina mutu dan diversifikasi produk; dan
- 3) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas membawahkan:

1. Seksi Pengembangan Komoditas.

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, sarana dan prasarana di bidang pengembangan komoditas; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis, sarana dan prasarana di bidang pengembangan komoditas; menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyebarluasan teknologi pengembangan komoditas; menyiapkan bahan pemberdayaan pembudidaya ikan; menyiapkan bahan pembinaan permodalan dan investasi kelompok pembudidaya ikan yang usahanya di lintas kabupaten/ kota dalam satu Daerah; menyiapkan bahan penerapan standar mutu perbenihan dan budidaya ikan; menyiapkan bahan rekomendasi sertifikasi dan konsistensi penerapan cara pembenihan dan cara budidaya ikan yang baik; menyiapkan bahan bimbingan teknis pengembangan komoditas perikanan yang usahanya di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah; menyiapkan bahan pembinaan sertifikasi dan konsistensi penerapan cara pembuatan pakan ikan yang baik; menyiapkan bahan pengembangan induk unggul dan gerakan pakan ikan mandiri; menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi statistik Perikanan Budidaya; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan komoditas; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk.

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk; menyiapkan bahan pengembangan teknologi pengolahan; menyiapkan bahan pembinaan sistem jaminan mutu dan keamanan produk; menyiapkan bahan diversifikasi produk olahan; menyiapkan bahan pengembangan produk non konsumsi; menyiapkan bahan pembinaan kelompok pengolah produk hasil kelautan dan perikanan; menyiapkan bahan pengembangan akses pasar produk kelautan dan perikanan; menyiapkan bahan peningkatan konsumsi ikan di tingkat Daerah; menyiapkan bahan rekomendasi distribusi hasil usaha kelautan dan perikanan lintas provinsi; menyiapkan bahan promosi produk hasil perikanan; menyiapkan bahan pemenuhan bahan baku pengolahan produk hasil kelautan dan perikanan; menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi statistik pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan; menyiapkan bahan verifikasi dan pemberian rekomendasi izin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; menyiapkan bahan

pembinaan kelompok pengolah dan pemasar produk hasil kelautan dan perikanan; menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

G. Cabang Dinas Kelautan Kelas A

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas Kelautan Kelas A mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas sub urusan pengawasan dan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Cabang Dinas Kelautan Kelas A melaksanakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana teknis operasional sub urusan pengawasan dan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
- 2) koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional sub urusan pengawasan dan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
- 3) evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan sub urusan pengawasan dan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
- 4) pengelolaan ketatausahaan Cabang Dinas; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Cabang Dinas Kelautan Kelas A terdiri atas :

- a. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A;
- b. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A; dan
- c. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A.

Struktur Organisasi Cabang Dinas Kelautan Kelas A sebagai berikut:

- a. Kepala Cabang Dinas.

Bertugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Cabang Dinas sebagaimana tersebut di atas.

Kepala Cabang Dinas melaksanakan kewenangan dalam hal :

1. kewenangan pengawasan, meliputi :
 - a. operasi pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan
 - b. penetapan tindak lanjut penanganan pelanggaran.

2. kewenangan konservasi, rehabilitasi dan perijinan, meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan dan program serta pelaksanaan administrasi dibidang sub urusan konservasi, rehabilitasi;
 - b. pelaksanaan pengumpulan dan verifikasi bahan rekomendasi teknis;
 - c. penyiapan rekomendasi teknis.
3. kewenangan lainnya, meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan dan program serta pelaksanaan administrasi dibidang sub urusan pengawasan dan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya.
- b. Sub bagian Tata Usaha.
 Bertugas menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan; menyiapkan pengelolaan ketatausahaan; menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan; menyiapkan pengelolaan keuangan; menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah; menyiapkan kerja sama dan kehumasan; menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.
- c. Seksi Pengawasan;
 Bertugas menyiapkan strategi, sarana prasarana, jadwal, wilayah dan jangkauan dan perawatan armada operasi pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan Perikanan; menyiapkan pelaksanaan operasi pengawasan pemanfaatan ruang laut, pencemaran perairan, pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, usaha garam, penambangan pasir, BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam, bangunan laut, pipa dan kabel bawah laut, dan pengembangan wisata bahari, kawasan konservasi perairan, jenis ikan yang dilindungi, penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing), kapal perikanan, usaha pembudidayaan ikan, usahapengolahan, distribusi serta pelayanan sistim pemantauan kapal perikanan; menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi serta pelaporan pengawasan SDKP; dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- d. Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Perizinan.
 Bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sub urusan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya; menyiapkan bahan pengoordinasiankebijakan teknis sub urusan sub urusan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya; menyiapkan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan sub urusan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan

perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya; menyiapkan pengoordinasian pemenuhan sarana prasarana sub urusan sub urusan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya; menyiapkan evaluasi dan pelaporan sub urusan sub urusan konservasi, rehabilitasi, perijinan meliputi rekomendasi ijin lokasi, ijin pengelolaan perairan pesisir, ijin reklamasi, ijin budidaya ikan, ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

e. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

H. UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

1. Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A

yang terdiri atas:

- a. Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari;
- b. Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor;
- c. Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak;
- d. Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo;
- e. Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung; dan
- f. Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di atas mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas dibidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Serta Tata Kelola dan Pelayanan Usaha dengan melaksanakan fungsi:

1. penyusunan rencana teknis operasional di bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Serta Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
2. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Serta Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
3. evaluasi dan pelaporan di bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Serta Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;

4. pengelolaan ketatausahaan; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A, terdiri atas:

a. Kepala Pelabuhan.

Bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A.

b. Subbagian Tata Usaha.

Bertugas menyiapkan kebijakan teknis di bidang Ketatausahaan; menyiapkan pengelolaan ketatausahaan; menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan; menyiapkan pengelolaan keuangan; menyiapkan pengelolaan kepegawaian; menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah ; menyiapkan kerja sama dan kehumasan; menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;

Bertugas menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran; menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran; menyiapkan inspeksi pembongkaran ikan; menyiapkan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik; menyiapkan penerbitan surat persetujuan berlayar dan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; menyiapkan pemeriksaan *log book* (data tangkapan ikan); menyiapkan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan; menyiapkan rekomendasi bahan bakar bersubsidi; menyiapkan pelayanan cek fisik kapal dan alat penangkap ikan; menyiapkan kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha.

Bertugas menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang tata kelola dan pelayanan usaha; menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang tata kelola dan pelayanan usaha; menyiapkan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana; menyiapkan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha; menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola dan pelayanan usaha; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelabuhan yang bersangkutan.

f. Unit Penunjang

Unit penunjang merupakan unit organisasi non struktural berupa Sentra Pendaratan Ikan yang dipimpin oleh seorang Koordinator.

2. Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B

terdiri atas:

- a. Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong;
- b. Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto;
- c. Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang;
- d. Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa; dan
- e. Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan.

Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai dengan melaksanakan fungsi :

1. penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
2. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
3. evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
4. pengelolaan ketatausahaan; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B terdiri atas:

a. Kepala Pelabuhan.

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, serta tata kelola dan pelayanan usaha. Tugas tersebut meliputi:

1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, serta tata kelola dan pelayanan usaha;
2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, serta tata kelola dan pelayanan usaha;
3. menyiapkan inspeksi pembongkaran ikan;
4. menyiapkan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
5. menyiapkan penerbitan surat persetujuan berlayar dan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
6. menyiapkan pemeriksaan log book (data tangkapan ikan);
7. menyiapkan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
8. menyiapkan rekomendasi bahan bakar bersubsidi;
9. menyiapkan pelayanan cek fisik kapal dan alat penangkap ikan;
10. menyiapkan kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang- undangan;

11. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha; dan
 12. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Subbagian Tata Usaha.
- mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketatausahaan. Tugas tersebut meliputi:
1. menyiapkan kebijakan teknis di bidang Ketatausahaan;
 2. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 3. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
 4. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 5. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 6. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;
 7. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 8. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 9. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Balai dan
10. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dikoordinir oleh seorang koordinator serta bertanggung jawab kepada Kepala Pelabuhan yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

3. Balai Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut Kelas A.

Balai Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut Kelas A mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang Produksi dan Penerapan Teknologi serta Pelayanan Usaha dan Jasa dengan melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Balai Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut Kelas A terdiri atas:

- a. Kepala Balai.

Bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut Kelas A

b. Subbagian Tata Usaha.

mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan. Tugas tersebut meliputi:

1. menyiapkan kebijakan teknis di bidang Ketatausahaan;
2. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
3. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
4. menyiapkan pengelolaan keuangan;
5. menyiapkan pengelolaan administrasi kepegawaian;
6. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah ;
7. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
8. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
9. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Balai dan
10. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Produksi dan Penerapan Teknologi;

mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Produksi Dan Penerapan Teknologi. Tugas tersebut meliputi:

1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi;
2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi;
3. menyiapkan pelaksanaan adopsi inovasi teknologi, kaji terap, diseminasi kepada pembudidaya air payau dan laut, unit pembenihan skala rumah tangga dan masyarakat;
4. menyiapkan pembinaan dan temu teknis produksi kepada pembudidaya air payau dan laut, unit pembenihan skala rumah tangga dan masyarakat;
5. menyiapkan produksi calon induk dan benih ikan air payau dan laut;
6. menyiapkan pemuliaan ikan budidaya air payau dan laut;
7. menyiapkan evaluasi dan pelaporan dibidang produksi dan penerapan teknologi; dan
8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Seksi Pelayanan Usaha dan Jasa.

mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan usaha dan jasa. Tugas tersebut meliputi:

1. menyiapkan penyusunan rencana tekni operasional di bidang pelayanan usaha dan jasa;
2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan usaha dan jasa;

3. menyiapkan penyebarluasan informasi teknologi budidaya ikan air payau dan laut;
 4. menyiapkan pelayanan jasa konsultasi teknis kepada pembudidaya ikan payau dan laut, unit pembenihan skala rumah tanggadan masyarakat;
 5. menyiapkan pelayanan usaha penjualan induk, calon induk, benih dan produksi budidaya ikan air payau dan laut;
 6. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan usaha dan jasa; dan
 7. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dikoordinir oleh seorang koordinator serta bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- f. Unit Penunjang
- Unit penunjang merupakan unit organisasi non struktural berupa Loka Budidaya Ikan Air Payau dan Laut yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang dibentuk guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

4. Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Kelas A.

Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perairan dengan melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian dan pengendalian hama dan penyakit;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengujian dan pengendalian hama dan penyakit;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian dan pengendalian hama dan penyakit;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A, terdiri atas :

- a. Kepala Balai.
Bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A.
- b. Subbagian Tata Usaha.
Bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan. Tugas tersebut meliputi:

1. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 2. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 3. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
 4. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 5. menyiapkan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 6. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah ;
 7. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 8. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 9. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
 10. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. Seksi Pengujian dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan.
- Bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian dan pengendalian hama penyakit ikan. Tugas tersebut meliputi :
1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian dan pengendalian hama penyakit ikan;
 2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengujian dan pengendalian hama penyakit ikan;
 3. menyiapkan penyebarluasan informasi teknologi mengatasi hama dan penyakit;
 4. memonitoring dan menganalisa residu obat, bahan kimia, bahan biologi dan kontaminan serta penggunaan pakan ikan;
 5. mengawasi peredaran pestisida, bahan kimia maupun obat-obatan;
 6. monitoring, survailance dan menganalisa resiko akibat hama penyakit ikan;
 7. mengawasi lalu lintas media pembawa hama penyakit ikan;
 8. menganalisa dan mengevaluasi kerugian akibat hama penyakit ikan;
 9. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian dan pengendalian hama penyakit ikan; dan
 10. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- d. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
- Bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan. Tugas tersebut meliputi :
1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
 2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
 3. menyusun standarisasi kesehatan ikan dan lingkungan;
 4. melaksanakan pengelolaan lingkungan sumberdaya, higienitas dan sanitasi lingkungan usaha perikanan;
 5. menyiapkan pelaksanaan adopsi inovasi teknologi, kaji terap, diseminasi kesehatan ikan dan lingkungan;
 6. mengembangkan induk dan benih yang tahan penyakit (uji dan pengembangan);

7. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan; dan
 8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- e. **Kelompok Jabatan Fungsional.**
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dikoordinir oleh seorang koordinator serta bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- f. **Unit Penunjang**
Unit penunjang merupakan unit organisasi non struktural berupa Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang dibentuk guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

5. Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A.

Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di

bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan dengan melaksanakan fungsi:

1. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
2. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
3. evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
4. pengelolaan ketatausahaan; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A, terdiri atas:

a. **Kepala Balai**

Bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A.

b. **Subbagian Tata Usaha**

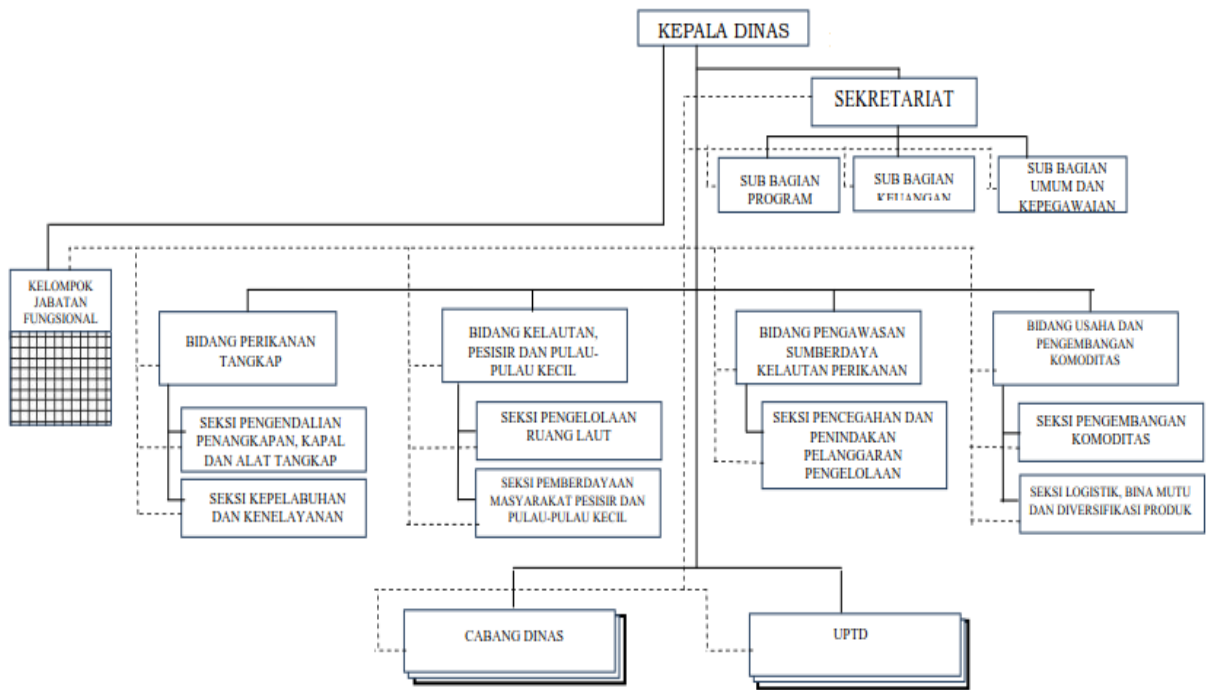
Bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan. Tersebut meliputi :

- 1) menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
- 2) menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
- 3) menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
- 4) menyiapkan pengelolaan keuangan;
- 5) menyiapkan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 6) menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;
- 7) menyiapkan kerja sama dan kehumasan;

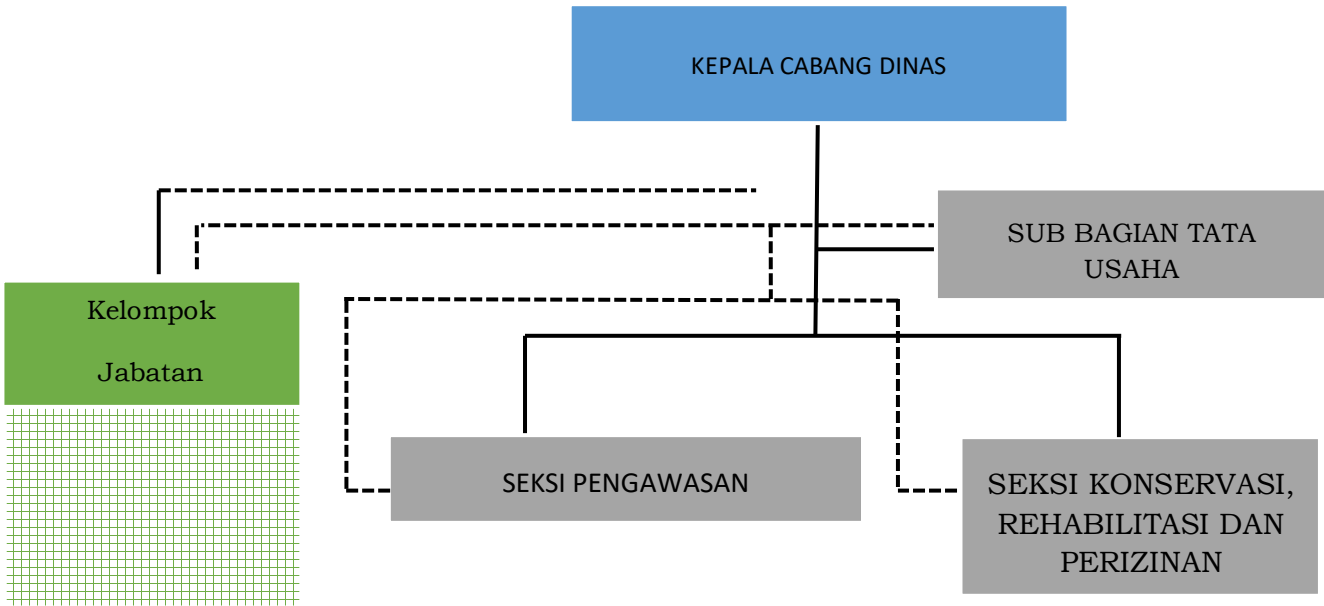
- 8) menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - 9) menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
 - 10) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan
- Bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian mutu hasil perikanan. Tugas tersebut meliputi:
1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian mutu hasil perikanan;
 2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengujian mutu hasil perikanan;
 3. menyiapkan pengujian mutu secara laboratoris terhadap produk pengolahan dan hasil perikanan (mikrobiologi, organoleptik dan kimia);
 4. menyiapkan pengembangan kemampuan pengujian sesuai tuntutan pasar;
 5. menyiapkan sistem manajemen mutu laboratorium;
 6. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian mutu hasil perikanan; dan
 7. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- d. Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan
- Bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan mutu hasil perikanan. Tugas tersebut meliputi:
1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang penerapan mutu hasil perikanan;
 2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang penerapan mutu hasil perikanan;
 3. menyiapkan inspeksi penerapan cara pengolahan yang baik dan prosedur operasional standar sanitasi;
 4. menyiapkan monitoring produk hasil perikanan pada unit pengolahan ikan dan suplier (air, es, kesegaran bahan baku, dan residu bahan kimia berbahaya);
 5. menyiapkan sistem manajemen mutu produk hasil perikanan
 6. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan mutu hasil perikanan; dan
 7. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dikoordinir oleh seorang koordinator serta bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- f. Unit Penunjang merupakan unit organisasi non struktural berupa Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium yang dibentuk guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

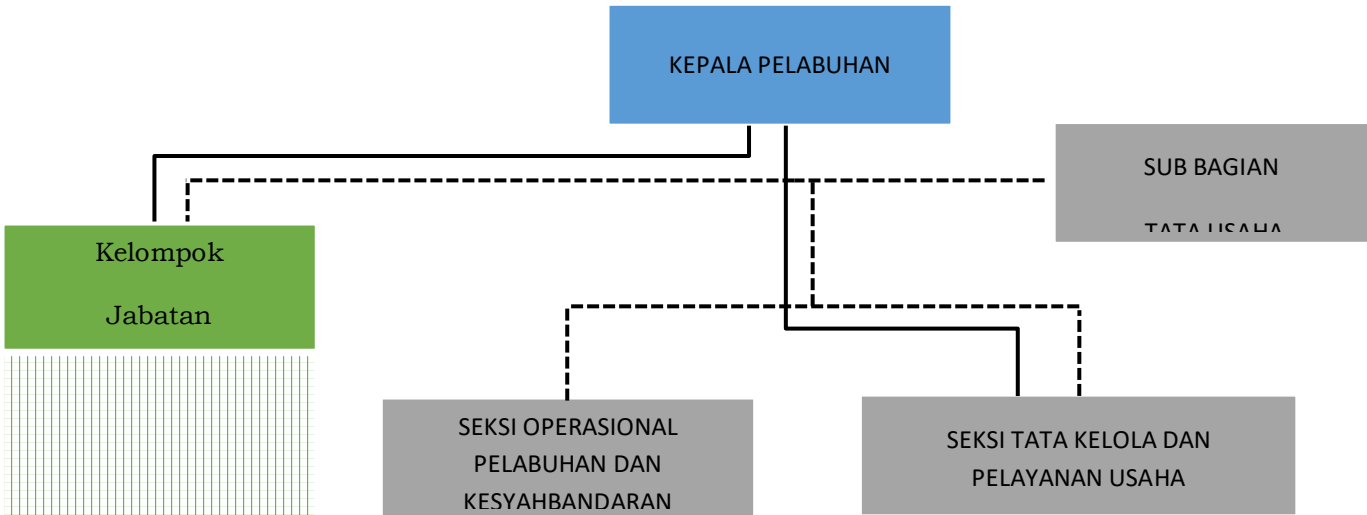
Bagan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 2.1. – Gambar 2.7.



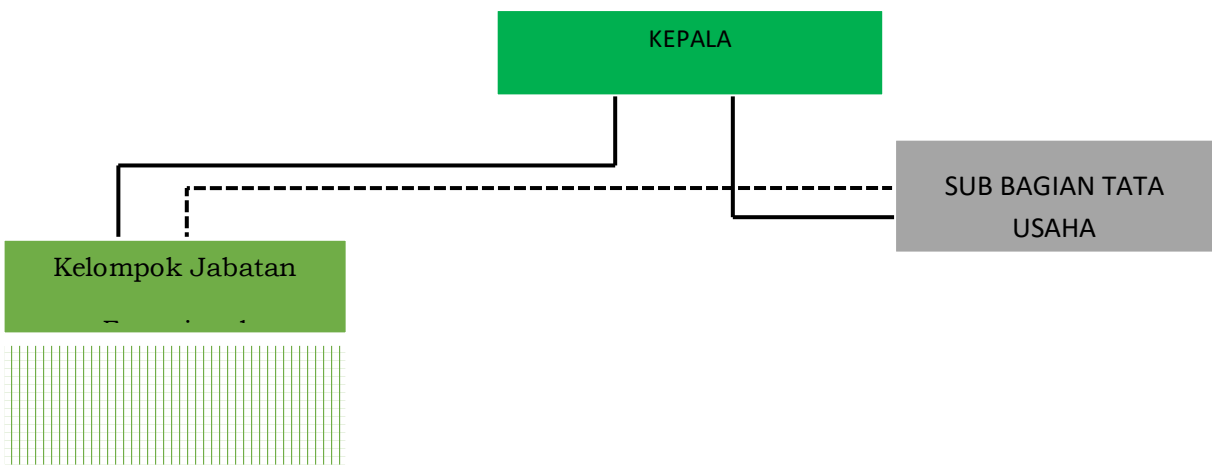
Gambar 2.1. Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



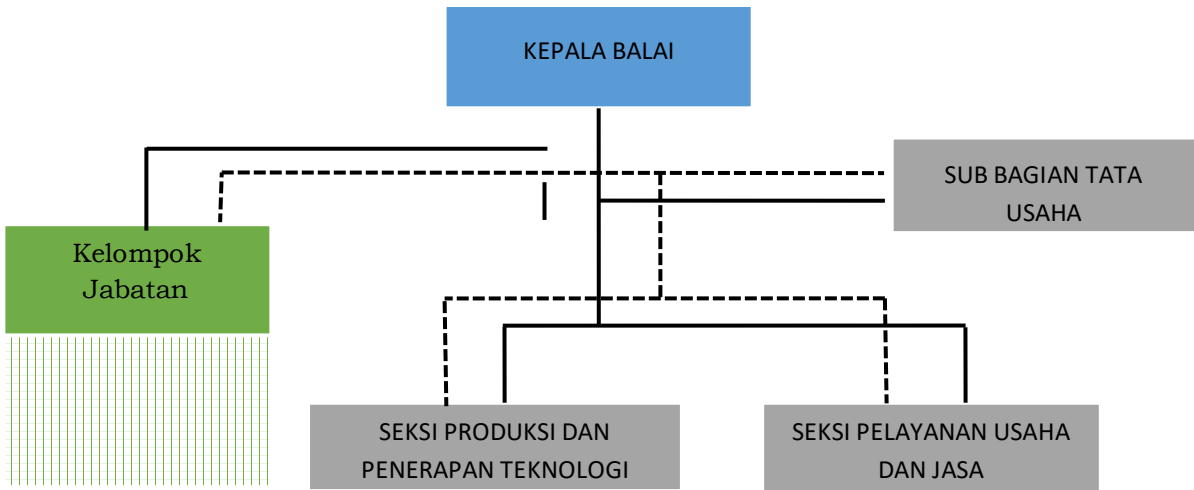
Gambar 2.2. Bagan Organisasi Cabang Dinas Kelautan Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



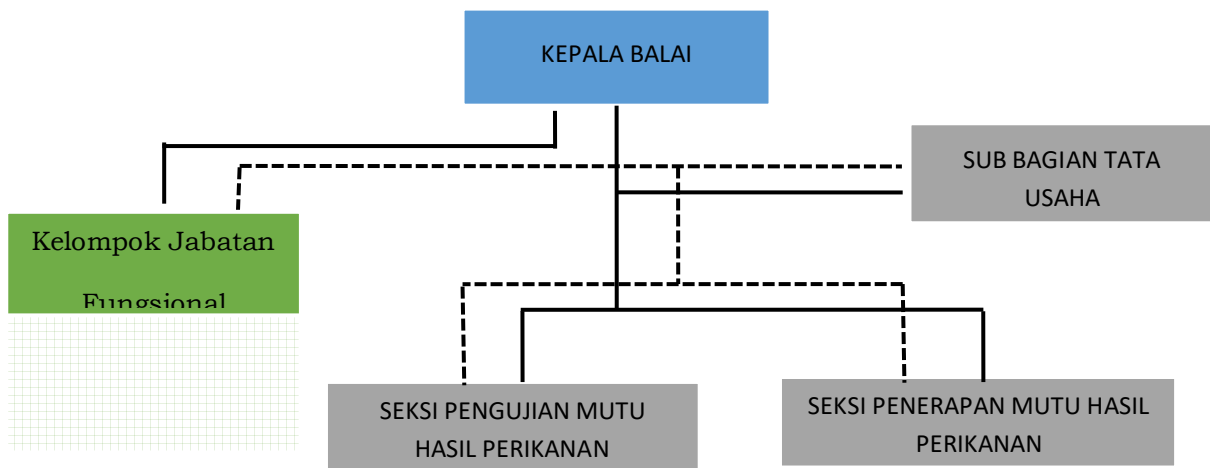
Gambar 2.3. Bagan Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



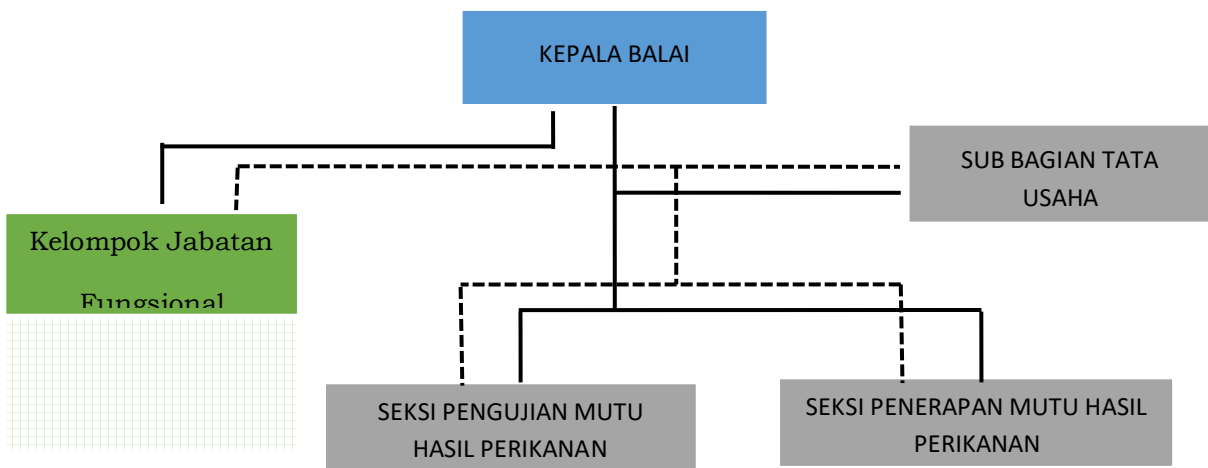
Gambar 2.4. Bagan Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.5. Bagan Organisasi Balai Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.6. Bagan Organisasi Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.7. Bagan Organisasi Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

2.2. SUMBERDAYA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

2.2.1. Jumlah Pegawai

Pada tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah pegawai sebanyak 247 orang. Sejumlah pegawai tersebut tersebar di seluruh bidang dan UPT dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2., dapat diketahui bahwa berdasarkan golongannya jumlah pegawai Golongan I berjumlah 7 orang, Golongan II sebanyak 42 orang, Golongan III sebanyak 171 orang dan Golongan IV sebanyak 24 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan jumlah pegawai yang lulusan SD adalah 7 orang, SLTP sebanyak 7 orang, SLTA sebanyak 53 orang, Sarjana Muda sebanyak 16 orang, S1/DIV sebanyak 126 orang, S2 sebanyak 38 orang dan S3 sebanyak 2 orang. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

dan Jenis Kelamin di Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

2.2.2. Aset/Modal

Sarana dan prasarana penunjang kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah secara bertahap terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Hingga Januari 2018, secara umum prasarana kerja berupa gedung perkantoran yang sudah milik sendiri antara lain: balai budidaya, laboratorium, kapal inspeksi perikanan, mobil laboratorium keliling dan mobil Gemarikan. Berikut ini merupakan Tabel 2.1. mengenai aset/modal Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan sarana dan prasarana penunjang kinerja.

Tabel 2.1. Aset/Modal Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Tahun 2023

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ alamat	Penggunaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	14012	1986	Jl. Veteran No. 2 KAB. CILACAP	Pembenihan dan Budidaya Ikan Air Laut Kebumen	
2	TANAH.TANAH BANGUNAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III	564	1980	Ds. Gunung simping , Kec.Cilacap, KAB. CILACAP	LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL DINLUTKAN PROV. JATENG	
3	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	930	1988	Jl. Ksatrian, Karangkobar, Sokanegara, KAB. BANJARNEGARA	BPBIAT Muntilan	
4	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	20000	2012	Ds. Singosari Kec. Karangwelas KAB. BANYUMAS	BPBIAT Muntilan	
5	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	20000	2012	Ds. Tambaksogra Kec. Banyumas KAB. BANYUMAS	DERMAGA DAN TPI	
6	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	90939	2016	DESA PASIR ,Pasir.Ayah.KAB. KEBUMEN	DERMAGA	
7	TANAH.TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA / JASA.TANAH BANGUNAN DERMAGA	41742	2016	DESA PASIR ,Pasir.Ayah.KAB. KEBUMEN	Perbenihan dan Budi Daya Ikan Tawar Muntilan MGL BPBIAT Muntilan	
8	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	29510	1985	JI Kerkop No. 1 Ds. Muntilan Kec. Muntilan KAB. MAGELANG	BPBIAT Muntilan	
9	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	10405	1994	Ds. Sawangan , Kec. Sawangan , KAB. MAGELANG	BPBIAT Muntilan	
10	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	11540	1994	Ds. Sawangan , Kec. Sawangan , KAB. MAGELANG	Perbenihan dan Budi Daya Ikan Tawar Ngrajek MGL Perbenihan dan Budi Daya Ikan Tawar Ngrajek MGL	
11	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	9720	1987	Ds. Ngrajek , Kec. Mungkid , KAB. MAGELANG	Perbenihan dan Budi Daya Ikan Tawar Ngrajek MGL	
12	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	43990	1987	Ds. Ngrajek , Kec. Mungkid , KAB. MAGELANG	Perbenihan dan Budi Daya Ikan Tawar Ngrajek MGL	
13	TANAH.TANAH KOSONG YANG SUDAH DIPERUNTUKKAN	100	2007	Ds. Parimono, Kec.Mungkid , Kab. Magelang, KAB. MAGELANG	Perbenihan dan Budi Daya Ikan Tawar Ngrajek MGL	
14	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	28425	1981	Ds. Janti , Kec. Polanharjo , KAB. KLATEN	Perbenihan dan Budi Daya Ikan Air Tawar Janti di K	

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ alamat	Penggunaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
15	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	600	1997	Ds. Ngabean Kec. Kartosuro Kab Sukoharjo,Ngabeyan.Kartasura.KAB. SUKOHARJO	DINLUTKAN PROV. JATENG	
16	TANAH.TANAH BANGUNAN RUMAH NEGARA	2207	1958	Jl. Diponegoro No. 90,Tasikagung KAB. REMBANG	Rumah dinas	
17	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	7405	1996	Ds. Tasikagung , Kec. Rembang, KAB. REMBANG	PPP TASIKAGUNG REMBANG	
18	TANAH.TANAH BANGUNAN POS JAGA/MENARA JAGA	7875	2004	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang.KAB. REMBANG	POSKAMLADU	
19	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	222	2009	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang.KAB. REMBANG		
20	TANAH.TANAH BANGUNAN PASAR	222	2012	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang.KAB. REMBANG		
21	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	222	2012	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang.KAB. REMBANG		
22	TANAH.TANAH BANGUNAN TERMINAL LAUT	4086	2014	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang.KAB. REMBANG	KBT	
23	TANAH.TANAH BANGUNAN TERMINAL LAUT	14456	2014	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang.KAB. REMBANG	PEKARANGAN KBT	
24	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	6359	2014	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang.KAB. REMBANG	TPI TASIKAGUNG	
25	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	3045	2014	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang.KAB. REMBANG	JALAN TPI	
26	TANAH.TANAH BANGUNAN TERMINAL LAUT	14311	2016	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang.KAB. REMBANG	KAWASAN PPP	
27	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	5751	1987	Ds. Jatisari Kec. sluke KAB. REMBANG	PIAP SLUKE REMBANG	
28	TANAH.TANAH UNTUK BANGUNAN INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU	30	2011	DESA SLUKE KEC. SLUKE REMBANG KAB. REMBANG	TANAH UNTUK INSTALASI AIR BERSIH PIAP SLUKE	
29	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	1997	1991	JL. SOEDIRMAN 12A PLANGITAN, KAB. PATI	CABANG DINAS KELAUTAN WIL TIMUR	
30	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	26570	2012	Ds. Pengkolan Kec. Margoyoso KAB. PATI	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
31	TANAH.TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/GDG.TEMPAT TINGGAL.LAIN-LAIN	1220	1990	JL. Achmad Dahlan, Kec.Karimunjawa, KAB. JEPARA	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) KARIMUNJAWA	
32	TANAH.TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/GDG.TEMPAT TINGGAL.LAIN-LAIN	9570	1990	JL. Achmad Dahlan, Kec.Karimunjawa, KAB. JEPARA	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) KARIMUNJAWA	
33	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	1415	2009	Jl. Cik Lanang Jepara, Jobokuto KAB. JEPARA	Ex Kantor Cabang Dinas Jepara	
34	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	9296	2013	Karimunjawa KAB. JEPARA	Tanah Untuk Penampungan Air Tawar PPP Karimunjawa	
35	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	3000	2014	JL. AE SURYANI,Bulu, KAB. JEPARA	TANAH UNTUK TPI BULU JEPARA	
36	TANAH.TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/GDG.TEMPAT TINGGAL.LAIN-LAIN	1940	1990	Jl. Achmad Dahlan, Kec. Karimunjawa KAB. JEPARA	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) KARIMUNJAWA	
37	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	25110	2005	DS. Bulu Kec. Jepara KAB. JEPARA	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
38	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	25710	2005	DS. Bulu Kec. Jepara KAB. JEPARA	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ alamat	Penggunaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
39	TANAH.TANAH	22200	2005	Ds. Kauman Kec jepara KAB. JEPARA	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan	
40	TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	20090	2005	Ds. JoboKuto Kec. Jepara KAB. JEPARA	Air Payau Marib	
41	TANAH.TANAH	1500	2012	Ds. Bandengan Kec. Jepara KAB. JEPARA	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan	
42	TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	19480	2014	DESA JOBOKUTO KEC. JEPARA, KAB. JEPARA	Air Payau Marib	
43	TANAH.TANAH	8000	2014	DESA JOBOKUTO KEC. JEPARA, KAB. JEPARA	TANAH TAMBAK JOBOKUTO JEPARA	
44	TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	1155	2014	DESA BULU KEC. JEPARA JEPARA KAB. JEPARA	TAMBAK JOBOKUTO JEPARA	
45	TANAH.TANAH	16160	2014	DESA KAUMAN KEC. JEPARA JEPARA KAB. JEPARA	TANAH UNTUK TAMBAK BULU JEPARA	
46	TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	40000	1980	Ds. tambak bulusan kec. karang tengah KAB. DEMAK	TANAH TAMBAK KAUMAN JEPARA	
47	TANAH.TANAH	13185	2001	Ds. Purworejo Kec. Bonang KAB. DEMAK	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan	
48	TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	18419	2001	Ds. Morodemak Kec. Bonang KAB. DEMAK	Air Payau Marib	
49	TANAH.TANAH	22496	2001	Ds. Berahan Wetan Kec Wedung KAB. DEMAK	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan	
50	TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	39698	2016	PURWOREJO BONANG, Morodemak. KAB. DEMAK	Air Payau Marib	
51	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	500	1988	Ds. Nyatnyono , Kec. Ungaran, KAB. SEMARANG	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan	
52	RUMAH NEGARA GOLONGAN III	9510	1995	Ds. Pojoksari, Kec. Ambarawa, KAB. SEMARANG	Air Payau Marib	
53	TANAH.TANAH NON PERSIL LAINNYA	22420	1998	Ds. Turunrejo , Kec. Brangsong, KAB. KENDAL	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan	
54	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	7738	2014	DESA GEMPOLSEWU KEC. ROWOSARI, KAB. KENDAL	Perbenihan dan Budi Daya Ikan	
55	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	12360	1988	Ds. Karangasem, Kec. Batang, KAB. BATANG	Tawar Ambarawa SMG	
56	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	1600	1989	Ds. Karangasem, Kec.Batang, KAB. BATANG	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan	
57	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	225	1991	Ds.Kedungsegog, Kec. Tulis, KAB. BATANG	Air Payau Marib	
58	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	1010	1991	Ds. Kebondalem, Kec. Gringsing, KAB. BATANG	KANTOR	
59	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	250	1993	Ds. Kedawung,Kec. Limpung, KAB. BATANG	KAWASAN PPP TAWANG KENDAL	
60	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	450	2016	KARANGASEM KAB. BATANG	TPI KLIDANG LOR	
61	TANAH.TANAH	10360	2017	WUKIRSARI, KAB. BATANG	PPP KLIDANG LOR	
62	TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	11040	1994	Ds. Sejomerto , Kec. Roban, KAB. BATANG	TPI ROBAN	
63	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	725	1988	Ds. Sugih waras, Kec. Pemalang, KAB. PEMALANG	TPI SIKLAYU	
					TPI CELONG	
					KANTOR	
					TAMBAK	
					BBI SEJOMERTO	
					PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) ASEMDOYONG	

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ alamat	Penggunaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
64	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	19842	1995	Ds. Lawangrejo Kec. Pemalang, KAB. PEMALANG	BBIAPL TUGU	
65	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	21110	2012	Ds Pesantren Kec. Ulujami KAB. PEMALANG	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib PELABUHAN ASEMDOYONG BBI RANDUDONGKAL	
66	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	20235	2016	DS ASEMDOYONG,Taman, KAB. PEMALANG		
67	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	15300	2003	Ds. Banjaranyar , Kec. Randudongkal KAB. PEMALANG		
68	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	1600	1993	JL BANDENG MUNJUNGAGUNG, KAB. TEGAL	CABANG DINAS KELAUTAN WILAYAH BARAT	
69	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	190	1993	Ds. Mujungagung , Kec. Kramat, KAB. TEGAL	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib PPI LARANGAN	
70	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	21400	2016	Ds. Mujungagung , Kec. Kramat, KAB. TEGAL		
71	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	91940	1989	Ds. Maribaya Kec. Kramat KAB. TEGAL	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
72	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	25000	2012	Ds. Kedung Kelor Kec. Marib KAB. TEGAL	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
73	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	22250	2012	Ds. Kedung Kelor Kec. Marib KAB. TEGAL	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
74	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	685	1995	Ds. Brebes , Kec. Brebes, KAB. BREBES	DINLUTKAN PROV. JATENG	
75	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	320	1987	Ds. Wates , Kec. Magelang Utara, KOTA MAGELANG	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar Munt	
76	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	1301	1985	Jl. Imam Bonjol No. 130,Sekayu,,Semarang Tengah, KOTA SEMARANG	DINLUTKAN PROV. JATENG	
77	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	1272	1985	Jl. Imam Bonjol No. 130,Sekayu,,Semarang Tengah, KOTA SEMARANG		
78	TANAH.TANAH BANGUNAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III	496	2001	Jl. Trunojoyo X/23 A Banyumanik Banyumanik.KOTA SEMARANG	RUMDIN DINLUTKAN PROV. JATENG	
79	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	2885	2002	Jl. Imam Bonjol No. 134 Sekayu, Semarang Tengah, KOTA SEMARANG	DINLUTKAN PROV. JATENG	
80	TANAH.TANAH KOSONG YANG SUDAH DIPERUNTUKKAN	855	2015	Jl. Sisingamangaraja No. 77, Wonotinggal, Candisari, KOTA SEMARANG	RUMDIN	
81	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	25180	1990	Ds. Mangunharjo, Kec. Tugu, KOTA SEMARANG	DINLUTKAN PROV. JATENG	
82	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	5922	2001	Ds. Karanganyar, Kec. Tugu, KOTA SEMARANG	Budidaya Ikan Air Payau Karanganyar SMG	
83	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	37114	2001	Ds. Karanganyar, Kec. Tugu, KOTA SEMARANG	Budidaya Ikan Air Payau Karanganyar SMG	
84	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	692	1988	Jl. Mpu Tantular No. 2, Bandarharjo, Semarang Utara, KOTA SEMARANG	BALAI KARANTINA DAN KESEHATAN IKAN LPPMHP SEMARANG	
85	TANAH.TANAH BANGUNAN LABORATORIUM	2320	1978	Jl. Siliwangi No. 636, Krapyak, Semarang Barat, KOTA SEMARANG		
86	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	13485	1993	Ds. Panjangwetan, Pekalongan Utara, KOTA PEKALONGAN	BPPI WONOKERTO	
87	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	2000	1977	Ds. Panjangwetan, Pekalongan Utara, KOTA PEKALONGAN	LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL P	
88	TANAH.TANAH BANGUNAN	5480	2002	PPP TEGALSARI, TEGAL	PERUM	

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ alamat	Penggunaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
89	PERUMAHAN/GDG.TEMPAT TINGGAL.LAIN-LAIN	7720	2002	BARAT.KOTA TEGAL	KOMPLEK JONGOR	
90	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	43160	2002	PPP TEGALSARI, TEGAL BARAT.KOTA TEGAL	PUSAT PENDARATAN IKAN	
91	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	36688	2002	PPP TEGALSARI, TEGAL BARAT.KOTA TEGAL	PUSAT PENDARATAN IKAN PELELANGAN IKAN	
92	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	11520	2002	PPP TEGALSARI, TEGAL BARAT.KOTA TEGAL	PUSAT PENDARATAN IKAN	
93	TANAH.TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA / JASA.TANAH BANGUNAN DERMAGA	50406	2002	PPP TEGALSARI, TEGAL BARAT.KOTA TEGAL	DERMAGA	

Sarana kerja penunjang lain yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah berupa sarana informasi portal berupa *website* dengan alamat akses <http://dkp.jatengprov.go.id>, Email: dkp@jatengprov.go.id, facebook: dkpjateng; Twitter @dkpjateng; Instagram @dkpjateng; Sarana informasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.2. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

NO	INSTANSI	JUMLAH 4+9+14+19+25	PEGAWAI																				CALON PEGAWAI										KET
			JML	I				JML	II				JML	III				JML	IV					JML	GOL I			GOL II			GOL III		
				5-8	a	b	c		d	10-13	a	b		c	d	15-18	a		b	c	d	20-24	a		b	c	d	e	26-30	a	b	c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	44
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	58	1	0	0	0	1	8	0	0	1	7	36	12	2	10	12	11	8	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0
2	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TEGALSARI	15	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	8	2	2	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KLIDANGLOR	7	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5	0	1	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MORODEMAK	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BAJOMULYO	8	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	5	1	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TASIKAGUNG	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5	0	1	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LOHGENDING	7	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	5	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	BALAI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU DAN LAUT	17	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	14	0	4	4	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LARANGAN	8	1	0	0	1	0	3	0	0	0	3	4	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI ASEMDOYONG	7	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	5	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI WONOKERTO	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAWANG	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KARIMUNJAWA	8	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	CABANG DINAS KELAUTAN WILAYAH TIMUR	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	7	3	2	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	CABANG DINAS KELAUTAN WILAYAH BARAT	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	9	5	1	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	CABANG DINAS KELAUTAN WILAYAH SELATAN	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	8	3	0	2	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	BALAI LABORATORIUM PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	46	0	0	0	0	0	11	1	3	2	5	33	12	7	5	9	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
18	BALAI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	17	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	13	5	1	2	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	247	7	0	0	1	6	42	3	5	5	29	171	46	29	30	66	24	15	8	1	0	0	3	0	0	0	0	0	2	1	0	

Sumber : DKP Jateng, 2023

Tabel 2.3. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah 2023

NO.	UNIT ORGANISASI	TINGKAT PENDIDIKAN							JENIS KELAMIN		KET.
		SD	SLTP	SLTA	Sarjana Muda	S1/DIV	S2	S3	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	0	8	7	28	15	1	33	27	
2	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TEGALSARI	3	0	4	1	6	1	0	7	8	
3	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KLIDANGLOR	0	0	2	0	3	2	0	6	1	
4	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MORODEMAK	0	0	1	0	2	1	0	3	1	
5	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BAJOMULYO	0	0	1	1	5	1	0	7	1	
6	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TASIKAGUNG	0	0	2	0	4	1	0	6	1	
7	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LOHGENDING	1	0	2	1	3	0	0	5	2	
8	BALAI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU DAN LAUT	0	0	5	0	10	2	0	11	6	
9	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LARANGAN	1	0	4	0	2	1	0	6	2	
10	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI ASEMDOYONG	0	1	2	0	3	1	0	6	1	
11	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI WONOKERTO	0	0	1	0	1	1	1	4	0	
12	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAWANG	0	0	1	0	1	1	0	2	1	
13	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KARIMUNJAWA	1	0	4	0	3	0	0	6	2	
14	CABANG DINAS KELAUTAN WILAYAH TIMUR	0	0	3	0	5	2	0	8	2	
15	CABANG DINAS KELAUTAN WILAYAH BARAT	0	0	1	0	10	0	0	9	2	
16	CABANG DINAS KELAUTAN WILAYAH SELATAN	0	0	1	1	6	2	0	4	6	
17	BALAI LABORATORIUM PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	0	5	9	4	22	6	0	27	19	
18	BALAI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	0	1	2	1	12	1	0	9	8	
	J U M L A H	7	7	53	16	126	38	2	159	90	

Sumber : DKP Jateng, 2023

2.2.3. PROFIL UPT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Berikut ini adalah gambaran profil Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT) yang berada dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

1. BALAI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN KELAS A SEMARANG

UPT BPMHP Kelas A merupakan perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2018 yang sebelumnya adalah BP2MHP milik Dinas Kelautan Dan Perikanan Jawa Tengah. BPMHP Semarang memiliki 2 (dua) Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan yaitu: Pekalongan dan Cilacap dan telah terakreditasi. BPMHP berdiri sebagai unit pelaksana teknis daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah No.Hukum.G.102/1973 pada tanggal 19 Mei 1973 dengan nama awal yaitu Lembaga Teknologi Perikanan. Kemudian pada tanggal 15 Juni 1977 dibentuk Unit Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) yang terletak di Semarang, Pekalongan dan Cilacap. Kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 38 Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008, diterbitkan peraturan baru yang merubah nama unit laboratorium tersebut menjadi Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP). Pada tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah diubah menjadi Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPMHP). Peraturan tersebut adalah Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 47 Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Jenis layanan di BPMHP, antara lain;

1. Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).
2. Rekomendasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Pengolahan.
3. Pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan secara laboratoris.

a) BPMHP Semarang

Jenis Kemampuan Pengujian yang ada di BPMHP Semarang, antara lain;

i) Mikrobiologi:

ALT (Angka Lempeng Total), *Escherichi coli*, *Salmonella*, *Vibrio cholerae*, *Staphylococcus aureus*.

ii) Kimia dan Fisika:

Kadar Air, Kadar Abu, Kadar Garam, Kadar TVB dan TMA, *Chloramphenicol*, Formalin, Logam Berat (Hg,Pb,Cd), dan *Tetracycline*.

iii) Organoleptik:

Uji Kesegaran dan Uji *Filth*.

Wilayah kerja BPMHP Semarang meliputi seluruh Jawa Tengah

b) LPMHP Pekalongan

Jenis kemampuan pengujian di LPMHP Pekalongan, antara lain;

(1) Mikrobiologi :

Angka Lempeng Total, *Coliform*, *Escherichia coli*, *Salmonella*, *Vibrio Cholerae*, *Staphylococcus aureus*.

(2) Kimia dan Fisika :

Suhu Pusat, Bobot Tuntas.

(3) Organoleptik :

Uji Kesegaran dan Uji Filth.

Wilayah kerja LPMHP Pekalongan meliputi Seluruh Jawa Tengah.

c) LPMHP Cilacap

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Laboratorium Pengujian Hasil Perikanan (LPMHP) Cilacap adalah sebagai berikut :

1. Peralatan untuk pengujian organoleptik :
 - 1) Uji Organoleptik
 - 2) Uji Sensori
 - 3) Uji Filth
 - 4) Bobot Tuntas
 - 5) Suhu Pusat
2. Peralatan untuk pengujian mikrobiologi, dengan parameter uji :
 - 1) Total Plate Count (TPC)/ALT
 - 2) E.coli
 - 3) Sallmonella
 - 4) Vibrio (cholerae dan parahaemolythycus)
 - 5) Staphylococcus aerus
 - 6) Coliform
3. Peralatan untuk pengujian kimia
 - 1) Histamin
 - 2) TVB-N
 - 3) Formalin
 - 4) Antibiotik

Wilayah kerja LPMHP Cilacap meliputi Seluruh Jawa Tengah.

2. PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) KELAS A

Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya.

UPT PPP Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berjumlah 6 (Enam) unit yang tersebar di pantai utara dan pantai selatan. Berikut ini adalah gambaran umum PPP yang ada di Provinsi Jawa Tengah :

1) PPP Tegalsari Kota Tegal

PPP Tegalsari secara geografis terletak pada koordinat 06°51'-06°52' LS dan 109°09'-109°10' BT di Desa Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Tegalsari antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Breakwater, Revetment, training Jetty, Dermaga bongkar, Dermaga tambat labuh, Alur masuk pelabuhan, Kolam labuh, Kolam perbekalan, Jalan Penghubung).
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Fasilitas Pendaratan Ikan (Bangunan TPI dan Tempat Pengepakan), Fasilitas Navigasi (Pelayaran dan Komunikasi, Rambu Suar, Suar Penuntun, Telepon), Fasilitas Suplai Air dan BBM (Reservoir, Sumur Artesis, Jaringan Air Bersih, SPBN (Dikelola KUD “Karya Mina”), Catu Daya Listrik, Gardu Induk Listrik dan Travo, Jalan

dan Saluran, Gorong-gorong), Pabrik Es (Kap.8 ton/hari), Chilling Room/Gold Storage (Kap.30 ton), Drainase).

- Fasilitas Penunjang (meliputi: Kantor Administrasi (Kantor PPP Tegalsari, Kantor Syahbandar, dan Poskamladu), Bangunan Serbaguna dan lainnya (Balai Pelatihan Nelayan (SUPM), Mess Operator, Toilet Umum, Kios Pedagang (*Cofish*), Kios Pedagang Swadana, Kios Pedagang (APBD Jateng), Tempat Pengepakan Ikan (*Cofish*), Tempat Pengepakan Ikan (APBD Jateng), Tempat Pengepakan Ikan (Swadana), Gerbang Pelabuhan, Gedung Pabrik Tepung Ikan, Tempat Parkir, Ruko Swadana, Unit Pengolah Limbah (UPL), Tempat Fillet Ikan (Swadana), Pos Portal, Tempat Perbaikan Jaring, Kontainer Sampah, Excavator, Ponton / Tongkang)

2) PPP Klidang Lor Kabupaten Batang

PPP Klidang Lor secara geografis terletak pada koordinat 6°53'11"LS-109°44'55"BT di Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Klidang Lor antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: *Break water*, Alur Perairan, Dermaga (Tiang tambat labuh, penerangan, penangkis gelombang/talud)).
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Kantor PPP, Kantor Syahbandar, TPI, Lantai Lelang, Instalasi listrik, Sound System, SPDN, Instalasi air bersih, Menara suar).
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Areal parkir, Kamar mandi/WC, Kios, Areal pengepakan ikan, Kereta dorong, Kolam labuh, Koperasi, Klinik Kesehatan, Pompa air).

3) PPP Morodemak Kabupaten Demak

PPP Morodemak secara geografis terletak pada koordinat 110°32'40"BT dan 6°49'30"LS di Dukuh Kongsu Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Morodemak antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Alur Pelayaran, Dermaga Bongkar, Dermaga fender, Dermaga perbekalan, Breakwater barat, Breakwater timur, Talud sheet pile, Talud beton, Kapal perikanan, Groin, dan Jalan Kompleks)
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Gedung TPI, Kantor TPI, Air bersih, Pos satpolair, Kantor ppp, Tempat perbaikan jaring)
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Areal parkir, Kios, Mushola, MCK, Gapura pintu masuk, Jalan masuk (tanah), Jalan kawasan (tanah), Pagar keliling, Mushola, MCK, Gapura pintu masuk, Jalan masuk (tanah), Jalan kawasan (tanah), Pagar keliling).

4) PPP Bajomulyo Kabupaten Pati

PPP Bajomulyo secara geografis terletak pada koordinat 111°8'30"BT dan 6°42'30" di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Fasilitas-

fasilitas yang dimiliki PPP Bajomulyo merupakan aset milik pemerintah daerah Kabupaten Pati antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Tanah, Dermaga/Turap, Kolam Pelabuhan, Break Water, Jalan komplek/ paving)
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Gedung lelang, Reservoir, Tower, Listrik PLN, Genset, SPBB, SPDN, Sound Sistem).
- Fasilitas Penunjang, meliputi:
 - ✓ Unit I (Gedung Pertemuan, MCK umum, Gudang basket, Pos Jaga, Eks kantor UPBI, Cold storage, Musholla, Ruang genset, Area parkir, Pagar keliling)
 - ✓ Unit II (Gedung lelang, Pasar bangsal, Pengepakan ikan, Listrik PLN, Gedung Basket, MCK, Areal parkir depan tempat lelang, Lampu penerangan dermaga, Gedung pos jaga dan doorlup, Drainase induk, Kios perdagangan umum, Kantor Airud, SSB Pos Jaga, Gapura dan Pagar, Pagar Bangunan Lelang, Kantor pengawasan).

5) PPP Tasik Agung Kabupaten Rembang

PPP Tasik Agung secara geografis terletak pada 111°000'-111°030' BT dan 6°30'-7°00' LS di Desa Tasik Agung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Tasik Agung antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Tanah, Dermaga bongkar, Dermaga muat, Kolam Pelabuhan, Break Water, Jalan komplek/ paving, Drainase, Talud/Turap)
- Fasilitas Fungsional (meliputi: TPI (lantai lelang), Tempat Pengepakan, Kantor ADM, Bengkel, SPDN 30.000 liter, Tangki air, dan instalasi, Pabrik Es (CBIP), Timbangan, Basket, Kereta Pengangkut Ikan, Tempat perbaikan Jaring, Tempat Jemuran ikan, Listrik, Kantor Syahbandar, Kantor SSB, Telepon, Sound System, Waserda, Pagar keliling)
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Tempat Parkir, MCK (6x3m), Kantor Perhubungan, Gedung Pelayanan Terpadu, Kantor Polairud, Kantor HNSI, Kantor KUD Mina, Mushola).

6) PPP Logending Kabupaten Kebumen

PPP Logending secara geografis terletak pada 111°000'-111°030' BT dan 6°30'-7°00' LS di Desa Pasir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Logending antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Tanah, Dermaga bongkar, Dermaga muat, Kolam Pelabuhan, Break Water, Jalan komplek/paving, Drainase, Talud/Turap)
- Fasilitas Fungsional (meliputi: TPI (lantai lelang), Tempat Pengepakan, Kantor ADM, Bengkel, SPDN, Tangki air, dan instalasi, Pabrik Es (CBIP), Timbangan, Basket, Kereta Pengangkut Ikan, Tempat perbaikan Jaring, Tempat Jemuran ikan, Listrik, Kantor Syahbandar, Kantor SSB, Telepon, Sound System, Waserda, Pagar keliling)
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Tempat Parkir, MCK, Kantor Perhubungan, Gedung Pelayanan Terpadu, Kantor Polairud, Kantor HNSI, Kantor KUD Mina, Mushola).

PPP Logending mempunyai 2 (dua) sentra pendaratan ikan yaitu :

- a. Sentra Pendaratan Ikan Pasir Kabupaten Kebumen
Sentra Pendaratan Ikan Pasir terletak di Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Adapun fasilitas yang di SPI Pasir antara lain: Rumah mesin, Tempat Parkir, Balai Pertemuan, dan Kantor SAR.
- b. Sentra Pendaratan Ikan Sentolokawat Kabupaten Cilacap
Sentra Pendaratan Ikan Sentolokawat terletak di Jl. Veteran No. 2 Kabupaten Cilacap. SPI Sentolokawat memiliki fasilitas berupa Tempat Pendaratan Ikan, SPDN (Solar Package Dealer Nelayan), dan Tempat Penjemuran Ikan

3. PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) KELAS B

Dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya, Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

UPT PPP Kelas B Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berjumlah 5 (lima) unit yang tersebar di pantai utara dan pantai selatan. Berikut ini adalah gambaran umum PPP yang ada di Provinsi Jawa Tengah:

1) PPP Asemdayong Kabupaten Pemalang

PPP Asemdayong secara geografis terletak pada koordinat 8°53'30"-7°20'11" LS dan 109°17'30"-109°40'30" BT di Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Asemdayong antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Alur, Dermaga bongkar muat, Saluran Drainase dan Turap/Revetment).
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Tanah, Gedung/Kantor TPI, Lantai TPI, Menara Air, SPDN, CBIP, Kios, Instalasi Listrik, Tempat Pengolahan, Tempat Penjemuran ikan).
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai luas, Kantor Satker Pelabuhan luas, Kantor Pos Pengawasan Lanal TNI luas, Pondok Boro Nelayan, Mushola, MCK (kondisi sedang), Kantor Kesehatan Pelabuhan, Warung makan dan kios, Pertokoan, dan Tempat parkir motor).

2) PPP Wonokerto Kabupaten Pekalongan

PPP Wonokerto secara geografis terletak pada koordinat 6°54'16" LS dan 109°42'BT di Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Wonokerto antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Alur, Dermaga bongkar muat, Talud/Turap, Lahan PPI, Jalan Lingkungan, Menara Suar, Kolam Pelabuhan dan Breakwater).
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Tanah, Gedung/Kantor TPI, Lantai TPI, SPDN, Instalasi Listrik, Instalasi Air Bersih, dan Menara Suar).
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Areal Parkir, Tempat Penjemuran Ikan, Tempat Penjemuran Alat Tangkap, Kamar Mandi/WC, Kios/Los Pertokoan, Pondok Boro, dan Mushola).

3) PPP Tawang Kabupaten Kendal

PPP Tawang secara geografis terletak pada koordinat 6°55'0,3"LS dan 110°02'49,7"BT di Desa Gempolsari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Tawang antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Break water, Alur Perairan, Dermaga (Tiang tambat labuh, penerangan, penangkis gelombang/talud)).
- Fasilitas Fungsional (meliputi : TPI/lantai lelang, Instalasi listrik, Air bersih (artesis dan PDAM), Kantor, SPDN, Pabrik es curah mini, (*Containerized Block Ice Plant*, Genset, Sound system, Menara suar, Rambu pengaman di muara))
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Areal parkir, Kantor Kamladu, Kios ikan, Kamar mandi/WC, Mushola, Pos Jaga).

4) PPP Karimunjawa Kabupaten Jepara

PPP Karimunjawa secara geografis terletak pada koordinat 5°51'50"LS dan 110°26'08" BT di Tanjung Benteng Desa/Pulau Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Karimunjawa antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Tanah, Dermaga/Turap, Kolam Pelabuhan, Break Water, Jalan komplek/ paving)
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Gedung Kantor, TPI, Gedung Pabrik Es, Bengkel, Reservoir Air Tawar, Genset, Radio SSB)
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Administrator, Mess Operator 3 kopel)/ Renovasi, Mess Operator).

5) PPP Larangan Kabupaten Tegal

PPP Larangan secara geografis terletak pada koordinat 6°51'41.530"LS dan 109°11'33.572" BT di Desa Munjung Agung Kec.Kramat, Kab. Tegal. Sebagai salah satu UPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 47 Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka melaksanakan teknis [Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 2024-2026](#) II-39

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang Operasional Pelabuhan Dan Kesyahbandaran Serta Tata Kelola Dan Pelayanan Usaha.

4. Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Kelas A

Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan (BLPKIL) Kelas A Semarang terletak di Jl. Empu Tantular 2 Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. BLPKIL Kelas A Semarang telah memiliki Sertifikat Akreditasi KAN dengan No : LP-1120-IDN yang ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2017 sebagai Laboratorium yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai Laboratorium Penguji dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005) sebagai persyaratan umum untuk kompetensi Laboratorium Penguji dan Laboratorium Kalibrasi.

Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan (BLPKIL) Kelas A Semarang membawahi 4 (empat) Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (LPKIL) dan 3 (tiga) Loka di Jawa Tengah, yaitu LPKIL Ambarawa di Kabupaten Semarang, LPKIL Randudongkal di Kabupaten Pemalang, LPKIL Singosari di Kabupaten Banyumas, LPKIL Muntilan di Kabupaten Magelang, Loka Ngrajek di Kabupaten Magelang, Loka Janti di Kabupaten Klaten, dan Loka Tambaksogra di Kabupaten Banyumas. Berikut gambaran 4 (empat) LPKIL dan 3 (tiga) Loka BLPKIL, meliputi:

a. Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (LPKIL) Ambarawa Kabupaten Semarang

LPKIL Ambarawa terletak di Desa Pojok Sari, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Ambarawa. Dibangun di atas lahan seluas 1,6 hektar dengan luas tanah 9.510 m², luas bangunan 965 m² dan luas kolam 6.000 m². Selain penyediaan benih ikan bermutu tinggi dengan tahan penyakit, LPKIL Ambarawa juga menyediakan pelayanan pengujian kesehatan ikan meliputi pemeriksaan klinis parasit, jamur, bakteri, dan virus, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan molekuler. Selain pelayanan pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan, LPKIL Ambarawa juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk:

- (1) Penelitian;
- (2) Magang;
- (3) Pelatihan; dan
- (4) Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyakit ikan dan pemeriksaan parameter lingkungan.

LPKIL Ambarawa merupakan bagian dari tempat uji multilokasi pengembangan Karper dan Lele dari Loka Ngrajek Kabupaten Magelang selain mengembangkan benih dan induk ikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Selain itu LPKIL Ambarawa juga sebagai tempat pengembangan Gerakan Pakan Mandiri (Gerpari) meliputi pengembangan alat dan formulasi pakan mandiri berbasis sumberdaya lokal.

b. Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (LPKIL) Randudongkal Kabupaten Pemalang.

LPKIL Randudongkal terletak di Desa Banjaranyar Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan memiliki luas tanah $\pm$ 1 Ha, luas bangunan 160 m², dan luas kolam 3.308 m² dengan jumlah kolam 17 petak. Pada tahun 2014 LPKIL Randudongkal bernama BBI Randudongkal yang merupakan wilayah kerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar Muntlan Magelang).

Penyediaan benih ikan bermutu tinggi dan tahan penyakit serta pelayanan kesehatan ikan menjadi orientasi dari LPKIL Randudongkal. Pelayanan pengujian kesehatan ikan meliputi pemeriksaan klinis parasit, jamur, bakteri, dan virus, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan molekuler. Selain pelayanan pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan, LPKIL Randudongkal juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk:

1. Penelitian;
2. Magang;
3. Pelatihan; dan
4. Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyakit ikan dan pemeriksaan parameter lingkungan.

LPKIL Randudongkal juga merupakan bagian dari tempat uji multilokasi pengembangan gurame dari Loka Tambaksogra Kabupaten Banyumas selain mengembangkan benih dan induk ikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.

c. Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (LPKIL) Singosari Kabupaten Banyumas.

LPKIL Singosari terletak di Desa Singosari Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Memiliki luas tanah 2 Ha dengan luas bangunan 1.311 m². Luas kolam 6.131 m² dengan jumlah kolam 48 petak.

LPKIL Singosari pada tahun 2014 tepatnya pada tanggal 26 Februari bernama Loka PBIAT Singosari yang merupakan wilayah kerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar Muntlan Magelang). Kemudian sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 47 Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berubah nama menjadi Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (LPKIL) Singosari. Dalam orientasi kerjanya LPKIL Singosari melaksanakan penyediaan benih bermutu tinggi dan tahan penyakit serta pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan. Pelayanan pengujian kesehatan ikan meliputi pemeriksaan klinis parasit, jamur, bakteri, dan virus, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan molekuler. Selain pelayanan pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan, LPKIL Singosari juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk:

1. Penelitian;
2. Magang;

3. Pelatihan; dan
4. Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyakit ikan dan pemeriksaan parameter lingkungan.

LPKIL Singosari juga merupakan bagian dari tempat uji multilokasi pengembangan gurame dari Loka Tambaksogra Kabupaten Banyumas selain mengembangkan benih dan induk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.

d. Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (LPKIL) Muntilan Kabupaten Magelang.

LPKIL Muntilan terletak di Jl.Kerkop No.1 Muntilan Kabupaten Magelang.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan produksi perikanan di Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur pada Tahun 1953 maka dibentuklah Balai Pendidikan Perikanan (BPP) Muntilan, Magelang. Dengan berlakunya Perda No. 1 Tahun 2002 maka BPP Muntilan berubah menjadi Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan (BPBI), yang selanjutnya melalui Peraturan Gubernur No. 38 tahun 2008 berubah menjadi Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar (BPBIAT) yang berkedudukan di Muntilan. Tahun 2017, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 75 Tahun 2016, BPBIAT berubah menjadi Balai Budidaya Ikan Air Tawar (BBAT). Kemudian pada tanggal 1 Maret 2018 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.47 tahun 2018 berubah menjadi Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (LPKIL) Muntilan.

Terletak di ketinggian 350 m di atas permukaan air laut yang mempunyai topografi landai sampai datar dengan suhu udara berkisar antara 25°C - 33°C. Mempunyai luas lahan 2,93 ha dengan sumber air berasal dari saluran irigasi Sungai Lamat. Debit air musim hujan 20-30 liter per detik, sedangkan pada musim kemarau 5-10 liter per detik.

Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (LPKIL) Muntilan dalam orientasi kerjanya melaksanakan penyediaan benih bermutu tinggi dan tahan penyakit serta pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan. Pelayanan pengujian kesehatan ikan meliputi pemeriksaan klinis parasit, jamur, bakteri, dan virus, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan molekuler. Selain pelayanan pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan, LPKIL Muntilan juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk:

1. Penelitian;
2. Magang;
3. Pelatihan; dan
4. Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyakit ikan dan pemeriksaan parameter lingkungan.

LPKIL Muntilan juga merupakan bagian dari tempat uji multilokasi pengembangan lele dan karper dari Loka Ngrajek Kabupaten Magelang selain mengembangkan benih dan induk ikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.

e. Loka Ngrajek Kabupaten Magelang

Berawal dari nama Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Ngrajek, yang berlokasi di Desa Ngrajek, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dengan ketinggian 340 meter di atas permukaan air laut. Dibangun pada tahun 1962 dan arealnya diperluas pada tahun 1964 menjadi 5,3 hektar. Sumber air berasal dari 2 (dua) mata air yaitu Mudal dan Combrang, dengan debit 54 liter/dt pada daerah pangkal saluran dan 5 liter/dt pada daerah ujung saluran. Orientasi awal yang tetap menjadi andalan Loka Ngrajek hingga saat ini adalah penyediaan benih ikan air tawar unggul dan tahan penyakit seperti: Tawes, Karper Merah Cangkringan dan Majalaya, Lele (Dumbo, Sangkuriang, dan Phytton), Nila (Hitam dan Merah), Grasscarp, Patin, dan Nilem dan calon induk ikan air serta penyediaan induk unggul ikan lele yang dapat menghasilkan benih unggul dan tahan penyakit. Selain melaksanakan pelayanan penyediaan benih dan induk unggul Loka Ngrajek juga menyediakan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan. Pelayanan pengujian kesehatan ikan meliputi pemeriksaan klinis parasit, jamur, bakteri, dan virus, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan molekuler. Selain pelayanan pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan, Loka Ngrajek juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk:

1. Penelitian;
2. Magang;
3. Pelatihan;
4. Pengembangan broodstock karper dan lele; dan
5. Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyakit ikan dan pemeriksaan parameter lingkungan.

f. Loka Janti Kabupaten Klaten

Loka Janti terletak di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Dibangun pada tahun 1979 di atas lahan seluas 2,89 hektar. Luas kolam 1,7 hektar (60%), bangunan dan ruang terbuka 0,98 hektar (30%) dan saluran 0,21 hektar (10%), dengan ketinggian tempat 203 meter di atas permukaan air laut. Sumber air berasal dari Umbul Nilo dan Umbul Wunut melalui saluran irigasi teknis yang mengalir sepanjang tahun dengan debit berkisar 25-40 l/dt dan kualitas yang cukup baik sehingga ideal bagi kegiatan perbenihan ikan.

Loka Janti memiliki tugas sebagai Pusat Pengembangan Induk Ikan Nila Regional (PPIINR) yang ditetapkan berdasarkan SK. Dirjen Perikanan Budidaya NO. 6378/DPB -1/-PB. 110. D1/12/03 sebagai perpanjangan tangan terhadap Pusat Pengembangan Ikan Nila Nasional (PPIIN) yang berpusat di Sukabumi. Dengan tugas utama memperbaiki mutu genetik untuk induk dan benih ikan nila.

Selain melaksanakan pelayanan penyediaan induk unggul ikan nila, Loka Janti juga menyediakan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan. Pelayanan pengujian kesehatan ikan meliputi pemeriksaan klinis parasit, jamur, bakteri, dan virus, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan molekuler. Selain pelayanan pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan, Loka Janti juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk:

1. Penelitian;
2. Magang;
3. Pelatihan;
4. Pengembangan broodstock Nila; dan
5. Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyakit ikan dan pemeriksaan parameter lingkungan.

g. Loka Tambaksogra Kabupaten Banyumas

Pada tahun 2014 tepatnya pada tanggal 26 Februari bernama Loka PBIAT Tambaksogra yang menjadi wilayah kerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar Muntiran Magelang). Kemudian pada tanggal 1 Maret 2018 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.47 tahun 2018 berubah menjadi Loka Tambaksogra dibawah Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A Semarang.

Loka Tambaksogra terletak di Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Memiliki luas tanah 20.000 m² dengan luas bangunan 783 m². Luas kolam 10.680 m² dengan jumlah kolam 26 petak. Menyediakan pelayanan calon induk unggul gurami dan benih ikan air tawar serta pengujian kesehatan ikan dan lingkungan. Pelayanan pengujian kesehatan ikan meliputi pemeriksaan klinis parasit, jamur, bakteri, dan virus, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan molekuler. Selain pelayanan pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan, Loka Tambaksogra juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk:

1. Penelitian;
2. Magang;
3. Pelatihan;
4. Pengembangan broodstock Gurame; dan
5. Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyakit ikan dan pemeriksaan parameter lingkungan.

5. Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A Karanganyar Tugu

Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A Karanganyar terletak di Desa Tugu Kecamatan Tugu, Kota Semarang. BIAP Karanganyar memiliki luas tambak 3,4 Ha dan luas bangunan 5.000 m². Fasilitas di BIAP Karanganyar antara lain: Luas lahan produktif berupa 4 petak tambak untuk budidaya; 2 petak kecil tambak untuk pendederan (penampungan air), dengan luas total lahan ± 4 Ha. Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut membawahi 3 (tiga) Loka Budidaya Air Payau, meliputi: Loka Budidaya Ikan Air Payau Maribaya Tegal, Loka Perbenihan Ikan Air Payau Sluke Rembang dan Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Laut Karimunjawa Jepara.

a. Loka BIAP Maribaya Tegal

Loka Budidaya Ikan Air Payau Maribaya berada di Desa Maribaya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Luas tanah LBIAP Maribaya adalah 40.000 m² dengan luas bangunan sebesar 350 m², serta luasan tambak mencapai 26.390 m².

b. Loka PIAP Sluke Rembang

Loka Perbenihan Ikan Air Payau Sluke berada di Desa Jatisari Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang. Luas tanah PIAP Sluke adalah 5.751 m² dengan luas bangunan sebesar 384 m², sarana yang dimiliki antara lain 11 bak *indoor* dan 16 bak *outdoor*.

Fasilitas di Loka BIAP Sluke antara lain:

- 1 (satu) gedung kantor
- 1 (satu) labotatorium pakan alami
- 1 (satu) bak induk udang kapasitas 10 ton
- 2 (dua) bak induk bandeng kapasitas 200 ton
- 1 (satu) bak induk indoor kapasitas 40 ton
- 1 (satu) bak kultur massal plankton outdoor
- 10 (sepuluh) bak beton outdoor kapasitas 8 ton
- 2 (dua) reservoir air laut 100 ton

c. Loka PBIAL Karimunjawa Jepara

Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Laut Karimunjawa Jepara terletak di Pulau Karimunjawa Kabupaten Jepara. Loka PBIAL Karimunjawa memiliki luas lahan sebesar 10.000 m² dan Luas Bangunan sebesar 150 m². Fasilitas di PBIAL Karimunjawa antara lain;

- Hatchery ukuran 5 x 2 m sebanyak 5 bak
- Bak ukuran 2,5 x 2,4 m sebanyak 12 unit
- Bak bulat volume 30 ton sebanyak 1 unit
- Bak bulat volume 15 ton sebanyak 2 unit
- Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 35 petak produksi
- Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 6 petak pembenihan
- Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 10 petak calon induk
- Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 9 petak konsumsi

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Indikator kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan selama 5 (lima) tahun terakhir mengacu pada sasaran strategis seperti yang ditentukan dalam Renstra sebelumnya. Terdapat 6 (enam) Sasaran Strategis meliputi:

1. Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan, meliputi: Produksi Perikanan Tangkap, Persentase Peningkatan Pelayanan Kepelabuhanan, Produksi Perikanan Budidaya, Persentase Peningkatan Produksi Induk Dan Benih, Persentase Peningkatan Produksi Hasil Olahan Ikan, Volume Ekspor Hasil Perikanan, Persentase Peningkatan Produksi Garam, Persentase Peningkatan Pemberdayaan Wanita dan Taruna Pesisir;
2. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan, meliputi: Jumlah Stakeholder yang Memahami Peraturan Tata Ruang Laut, Persentase Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Sektor Kelautan Dan Perikanan, Peningkatan Luas Kawasan Mangrove, Perlindungan Terumbu Karang, Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah, serta Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD

Selain berdasarkan Sasaran Strategis, kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan juga mengacu pada indikator kinerja tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Kelautan dan Perikanan.

Formulasi pengukuran kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan perbandingan antara realisasi terhadap target kuantitatif sasaran strategis, yaitu terhadap Indikator Kinerja pencapaian sasaran strategis tersebut. *Review* Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018 – 2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.	Meningkatnya laju pertumbuhan PDRB																			
	Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sector perikanan	Persen	-	-	-	1	1,20	1,30	1,40	1,5	4,42	4,88	1,30	1,40**	1,428	442	406	100	100	102***
B	Terwujudnya Kedaulatan Pangan Sektor Kelautan dan Perikanan																			
	Produksi Perikanan	Ton/Tahun	-	-	-	857.758,41	1.010.738,93	945.678,64	1.018.833,92	1.023.928,09	1.095.042,22	918.790,37	864.706,75	913.011,18*	931271,40	127,66	90,90	85,30	89,61	91,40** *
	Tingkat Konsumsi Ikan Jawa Tengah	Kg/Kap/Thn	-	-	-	30,50	31,27	32,05	34,	37,07	33,71	36.21	36,74	37,25**	37,99	110,52	106,97	114,63	97,56	99,51** *
	Produksi Garam	Ton/Tahun	-	-	-	322.611,64	338.742,22	355.679,33	373.463,29	392.136,46	793.544,66	375.074,56	197.623,92	135.792,09	138507,93	245,97	110,73	55,56	36,36	37,08** *
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Angka	-	-	-	105	106	106	107	108	103,91	107,18	112,21	104,86	106,95	98,96	101,11	104,87	97,09	99,03** *
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Angka	-	-	-	101	101	101	101	101	109,58	109,88	110,09	109,95	112,14	108,50	108,79	109	109,95	112,14** **
	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan																			
	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persen	-	-	-	65	70	75	75	72	65	70	75	75	76,5	100	100	100	100	102***
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah																			
	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	-	-	-	60	62	64	80	81	80,5	82,5	82,5	84,25	85,93	134,17	133,06	121,32	105,31	107,41* **
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah																			
	Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	-	-	-	68,5	69	69,5	80	81	80,32	81,3	81,34	83,44	85,10	117,26	117,56	117,04	104,30	106,38* **
C	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap																			
	Produksi perikanan tangkap	Ton/tahun	-	-	-	393.150	496.346,93	497.833	500.322,17	502.823,78	526.750,22	433.277,37	330.293,06	333.361,47	340.028,70	133,98	87,29	66,35	66,29	67,61**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018 – 2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
																				*
	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	Persen	-	-	-	-	-	-	0,10	0,10	-	-	-	0,04	0,04	-	-	-	40	40,8***
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya																			
	Produksi perikanan budidaya	Ton/Tahun	-	-	-	464.608,41	514.392	515.932	518.522,75	521.104,31	532.115	485.513	516.369,07	533.011,18	543.671,40	114,53	94,39	100,08	102,28	104,32* **
	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	-	-	-	-	-	-	0,20	0,20	-	-	-	0,20	0,20	-	-	-	100	102***
	Persentase Peningkatan Produksi Benih	Persen	-	-	-	5	10	15	2	25	37,1	38,13	15	2,5	2,55	742	381,3	100	125	127,5** *
	Persentase Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan	Persen	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	102	100	100	100	100	102***
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan																			
	Persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan	Persen	-	-	-	5	10	15	2	25	8,82	3,27	15	7,2	7,34	176,4	32,7	100	356	363,12* **
	Persentase Peningkatan Dokumen Kelayakan Mutu	Persen	-	-	-	10	20	15	2	50	281,64	0	15	2	2,04	2.816,4	0	100	100	102***
	Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																			
	Persentase Peningkatan Produksi Garam	Persen	-	-	-	5	5	5	0,10	25	4,06	5,54	-29,85	0,05	0,05	81,2	110,8	-597	50	51***
	persentase Kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	Persen	-	-	-	15	0	2,5	2,5	17,6	15	0	2,5	2,5	2,55	100	0	100	100	102***
	persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan taruna pesisir	Persen	-	-	-	10	10	1	5	30	33,33	0	39,8	5	5,1	333,3	0	398	100	102***
	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya di wilayah selatan Jawa Tengah	Persen	-	-	-	1	1	1	1	25	1	1	1	1	1,02	100	100	100	100	102***
	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya di wilayah barat Jawa Tengah	Persen	-	-	-	1	1	1	1	25	1	1	1	1	1,02	100	100	100	100	102***
	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya di wilayah timur Jawa Tengah	Persen	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	25	0,5	0,5	0,5	0,57	0,58	100	100	100	114	116,28* **

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018 – 2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha wilayah selatan Jawa Tengah	Persen	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,02	100	100	100	100	102***
	Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha wilayah barat Jawa Tengah	Persen	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,02	100	100	100	100	102***
	Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha wilayah timur Jawa Tengah	Persen	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,02	100	100	100	100	102***
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		-	-	-															
	persentase jumlah pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang ditindaklanjuti	Persen	-	-	-	1	2	3	-	-	1	2	3	-	-	100	100	100	-	-
	Persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di sektor perikanan	Persen	-	-	-	-	-	-	71	72	-	-	-	71	72,42	-	-	-	100	102***
	Persentase peran aktif kelompok masyarakat pengawas dalam pengawasan sdkp	Persen	-	-	-	-	-	-	40	45	-	-	-	40	40,8	-	-	-	100	102***
	persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai selatan Jawa Tengah	Persen	-	-	2	10	8	6	2	2	10	8	6	2	2,04	100	100	100	100	102***
	persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai barat Jawa Tengah	Persen	-	-	2	10	8	6	2	2	10	6	6	2	2,04	100	75	100	100	102***
	persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai timur Jawa Tengah	Persen	-	-	2	10	8	6	2	2	10,97	6	6	2	2,04	109,7	75	100	100	102***
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Persen	-	-	-	100	100	100	100	100	100	92,76	100	100	102	100	92,76	100	100	102***
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi	Persen	-	-	-	100	100	100	100	100	100	99,30	100	100	102	100	99,30	100	100	102***

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018 – 2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	kinerja OPD																			

Keterangan :

*) Angka Sementara

**) Perhitungan AKI menggunakan angka perhitungan SUSENAS BPS

***) Angka proyeksi

Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah pada Renstra 2018-2023 yaitu “meningkatnya laju pertumbuhan PDRB”, dengan indikator kinerja adalah laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan. Target kinerja pada tahun 2019 sebesar 1% terealisasi 4,42% dengan capaian kinerja 442%, target tahun 2020 sebesar 1,2% dengan realisasi 4,88% dan mendapatkan capaian kinerja 406%, target tahun 2021 sebesar 1,3% terealisasi 1,3% dengan capaian kinerja 100%, target 2022 sebesar 1,4% terealisasi 1,4% dan mendapatkan capaian kinerja 100%.

Dalam mencapai target kinerja pada tujuan Renstra 2018-2023, Dinas Kelautan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah menetapkan beberapa sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Kedaulatan Pangan Sektor Kelautan dan Perikanan
 - 2) Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan
 - 3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah
 - 4) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
-
- 1) Sasaran strategis pertama yaitu Terwujudnya Kedaulatan Pangan Sektor Kelautan dan Perikanan, di implementasikan melalui beberapa program dan kegiatan guna menunjang pencapaian beberapa indikator sasaran strategis dengan penjabaran sebagai berikut:

a) Produksi Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memiliki target produksi perikanan tahun 2019 sebesar 857.758,41 ton/tahun, terealisasi sebesar 1.095.042,22 ton/tahun dan mendapatkan capaian kinerja 127,66%. Target produksi perikanan tahun 2020 sebesar 1.010.738,93 ton/tahun, dengan realisasi sebesar 918.790,37 ton/tahun dan mendapatkan capaian kinerja 90,90%. Target produksi perikanan tahun 2021 sebesar 945.678,64 ton/tahun, dengan realisasi sebesar 864.706,75 ton/tahun dan mendapatkan capaian kinerja 85,30%. Target produksi perikanan tahun 2022 sebesar 1.023.928,09 ton/tahun, terealisasi sebesar 866,372.65* ton/tahun dengan capaian kinerja 85,03% dan target produksi perikanan tahun 2023 sebesar 1.023.928,09 ton/tahun.

Capaian produksi perikanan 2019-2023 menghasilkan rata-rata sebesar 97,22%, upaya pencapaian tersebut dilakukan melalui beberapa program penunjang sebagai berikut:

i) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Target indikator kinerja pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap meliputi persentase pertumbuhan produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan tangkap.

Indikator persentase pertumbuhan produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 memiliki target 0,10% dan terealisasi 0,04% dengan capaian kinerja 40%, pada tahun 2023 memiliki target 0,10%.

Indikator produksi perikanan tangkap memiliki target pada tahun 2019 sebesar 393.150 ton/tahun terealisasi 526.750,22 ton/tahun dengan capaian kinerja 133,98%, pada tahun 2020 sebesar 496.346,93 ton/tahun terealisasi 433.277,37 ton/tahun mendapatkan capaian kinerja 87,29%, pada tahun 2021 memiliki target 2021 sebesar 497.833 ton/tahun terealisasi 330.293,06 ton/tahun dengan capaian kinerja 66,35%, pada tahun 2022 memiliki target sebesar 500.322,17 ton/tahun terealisasi 333.361,47 ton/tahun mendapatkan capaian kinerja 66,29% dan target pada tahun 2023 sebesar 502.823,78 ton/tahun.

Capaian produksi perikanan tangkap sepanjang tahun 2019-2023 menghasilkan rata-rata sebesar 88,48%, upaya guna pencapaian melalui kegiatan pengembangan sarana Pelabuhan perikanan, sosialisasi dan peningkatan kapasitas nelayan serta pemberian bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan kepada nelayan. Adapun tidak tercapainya target produksi perikanan tangkap disebabkan oleh penurunan sumber daya ikan di daerah laut Jawa dikarenakan *over exploitation*, serta menurunnya aktivitas penangkapan ikan akibat dari kenaikan BBM pada tahun 2022 dan juga kondisi cuaca yang buruk yaitu musim gelombang yang terjadi cukup lama (musim barat) disertai dengan angin kencang yang menyebabkan nelayan tidak berani melaut karena berisiko tinggi.

ii) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Target indikator kinerja pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya meliputi persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya, produksi perikanan budidaya, persentase peningkatan produksi benih, persentase penanganan kasus hama penyakit ikan.

Indikator persentase pertumbuhan perikanan budidaya pada tahun 2022 memiliki target sebesar 0,20% dengan realisasi 0,20% dan mendapatkan capaian kinerja 100% serta target penanaman pada tahun 2023 sebesar 0,10%.

Indikator produksi perikanan budidaya pada tahun 2019 memiliki target sebesar 464.608,41 ton/tahun terealisasi 532.115 ton/tahun dengan capaian kinerja 114,53%. Pada tahun 2020 memiliki target sebesar 514.392 ton/tahun, terealisasi 485.513 ton/tahun mendapatkan capaian kinerja 94,39%. Pada tahun 2021 memiliki target sebesar 515.932 ton/tahun terealisasi 516.369,07 ton/tahun

dengan capaian kinerja 100,08%. Pada tahun 2022 memiliki target sebesar 518.522,75 ton/tahun dengan realisasi 533.011,18 dan mendapatkan capaian kinerja 102,28% serta target penanaman pada tahun 2023 sebesar 521.104,31 ton/tahun.

Indikator persentase peningkatan produksi benih pada tahun 2019 memiliki target sebesar 5% terealisasi 37,1% dengan capaian kinerja 742%. Pada tahun 2020 memiliki target sebesar 10%, terealisasi 38,13% mendapatkan capaian kinerja 381,3%. Pada tahun 2021 memiliki target sebesar 15% terealisasi 15% dengan capaian kinerja 100%. Pada tahun 2022 memiliki target sebesar 2% dengan realisasi 2,5% dan mendapatkan capaian kinerja 125% serta target penanaman pada tahun 2023 sebesar 25%.

Indikator Persentase Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan pada tahun 2019 memiliki target sebesar 100% terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%. Pada tahun 2020 memiliki target sebesar 100%, terealisasi 100% mendapatkan capaian kinerja 100%. Pada tahun 2021 memiliki target sebesar 100% terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%. Pada tahun 2022 memiliki target sebesar 100% dengan realisasi 100% dan mendapatkan capaian kinerja 100% serta target penanaman pada tahun 2023 sebesar 100%.

Capaian kinerja didukung oleh upaya yang dilakukan antara lain melalui penggunaan induk dan benih unggul dalam proses produksi pembudidayaan ikan, pengendalian hama penyakit ikan, pelaksanaan sertifikasi penerapan Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) serta berkembangnya teknologi perikanan budidaya antara lain teknologi Bioflock.

b) Tingkat Konsumsi Ikan Jawa Tengah

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menetapkan target dalam Renstra 2019-2023 pada indikator tingkat konsumsi ikan Jawa Tengah tahun 2019 memiliki target sebesar 30,50, terealisasi sebesar 33,71 dengan capaian kinerja 110,52%. Target tingkat konsumsi ikan Jawa Tengah tahun 2020 sebesar 33,85, dengan realisasi 36,21 dan mendapatkan capaian kinerja 106,97%. Target tingkat konsumsi ikan Jawa Tengah tahun 2021 sebesar 32,05, terealisasi sebesar 36,74 dengan capaian kinerja 110,73%. Target tingkat konsumsi ikan Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 38,18, dengan realisasi sebesar 37,25 dan mendapatkan capaian kinerja 85,03%. Target tingkat konsumsi ikan Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 37,07.

Capaian tingkat konsumsi ikan Jawa Tengah tahun 2019-2023 menghasilkan rata-rata sebesar 103.31%, upaya pencapaian tersebut dilakukan melalui program sebagai berikut:

i) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Target kinerja pada Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan meliputi persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan dan persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu.

Indikator persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan pada tahun 2019 memiliki target sebesar 5% terealisasi 8,82% dengan capaian kinerja 176,4%, pada tahun 2020 memiliki target sebesar 10% dengan realisasi 3,27% dan mendapatkan capaian kinerja 32,7%, pada tahun 2021 memiliki target sebesar 15%, terealisasi 15% dengan capaian kinerja 100%, pada tahun 2022 memiliki target sebesar 2% dengan realisasi 7,2% dan mendapatkan capaian kinerja 356% serta target pada tahun 2023 sebesar 25%.

Indikator persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu pada tahun 2019 memiliki target sebesar 10% terealisasi 281,64% dengan capaian kinerja 2.816,4%, pada tahun 2020 memiliki target sebesar 20% dengan realisasi 0% dan mendapatkan capaian kinerja 0%, pada tahun 2021 memiliki target sebesar 15%, terealisasi 15% dengan capaian kinerja 100%, pada tahun 2022 memiliki target sebesar 2% dengan realisasi 2% dan mendapatkan capaian kinerja 100% serta target pada tahun 2023 sebesar 50%.

Capaian kinerja didukung dengan upaya pencapaian melalui peningkatan kualitas, kapasitas dan produktifitas UMKM dan Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar di Jawa Tengah, peningkatan jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan, pembinaan pelaku usaha perikanan dan peningkatan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pelaksanaan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat dalam rangka mengatasi stunting, perluasan akses pasar dalam dan luar negeri, pengembangan sistem pemasaran berbasis digital dan melibatkan ecommerce, peningkatan promosi produk kelautan dan perikanan, fasilitasi kemudahan pelaku usaha untuk berinvestasi, mengakses pembiayaan, teknologi dan pasar serta didukung regulasi yang kondusif, serta pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan penerapan hasil perikanan..

c) Produksi Garam

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi memiliki target dalam Renstra 2019-2023 pada indikator produksi garam tahun 2019 memiliki

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 II-54

target sebesar 322.611,64 ton/tahun, terealisasi sebesar 793.544,66 ton/tahun dengan capaian kinerja 245,97%. Target produksi garam tahun 2020 sebesar 338.742,22 ton/tahun, dengan realisasi sebesar 375.074,56 ton/tahun dan mendapatkan capaian kinerja 110,73%. Target produksi garam tahun 2021 sebesar 355.679,33 ton/tahun, terealisasi sebesar 197.623,92 ton/tahun dengan capaian kinerja 55,56%. Target produksi garam tahun 2022 sebesar 373.463,29 ton/tahun, dengan realisasi sebesar 135.792,09 ton/tahun dan mendapatkan capaian kinerja 36,36%. Target produksi garam pada tahun 2023 sebesar 392.136,46 ton/tahun.

Capaian produksi garam sepanjang tahun 2019-2023 menghasilkan rata-rata sebesar 112.155%, upaya pencapaian tersebut dilakukan melalui program sebagai berikut:

i) Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Target kinerja pada Program Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi persentase peningkatan produksi garam dengan target pada tahun 2019 sebesar 5% terealisasi 4,06% dengan capaian kinerja 81,2%, target pada tahun 2020 sebesar 5% dengan realisasi 5,54% dan mendapatkan capaian kinerja 110,8%, target pada tahun 2021 sebesar 5% terealisasi -29,85% dengan capaian kinerja -597%, target pada tahun 2022 sebesar 0,10% dengan realisasi 0,05% dan mendapatkan capaian kinerja 50% serta target pada tahun 2023 sebesar 25%.

Guna mendukung pencapaian kinerja dilakukan upaya antara lain melalui sosialisasi dan pengembangan kapasitas kugar, serta pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi garam rakyat. Capaian peningkatan produksi garam sangat dipengaruhi pada faktor cuaca dikarenakan adanya musim kemarau basah, dimana musim kemarau disertai hujan sehingga menyebabkan mayoritas petambak garam hanya memproduksi sedikit garam dan bahkan tidak berproduksi, selain itu terjadinya pandemi Covid-19 dengan aturan pembatasan aktifitas petambak juga menyebabkan produksi garam merosot tajam.

d) Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi memiliki target dalam Renstra 2019-2023 pada indikator Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2019 sebesar 105, terealisasi sebesar 103,91 dengan capaian kinerja 98,96%. Target Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2020 sebesar 106, dengan realisasi sebesar 107,18 dan mendapatkan capaian kinerja 101,11%. Target Nilai Tukar Nelayan tahun 2021 sebesar 106, terealisasi sebesar 112,21 dengan capaian kinerja 104,87%. Target Nilai Tukar Nelayan

tahun 2022 sebesar 107, dengan realisasi sebesar 104,86 dan mendapatkan capaian kinerja 97,09% serta target Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2023 sebesar 108. Capaian Nilai Tukar Nelayan sepanjang tahun 2019-2023 menghasilkan rata-rata sebesar 100,50%.

e) Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi memiliki target dalam Renstra 2019-2023 pada indikator Nilai Tukar Pembudidaya Ikan pada tahun 2019 sebesar 101, terealisasi sebesar 109,58 dengan capaian kinerja 108,50%. Target Nilai Tukar Pembudidaya Ikan pada tahun 2020 sebesar 101, dengan realisasi sebesar 109,88 dan mendapatkan capaian kinerja 108,79%. Target Nilai Tukar Pembudidaya Ikan tahun 2021 sebesar 101, terealisasi sebesar 110,09 dengan capaian kinerja 109%. Target Nilai Tukar Pembudidaya Ikan tahun 2022 sebesar 101, dengan realisasi sebesar 109,95 dan mendapatkan capaian kinerja 109,95% serta target Nilai Tukar Pembudidaya Ikan pada tahun 2023 sebesar 101. Capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan sepanjang tahun 2019-2023 menghasilkan rata-rata sebesar 109,06%.

2) Sasaran strategis kedua yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan” diimplementasikan melalui beberapa program dan kegiatan guna menunjang pencapaian beberapa indikator sasaran strategis dengan penjabaran sebagai berikut:

a) Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memiliki target persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun 2019 sebesar 65%, terealisasi sebesar 65% dengan capaian kinerja 100%, target pada tahun 2020 sebesar 70%, dengan realisasi sebesar 70% dan mendapatkan capaian kinerja 100%, target pada tahun 2021 sebesar 75%, terealisasi sebesar 75% dengan capaian kinerja 100%, target pada tahun 2022 sebesar 75%, dengan realisasi sebesar 75% dan mendapatkan capaian kinerja 100% serta target pada tahun 2023 sebesar 72%.

Capaian persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tahun 2019-2023 menghasilkan rata-rata sebesar 100%, upaya pencapaian tersebut dilakukan melalui program sebagai berikut:

i) Program Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut

Target kinerja pada Program Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut meliputi persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif, persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan taruna pesisir, persentase peningkatan luas kawasan mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya dan persentase peningkatan verifikasi perizinan unit usaha.

Indikator persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif memiliki target pada tahun 2019 sebesar 15% terealisasi 15% dengan capaian kinerja 100%. Target pada tahun 2021 sebesar 2,5% dengan realisasi 2,5% dan mendapatkan capaian 100%. Target pada tahun 2022 sebesar 2,5%, terealisasi 2,5% dengan capaian kinerja 100%, dan target pada tahun 2023 sebesar 17,6%. Upaya guna pencapaian target kinerja meliputi pelaksanaan koordinasi, fgd serta updating RZWP3K.

Indikator persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan taruna pesisir memiliki target pada tahun 2019 sebesar 10% terealisasi 33,33% dengan capaian kinerja 333,3%. Target pada tahun 2021 sebesar 1% dengan realisasi 39,8% dan mendapatkan capaian 398%. Target pada tahun 2022 sebesar 5%, terealisasi 5% dengan capaian kinerja 100%, dan target pada tahun 2023 sebesar 30%. Upaya pencapaian target kinerja meliputi pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Indikator persentase peningkatan luas kawasan mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya pada tahun 2019-2022 Cabang Dinas Kelautan (CDK) Wilayah Selatan dan CDK Wilayah Barat memiliki target sebesar 1%, terealisasi 1% dengan capaian kinerja 100%. Sedangkan pada CDK Wilayah Timur pada tahun 2019-2022 memiliki target sebesar 0,5%, pada tahun 2019-2021 terealisasi 0,5% dengan capaian kinerja 100%, pada tahun 2022 terealisasi 0,57% mendapatkan capaian kinerja 114%. Pada tahun 2023 seluruh CDK memiliki target sebesar 25%. Upaya guna pencapaian target kinerja meliputi pelaksanaan sosialisasi ekosistem mangrove, penanaman mangrove, penanaman cemara laut dan mangrove for education.

Indikator persentase peningkatan verifikasi perizinan unit usaha seluruh CDK pada tahun 2019-2023 memiliki target sebesar 1%, dengan realisasi pada tahun 2019-2022 1% dan mendapatkan capaian kinerja 100%. Upaya guna pencapaian target kinerja meliputi pelaksanaan sosialisasi perijinan, pendampingan pengurusan ijin dan penerbitan rekomendasi teknis.

- ii) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan persentase jumlah pelanggaran pengelolaan

Target kinerja pada Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan meliputi persentase jumlah pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang ditindaklanjuti, persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di sektor perikanan, persentase peran aktif kelompok masyarakat pengawas dalam pengawasan sdkp.

Indikator persentase jumlah pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang ditindaklanjuti pada tahun 2019 memiliki target 1% terealisasi 1% dengan capaian kinerja 100%, target pada tahun 2020 sebesar 2% dengan realisasi 2% dan mendapatkan capaian kinerja 100%, target pada tahun 2021 sebesar 3% terealisasi 3% dengan capaian kinerja 100%. Pada tahun 2022 indikator ini berubah menjadi persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di sektor perikanan dan persentase peran aktif kelompok masyarakat pengawas dalam pengawasan sdkp.

Indikator persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di sektor perikanan memiliki target pada tahun 2022 sebesar 71% dengan realisasi 71% dan mendapatkan capaian kinerja 100% serta target pada tahun 2023 sebesar 72%. Indikator persentase peran aktif kelompok masyarakat pengawas dalam pengawasan sdkp memiliki target pada tahun 2022 sebesar 40% dengan realisasi 40% dan mendapatkan capaian kinerja 100% serta target pada tahun 2023 sebesar 45%. Capaian indikator program tersebut sepanjang tahun 2019-2023 menghasilkan rata-rata sebesar 100% melalui dukungan pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pemulihan sumberdaya perikanan dan kelautan.

- 3) Sasaran ketiga yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah, diimplementasikan melalui pencapaian indikator Nilai Kepuasan Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memiliki target Nilai Kepuasan Masyarakat tahun 2019 sebesar 60, terealisasi sebesar 80,5 mendapatkan capaian kinerja 134,17%. Target Nilai Kepuasan Masyarakat tahun 2020 sebesar 62, terealisasi sebesar 82,5 dengan capaian kinerja 133,06%. Target Nilai Kepuasan Masyarakat tahun 2021 sebesar 64, terealisasi sebesar 82,5 dengan capaian kinerja 121,32%. Target Nilai

Kepuasan Masyarakat tahun 2022 sebesar 80, terealisasi sebesar 84,25 dan mendapatkan capaian kinerja 105,31% serta target Nilai Kepuasan Masyarakat tahun 2023 sebesar 81.

- 4) Sasaran keempat yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, diimplementasikan melalui pencapaian indikator Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut :

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memiliki target Nilai SAKIP tahun 2019 sebesar 68,5, terealisasi sebesar 80,32 mendapatkan capaian kinerja 117,26%. Target Nilai SAKIP tahun 2020 sebesar 69, terealisasi sebesar 81,3 dengan capaian kinerja 117,56 %. Target Nilai SAKIP tahun 2021 sebesar 69,5, terealisasi sebesar 81,34 dengan capaian kinerja 117,04%. Target Nilai SAKIP tahun 2022 sebesar 80, terealisasi sebesar 83,44 dan mendapatkan capaian kinerja 104,30% serta target Nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 81.

Capaian Nilai Kepuasan Masyarakat dan Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2019-2023, upaya pencapaian tersebut dilakukan melalui program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Target kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah meliputi Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah serta Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD.

Indikator Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah pada tahun 2019 sampai 2023 memiliki target 100% dan terealisasi 100% pada tahun 2019 dengan capaian 100%, terealisasi 92,76 pada tahun 2020 dengan capaian 92,76% dan terealisasi 100% pada tahun 2021 dan 2022 dengan capaian 100%.

Indikator Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD pada tahun 2019 sampai 2023 memiliki target 100% dan terealisasi 100% pada tahun 2019 dengan capaian 100%, terealisasi 99,30 pada tahun 2020 dengan capaian 99,30% dan terealisasi 100% pada tahun 2021 dan 2022 dengan capaian 100%.

Selanjutnya anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023 sebagaimana pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Uraian **)	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp.000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Pendapatan						10.500.000	9.900.000	10.683.550	12.768.000	13,950,000	12.692.891	14.579.538	14.444.412	16.717.690		120.88	147.27	135.20	130.93		7.74	7.42
Belanja	89.491.057	102.851.000	109.264.500	116.228.000	121.989.000	122.875.631	79.581.156	142.242.398	120.179.610	121.630.263	117.172.674	74.597.943	118.176.526	108.286.797		95.36	93.74	83.08	90.10		7.30	3.95
Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dari uraian pada sub bab sebelumnya maka dapat dilakukan identifikasi terhadap tantangan dan peluang dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Jawa Tengah guna menghasilkan kebijakan dan strategi yang tepat, dengan uraian sebagai berikut :

2.4.1. Tantangan

Tantangan (*threat*) adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas dalam kurun waktu tiga tahun mendatang. Beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah:

- (1) Terjadinya penurunan stok sumber daya ikan, khususnya di WPP 723 (Laut Jawa) dikarenakan tingginya tekanan terhadap sumberdaya alam kelautan dan perikanan, terutama pencemaran yang bermuara ke laut dan fenomena *overfishing* serta degradasi lingkungan (mangrove, terumbu karang) dan penurunan mutu perairan;
- (2) Masih adanya praktik *Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing* terutama tingginya produksi perikanan yang tidak tercatat/terlaporkan;
- (3) Semakin ketatnya persaingan pasar perikanan dan kelautan serta tuntutan penyediaan produk berdaya saing dan berkelanjutan bertolak belakang dengan masih rendahnya daya saing dan tingkat pendapatan pelaku usaha (UKM) pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta kurangnya nilai tambah produk pengolahan perikanan di Jawa Tengah;
- (4) Peningkatan kualitas mutu produk perikanan pangsa pasar domestik yg selama ini masih rendah berbeda jauh dg mutu ekspor;
- (5) Ketelusuran (*tracebility*) penanganan ikan di atas kapal dan sertifikat CPIB (Cara Penanganan Ikan yang Baik) diatas KAPAL IKAN;
- (6) Keterbatasan bahan baku dan belum meratanya distribusi ikan untuk konsumsi dan pemenuhan bahan baku industri;
- (7) Isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14000), isu tenaga kerja, isu *responsible fisheries* dan isu keamanan pangan dan penerapan bea masuk produk perikanan di beberapa negara mengurangi daya saing produk perikanan Indonesia;
- (8) Minimnya akses permodalan bagi usaha kelautan dan perikanan;
- (9) Tidak seimbangny luas dan jangkauan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan sarana prasarana serta personel pengawas perikanan;
- (10) Tingginya harga pakan ikan dan semakin banyaknya dokumen kapal perikanan dikarenakan adanya perubahan regulasi;
- (11) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur sektor kelautan dan perikanan, seperti infrastuktur pelabuhan, pabrik pakan, gudang garam;

- (12) Masih adanya kebijakan lintas instansi/lembaga yang belum sinkron bahkan kontra produktif;
- (13) Kemiskinan berkepanjangan secara struktural dan kultural terutama di desa nelayan;
- (14) Peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan yang belum merata;
- (15) Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal dalam mendukung pelayanan, antara lain : pelayanan rekomendasi Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), Rekomendasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Pengolahan, rekomendasi ijin lokasi, rekomendasi ijin pengelolaan perairan pesisir, rekomendasi ijin reklamasi, rekomendasi ijin budidaya ikan, rekomendasi ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan.

2.4.2. Peluang

Peluang (*opportunity*) adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas dalam kurun waktu tiga tahun mendatang. Peluang-peluang (*opportunity*) tersebut antara lain :

- (1) Dukungan dan komitmen Pemerintah dalam kebijakan sektor kelautan dan perikanan semakin besar;
- (2) Adanya payung hukum perlindungan pelaku usaha kelautan dan Perikanan serta payung hukum penyelenggaraan usaha kelautan dan perikanan di Jawa Tengah;
- (3) Adanya lembaga pemerintahan yang menangani sampai tingkat Kabupaten/Kota yang didukung *stakeholders*, termasuk di dalamnya kekayaan/Aset Barang Daerah dalam lingkup Kelautan dan Perikanan;
- (4) Efektifitas dan efisiensi pemakaian anggaran APBD.
- (5) Dukungan permodalan oleh pemerintah, swasta dan perbankan dengan bentuk kredit murah dan pola kemitraan;
- (6) Kelembagaan nelayan, pembudidaya, petambak garam, pengolah dan pemasar semakin berkembang;
- (7) Kualitas sumberdaya manusia perikanan dan kelautan yang berbasis Gender semakin meningkat dan bertambah;
- (8) Pemanfaatan dan pengawasan sumberdaya alam yang optimal dan bertanggungjawab;
- (9) Peningkatan mutu dan keamanan produk hasil perikanan;
- (10) Peningkatan kapasitas melalui inovasi teknologi, modal, pasar, penentuan kawasan dan sinkronisasi kebijakan;
- (11) Pelayanan berbasis teknologi informasi. akan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, dan murah.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan dan ketahanan pangan. Penentuan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menjadi awal dalam merumuskan isu-isu strategis. Isu-isu strategis tersebut akan sangat membantu dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan 3 (tiga) tahun ke depan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, sasaran dan pendanaan indikatif pun akan lebih *reliable* berdasar pada identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Proses identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, didasarkan pula pada evaluasi terhadap capaian/kondisi saat ini, standar yang digunakan, faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi, sehingga akan muncul permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun ke belakang.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah antara lain :

1. Belum optimalnya pengelolaan produksi perikanan tangkap,
2. Belum optimalnya pelayanan pelabuhan perikanan pantai kewenangan provinsi
3. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya, Masih tingginya Kasus Hama Penyakit Ikan,
4. Rendahnya produktivitas garam rakyat,
5. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan taruna pesisir,
6. Kesenjangan Gender pada SDM usaha perikanan,
7. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan,
8. Relatif rendahnya pengurusan dokumen usaha kelautan dan perikanan,

9. Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan kelautan dan perikanan
10. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas hasil olahan ikan
11. Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (abrasi, mangrove dan terumbu karang)

Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan	Belum optimalnya pengelolaan produksi perikanan tangkap	Masih terbatasnya sarana prasarana dan inovasi teknologi penangkapan ikan yang dimiliki nelayan/kelompok nelayan
			Masih rendahnya kesadaran pengurusan izin perikanan tangkap
			Kondisi overfishing di WPP 712,573 yang menjadi kewenangan provinsi
			Relatif tingginya unreported produksi hasil tangkapan / Hasil tangkapan yang tidak dilaporkan atau tercatat
			Masih belum optimalnya pengamanan daerah asuhan ikan (jalur 1a atau 0-2 mil) dari alat tangkap aktif bermesin
		Belum optimalnya pelayanan pelabuhan perikanan pantai kewenangan provinsi	Masih terbatasnya sarana prasarana pelabuhan perikanan pantai
			Belum optimalnya penerapan SOP Kepelabuhan perikanan di PPP
			Kurangnya jumlah SDM dan masih rendahnya kompetensi SDM yang ada di PPP
		Masih rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan	Belum optimalnya jaminan perlindungan nelayan (perlindungan jiwa dan usaha)
			Budaya bagi hasil yang tidak proporsional
			Kurangnya akses permodalan sehingga nelayan masih tergantung dengan pengijon
			Kurangnya keterampilan dan kompetensi Nelayan
		Belum optimalnya produksi perikanan budidaya	Terbatasnya ketersediaan kualitas dan kuantitas benih dan induk unggul
			Harga pakan cenderung naik tidak diiringi dengan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			kenaikan harga jual ikan
			Terbatasnya infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan komoditas perikanan
			Lambatnya perkembangan sentra sentra produksi perikanan budidaya/kawasan/kampung perikanan budidaya
			Belum optimalnya klasterisasi komoditas perikanan budidaya
			Lambatnya adopsi dan inovasi teknologi adaptif perikanan budidaya
			Menurunnya daya dukung lahan dan perikanan budidaya
			Berkurangnya luasan lahan perikanan budidaya akibat perubahan RTRW dan RZWP3K
			Terbatasnya pengetahuan terkait dengan Cara Budidaya Ikan yang Baik, Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik.
			Terjadinya perubahan iklim yang ekstrim
			Terbatasnya akses permodalan usaha perikanan budidaya
		Masih tingginya Kasus Hama Penyakit Ikan	Menurunnya kualitas perairan akibat pencemaran (industry, rumah tangga, akibat perubahan zona peruntukan budidaya)
			Perubahan cuaca yang ekstrim
			Penggunaan benih yang tidak setandar/SPF/SPR
			Belum adanya pengawasan terkait dengan lalu lintas peredaran benih melalui darat
			Minimnya penggunaan induk dihasilkan dari unit pemuliaan ikan
			Rendahnya pengetahuan terkait dengan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			hama penyakit ikan bagi pembudidaya ikan
			Penggunaan Obat Ikan yang belum terdaftar KKP
	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas hasil olahan ikan	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas hasil olahan ikan	masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan
			Masih lemahnya kompetensi pengolah hasil perikanan
			Masih terbatasnya sarana prasaran dan inovasi teknologi pengolah hasil perikanan
			kurang optimalnya fungsi jejaring pemasaran antar pelaku usaha
			Kurang optimalnya peta logistik hasil perikanan
			Kurangnya akurasi data unit pengolah ikan
			Masih rendahnya kesadaran UPI dalam menerapkan sistem jaminan mutu
			Masih rendahnya pemahaman UPI dalam memenuhi persyaratan system jaminan mutu
			Rendahnya minat UPI dalam menerapkan SNI bagi produk perikanan
			Masih rendahnya pemantauan distribusi olahan hasil perikanan
			Masih banyaknya produk olahan hasil perikanan yang mengandung bahan kimia berbahaya
			Belum adanya penentuan standar baku dalam penentuan kelompok pelaku usaha perikanan
	Relatif rendahnya pengurusan dokumen usaha kelautan dan perikanan	Relatif rendahnya pengurusan dokumen usaha kelautan dan perikanan	Masih rendahnya kesadaran pemenuhan perizinan berusaha perikanan tangkap
			Masih rendahnya kesadaran pemenuhan perizinan berusaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
			Masih rendahnya kesadaran pemenuhan perizinan pemanfaatan ruang laut
			Masih rendahnya kesadaran pemenuhan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan kelautan dan perikanan		perizinan berusaha perikanan budidaya
		Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan kelautan dan perikanan	Masih kecilnya angka penanganan kasus pelanggaran peraturan perundangan kelautan dan perikanan
			Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan perikanan
			Masih tingginya kasus konflik antar nelayan
			Masih rendahnya cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP
	Rendahnya produktivitas garam rakyat		Masih kurang memadainya sarana prasarana penunjang produksi pergaraman
			Masih rendahnya Kompetensi SDM petambak garam terkait produksi, pemeliharaan sarana prasarana, penggunaan teknologi terkini, serta diversifikasi produk garam belum optimal
			Masih sedikitnya petambak garam yang menerapkan teknologi produksi dalam meningkatkan kualitas garam
			Sulitnya pengambilan kebijakan dikarenakan minimnya perekaman data potensi garam rakyat
	Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan taruna pesisir		Masih rendahnya kualitas SDM masyarakat pesisir dalam pengembangan potensi pesisir
			Masih rendahnya peran perempuan pesisir dalam menopang kesejahteraan masyarakat pesisir
			Masih terbatasnya kemampuan permodalan dalam memenuhi kebutuhan pengembangan usaha
	Kesenjangan Gender pada SDM usaha perikanan		Budaya patriarki yang lebih mendominasi peran laki-laki sebagai pencari nafkah sehingga peran di luar rumah diprioritaskan untuk laki-laki

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			sehingga akses perempuan menjadi rendah untuk ikut berpartisipasi
		Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (abrasi, mangrove dan terumbu karang).	Tidak seimbangnya upaya rehabilitasi dan laju kerusakan kawasan pesisir dan laut
			Belum tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan terkait RZWP3K yang telah diintegrasikan dengan RTRW
			Belum terkelolanya kawasan konservasi perairan secara efektif, terstruktur dan sistematis
			Masih terbatasnya data potensi kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil di Jawa Tengah yang faktual dan terkini
			Masih terbatasnya pengetahuan pelaku usaha mengenai mekanisme perijinan pemanfaatan ruang laut
			Masih adanya ketidaksesuaian rencana pemanfaatan ruang laut dengan alokasi ruang laut, adanya penyimpangan lokasi usaha dari izin pkprl serta minimnya informasi dampak sosial dan lingkungan

3.2 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

a. Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 – 2026 perencanaan merupakan pembangunan transisi antara RPJMD tahun 2018-2023 yang akan berakhir di tahun 2023 dan RPJMD pasca pilkada serentak di tahun 2024, sehingga terjadi kekosongan Kepala Daerah sehingga dokumen perencanaan tidak berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah. Tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah yang ingin diwujudkan dalam tiga tahun kedepan adalah “Jawa Tengah yang semakin Sejahtera dan Lestari” dengan Sasaran Daerah yaitu :

1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
3. Meningkatnya ketahanan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan dokumen RPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mempunyai keterkaitan mendukung sasaran “meningkatnya perekonomian Tangguh dan berdaya saing” dengan tujuan Renstra PD Meningkatkan pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.

b. Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Rencana strategis kementerian Kelautan dan Perikanan disahkan melalui peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Visi

Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka misi yang diemban adalah:

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. Peningkatan Kualitas RB di KKP

Tujuan

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Optimalnya pengelolaan ruang laut, pengelolaan sumber daya perikanan tangkap, budidaya, yang terintegrasi dan berkelanjutan serta meningkatnya daya saing, pengendalian mutu hasil KP, keamanan hayati ikan dan meningkatnya pengawasan pengelolaan SDKP
2. Optimalnya pengelolaan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan KKP

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran

Strategis (SS) KKP tahun 2020-2024, terdiri dari:

1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat;
2. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat;
3. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan;
4. Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat;
5. Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan;
6. Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab;
7. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing;
8. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif;
9. Tata kelola pemerintahan yang baik.

c. Telaahan RTRW KLHS

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaimana tercantum dalam dokumen RTRW bahwa penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan pola ruang wilayah yang serasi dan seimbang dalam upaya pemanfaatannya, baik untuk ruang kawasan lindung maupun ruang untuk kawasan budidaya sehingga dalam pengembangannya

dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal sesuai dengan potensi dan kendala yang ada.

Kebijakan pembangunan kewilayahan di Jawa Tengah tidak terlepas dari kebijakan kewilayahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Kebijakan kewilayahan tersebut merupakan hasil telaah terhadap struktur ruang wilayah yang telah disepakati bersama oleh seluruh *stakeholders* terkait pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan di Jawa Tengah. Hal tersebut sekaligus sebagai upaya menjaring isu-isu lingkungan hidup strategis sebagai bahan penyusunan program kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Jawa Tengah.

Rencana pola ruang wilayah provinsi merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Berdasarkan pada pengembangan kawasan budidaya, wilayah Provinsi Jawa Tengah dikembangkan secara intensif untuk kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata dan kawasan permukiman.

Secara umum pengembangan tersebut berorientasi pada optimalisasi sumberdaya dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Secara regional dan lokal peruntukan kawasan budidaya harus mempunyai sinergi yang seimbang, baik secara pengembangan wilayah yaitu dengan penentuan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan, tetapi juga memperhatikan potensi-potensi yang ada sebagai aset dan sumber pengembangan wilayah-wilayah baru terutama untuk di wilayah perdesaan. Sehingga diharapkan pengembangan kawasan budidaya tidak hanya memperhatikan keterkaitan antar wilayah tetapi juga memperhatikan harmonisasi perkotaan dan perdesaan. RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Penyusunan revisi perda RZWP-3-K harus diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi. Rencana Tata Ruang Wilayah dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 termasuk dalam Rencana Umum Tata Ruang yang secara hirarki terdiri dari RTRWN nasional, RTRWProvinsi, RTRWKab/Kota.

Tabel 3.2 Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	4.2.6. Kawasan Peruntukan Perikanan Merupakan kawasan yang fungsinya diperuntukan untuk budidaya ikan. Kawasan perikanan yang dialokasikan di Jawa Tengah meliputi kawasan perikanan tangkap dan Kawasan perikanan budidaya (air tawar, air payau, air laut). Rencana kawasan perikanan diarahkan untuk dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. 4.2.6.1 Kawasan Perikanan Tangkap Kawasan Perikanan Tangkap, terdiri dari : a. Perikanan tangkap di laut yang memanfaatkan potensi perairan Pantai Utara dan Pantai Selatan; b. Perikanan tangkap di perairan umum yang memanfaatkan potensi danau, waduk, rawa, sungai dan embung. 4.2.6.2 Kawasan Perikanan Budidaya Lahan perikanan budidaya air payau, perikanan budidaya air tawar, dan perikanan budidaya air laut, terletak di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten	Tugas : membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Fungsi : b. perumusan kebijakan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas; c. pelaksanaan kebijakan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan	b. Pemantapan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi perikanan (tangkap, budidaya dan garam), perbaikan sistem distribusi, ketersediaan sarana dan prasarana; c. Masih tingginya resiko usaha dan belum adanya jaminan usaha kelautan dan perikanan; d. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan pangan; e. Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang lamun).	Faktor Penghambat 1. Kurangnya kualitas sumber daya manusia 2. Kurangnya akses permodalan 3. Terbatasnya infrastruktur/sarana dan prasarana pendukung 4. Kurangnya penerapan teknologi 5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan 6. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir 7. Kurang optimalnya pengawasan SDI 8. Perijinan sektor Kelautan dan Perikanan yang melibatkan banyak instansi Faktor Pendorong : 1. Tersedianya SDM aparatur dalam pembinaan pelaku usaha perikanan 2. Tingginya permintaan ikan dan benih 3. Tersedia potensi pengembangan perikanan (lahan, air, panjang pantai) 4. Dukungan anggaran

	Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal. Luas kawasan perikanan di Jawa Tengah direncanakan sebesar ± 24.802 Ha.	Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas; e. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.		
--	---	--	--	--

d. Isu Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan telaah Renstra PD, identifikasi permasalahan tupoksi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; telaah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan telaah RTRW dan KLHS Jawa Tengah, maka berikut ini adalah isu-isu strategis yang telah ditetapkan :

1. Belum optimalnya pengelolaan tata ruang laut dan sumberdaya kelautan dan perikanan di Jawa Tengah;
2. Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan dan garam rakyat;
3. Masih rendahnya Daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan dikarenakan belum optimalnya perlindungan usaha;
4. Angka Konsumsi ikan di Jawa Tengah yang masih dibawah rata-rata Angka Konsumsi Ikan Nasional dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi ikan, rendahnya kompetensi sdm poklahsar, belum optimalnya jaminan mutu produk perikanan serta belum terbentuknya jejaring pemasaran produk kelautan dan perikanan;
5. Rendahnya kesejahteraan masyarakat pesisir dikarenakan minimnya kompetensi dan keterampilan yang dimiliki, bagi hasil yang tidak proporsional, praktik ijon, serta belum optimalnya jaminan perlindungan terhadap pelaku usaha;
6. Terjadinya *overfishing* di wilayah pengelolaan perikanan, *overcapacity* di Pelabuhan perikanan, *unreported* data produksi perikanan, serta minimnya teknologi penangkapan ikan;
7. Tingginya harga pakan, wabah dan hama penyakit ikan, menurunnya kualitas benih dan induk, rendahnya teknologi serta sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
8. Kerusakan ekosistem pesisir akibat abrasi, alih fungsi lahan, minimnya pengetahuan stakeholder dalam pengawasan SDKP, serta adanya ketidaksesuaian antara rencana alokasi ruang laut dengan pemanfaatan ruang laut.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

A. TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung capaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Jawa Tengah, memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan menangani isu strategis daerah yang ada. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai.

Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai sesuatu yang akan dicapai untuk mendukung tujuan Provinsi Jawa Tengah “Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Lestari” dengan mendukung salah satu capaian sasaran “Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing, dan berkelanjutan.

Tujuan jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut: Berkaitan dengan sasaran “Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing, dan berkelanjutan” :

1. Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan” dengan indikator persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan (Persen).
2. Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan dengan indikator nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan (Angka)
3. Meningkatkan kualitas ekosistem kelautan dan perikanan dengan indikator persentase luasan mangrove yang direhabilitasi (Persen)

Berkaitan dengan sasaran “terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis” : “Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi perangkat daerah ” dengan indikator tujuan indeks reformasi birokrasi (angka).

B. SASARAN

Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah merupakan penjabaran dari tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. merupakan penjabaran dari tujuan , sehingga tujuan dapat dijabarkan lebih dari satu sasaran.

Untuk mendukung tujuan “Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan” terdapat beberapa sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya produksi perikanan indikator sasaran : produksi perikanan (ton/tahun)
- b. Meningkatnya produksi garam indikator sasaran : produksi garam (ton/tahun)

Untuk mendukung tujuan “Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan” terdapat beberapa sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya angka konsumsi ikan indikator sasaran: angka konsumsi ikan (angka)
- b. Meningkatnya nilai tukar nelayan indikator sasaran : nilai tukar nelayan (angka)
- c. Meningkatnya nilai tukar pembudidaya ikan indikator sasaran : nilai tukar pembudidaya ikan (angka)

Untuk mendukung tujuan “Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan” terdapat beberapa sasarnya adalah :

- a. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berkelanjutan dan partisipatif indikator sasaran : Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP (%)

Untuk mendukung tujuan “Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah” terdapat beberapa sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah indikator sasaran : Indeks kepuasan masyarakat
- b. Meningkatnya kualitas pengelolaan Risiko Perangkat Daerah indikator sasaran : Indeks manajemen risiko

Tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan		Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	1,40	1,50	1	1,10	1,20	1,20
		Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	Ton	864.706,77	913.011,18	927.350	952.718	979.038	2.859.106
		Meningkatnya Produksi Garam	Produksi Garam	Ton	197.623,92	135.792,09	133.320	134.640	135.960	403.920
2	Meningkatnya Kesejahteraan	Meningkatnya Angka Konsumsi	Tingkat Konsumsi Ikan Jawa	kg/kapita/tahun	37,25	37,25	40,12	40,92	41,74	41,74

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
	raan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Ikan	Tengah							
		Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai Tukar Nelayan	Angka	110,22	104,92	105	105,50	106	106
		Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Angka	110,50	109,84	110	110,50	112	112
3	Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan	Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP	%	75	61,33	62	63	64	64

Keterangan : Kondisi awal 2022 merupakan realisasi tahun 2023 merupakan target capaian tahun 2023

Untuk tujuan dan sasaran, serta indikatornya yang berkaitan dengan kesekretariatan, ditetapkan sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	NA	NA	82	83	84	84
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	NA	NA	84	84	85	85
		Menigkatnya Kualitas Pelaksanaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Resiko	Angka	NA	NA	82	83	84	84

1.2. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut.

Tabel 4.2
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis
Dinas Kelautan dan Perikanan
Tahun 2024- 2026

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Angka Konsumsi Ikan	Ikan mudah rusak	12	Ikan perlu penyimpanan khusus	Kualitas ikan buruk	Sosialisasi mutu dan kualitas ikan	Kepala OPD	Satu tahun
		Masyarakat tidak suka ikan	12	Menyimpan, mengolah dan cara mengonsumsi ikan tidak mudah	Konsumsi ikan rendah	Sosialisasi gemar makan ikan	Kepala OPD	Satu tahun
		Produksi ikan turun	12	Ikan tergantung musim	Ketersediaan ikan tidak terjamin	Pencatatan produksi ikan secara rutin	Kepala OPD	Satu tahun
Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	Harga ikan fluktuatif	16	Penangkapan ikan tergantung musim dan cuaca	Kontribusi sub sektor perikanan dan kelautan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kurang maksimal	Sosialisasi, hibah alat penangkap ikan ramah lingkungan dan konservasi	Kepala OPD	Satu tahun
		Harga BBM tinggi	12	Naiknya harga BBM	Nelayan tidak bisa melaut		Kepala OPD	Satu tahun
Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	0	0	0	0	Sosialisasi dan konservasi	Kepala OPD	Satu tahun
Meningkatkan Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	Nelayan tidak bisa melaut	12	Cuaca buruk	Produksi ikan laut terganggu		Kepala OPD	Satu tahun
		Kegagalan budidaya ikan	12	Kematian ikan	Kegagalan panen		Kepala OPD	Satu tahun
Meningkatkan Produksi Garam	Produksi Garam	Musim hujan panjang	12	Tingginya curah hujan	Tidak bisa produksi garam	Bantuan alat produksi	Kepala OPD	Satu tahun

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Mutu garam rendah	12	Teknologi masih tradsional	Produksi garam tidak optimal	Bantuan alat produksi	Kepala OPD	Satu tahun
Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP (%)	Wilayah tangkapan nelayan semakin jauh	12	Penggunaan alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan	Menurunnya produksi ikan	Meningkatkan frekwensi operasi pengawasan	Kepala OPD	Satu tahun
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Perangkat Daerah								
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	9	9	Petugas tidak memahami tugasnya	Masyarakat tidak terlayani dengan baik	Pelatihan dan sosialisasi	Kepala OPD	Satu tahun
		Terjadinya pungutan kepada masyarakat	12	Petugas tidak berintegritas	Adanya potensi KKN	Pengawasan dan kotak pengaduan	Kepala OPD	Satu tahun
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Manajemen risiko tidak diterapkan dalam operasional kegiatan	12	Personil tidak memahami manajemen risiko	Risiko tidak dapat dikendalikan	Penggunaan teknologi produksi garam	Kepala OPD	Satu tahun



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam bab ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Strategi yang akan diambil dalam menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah :

1. Pemantapan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas perikanan tangkap, budidaya dan garam rakyat yang didukung perbaikan sistem distribusi, ketersediaan sarana dan prasarana serta optimalisasi dan rehabilitasi balai benih perikanan;
2. Perlindungan dan jaminan usaha bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan;
3. Peningkatan nilai tambah melalui diversifikasi pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan pangan;
4. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan peningkatan daya dukung lingkungan dan perbaikan ekosistem pesisir melalui upaya rehabilitasi mangrove, penenggelaman terumbu karang serta digitalisasi pendataan dan pengawasan perikanan.

Sebagai tindak lanjut dari 4 (empat) strategi yang ditetapkanlah arah kebijakan yang lebih bersifat operasional yang diharapkan mampu menyelesaikan akar permasalahan yang dihadapi masyarakat selama ini. Arah kebijakan yang akan diambil dalam 3 (tiga) tahun ke depan adalah:

1. Perlindungan kepentingan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, melalui:
 - a. Pembiayaan premi asuransi nelayan;
 - b. Pemberdayaan usaha perikanan tangkap skala kecil;
 - c. Pengembangan kartu nelayan yang terintegrasi dengan sistem informasi terpadu;
 - d. Fasilitasi kurikulum kelautan dan perikanan di Institusi Pendidikan;
 - e. Fasilitasi regenerasi nelayan berupa rekomendasi untuk masuk sekolah dan perguruan tinggi perikanan;
 - f. Sosialisasi dan fasilitasi perjanjian kerja laut (PKL);
 - g. Fasilitasi peningkatan kapasitas usaha melalui kelembagaan;
 - h. Pelatihan ketrampilan dan peningkatan kompetensi awak kapal perikanan.
2. Pengelolaan Perikanan Tangkap melalui:
 - a) Pengembangan sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan;
 - b) Replacement alat tangkap yang ramah lingkungan;

- c) Sosialisasi dan gerai perizinan perikanan tangkap;
 - d) Penenggelaman fish apartment;
 - e) Penyediaan data dan sumber informasi SDI;
 - f) Penggunaan teknologi penangkapan ikan;
 - g) Penerapan cold chain system pada kapal perikanan;
 - h) Penyediaan dokumen pengembangan Kawasan pelabuhan perikanan;
 - i) Penyelenggaraan operasional Pelabuhan dan kesyahbandaran;
 - j) Penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan usaha;
 - k) Pengembangan SPBN.
3. Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, pengamanan daerah asuhan ikan (jalur Ia atau 0-2 mil dari alat tangkap aktif bermesin dan peningkatan kerjasama antar provinsi dan lintas sektoral dalam pengaturan nelayan andon.
4. Peningkatan produksi perikanan budidaya, melalui:
- a. Peningkatan ketrampilan pembudidaya ikan sesuai dengan prinsip-prinsip Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPIB);
 - b. Intensifikasi dan penerapan teknologi produksi perikanan budidaya yang adaptif;
 - c. pengembangan pakan ikan mandiri;
 - d. peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
 - e. Pengembangan sentra/Kawasan/kampung perikanan budidaya;
 - f. Peningkatan sarana dan prasarana produksi benih dan calon induk unggul;
 - g. Fasilitasi terkait dengan ijin usaha perikanan budidaya;
 - h. Fasilitasi terkait dengan informasi perubahan iklim ekstrim;
 - i. Fasilitasi terkait dengan akses permodalan usaha perikanan budidaya.
5. Pengendalian sebaran hama penyakit ikan melalui:
- a. Fasilitasi monitoring kualitas lingkungan budidaya;
 - b. Penyebarluasan informasi terkait dengan perubahan iklim;
 - c. Fasilitasi pengujian kesehatan dan hama penyakit ikan;
 - d. Fasilitasi penyebarluasan informasi terkait dengan hama dan penyakit ikan;
 - e. Fasilitasi pendataan dan pembinaan peredaran Obat Ikan.
6. Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melalui:
- a. pemenuhan kebutuhan bahan baku;
 - b. peningkatan konsumsi ikan;
 - c. peningkatan produk yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan, sanitasi dan higien;
 - d. Peningkatan kompetensi pengolah hasil perikanan;
 - e. Peningkatan sarana prasarana dan inovasi teknologi pengolah hasil perikanan;
 - f. Verifikasi perizinan usaha pengolah dan pemasar perikanan;
 - g. Promosi dan pemasaran.

7. Pengembangan usaha garam rakyat melalui:
 - a. Pembangunan dan revitalisasi prasarana antara lain saluran tambak garam dan jalan produksi;
 - b. Pemberian bantuan sarana produksi;
 - c. Peningkatan kompetensi SDM petambak garam;
 - d. Peningkatan luasan tambak garam yang menerapkan teknologi;
 - e. Penyusunan data potensi garam rakyat Jawa Tengah.
8. Pemberdayaan perempuan dan taruna pesisir melalui:
 - a. Sosialisasi dan pelatihan teknologi tepat guna serta pelatihan manajemen usaha mulai dari pra produksi hingga pasca produksi dan pemasaran;
 - b. Pemberian bantuan sarana prasarana usaha.
9. Pengelolaan dan peningkatan sumberdaya kelautan dan perikanan, melalui
 - a. Penyusunan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan konservasi;
 - b. Pembentukan Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi;
 - c. Pemutakhiran data potensi kelautan, pesisir dan pulau” kecil Jawa Tengah;
 - d. Rehabilitasi ekosistem mangrove dan penenggelaman terumbu karang buatan;
 - e. Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait RZWP3K yang telah terintegrasi dengan RTRW;
 - f. Sosialisasi pengelolaan Kawasan konservasi kepada stake holder terkait;
 - g. Monitoring kesesuaian pemanfaatan ruang laut;
 - h. Verifikasi teknis terkait rencana pengajuan kesesuaian pemanfaatan ruang laut;
 - i. Peningkatan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat tentang RZWP3K dan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem vital di laut dan pesisir;
 - j. Pemanfaatan teknologi digital dengan pengembangan sistem aplikasi yang mencakup update informasi terkait sektor kelautan dan perikanan di Jawa Tengah.
10. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan kelautan dan perikanan, melalui:
 - a. Meningkatkan angka penanganan kasus pelanggaran peraturann perundangan kelautan dan perikanan;
 - b. Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan perikanan;
 - d. Meningkatkan sinergitas stakeholder kelautan dan perikanan dalamantisipasi konflik antar nelayan;
 - e. Meningkatkan cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	1. Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan yang didukung teknologi informasi terpadu dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap	1. Pengelolaan Perikanan Tangkap melalui: a. Pengembangan sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan b. Replacement alat tangkap yang ramah lingkungan c. Sosialisasi dan gerai perizinan perikanan tangkap d. Penenggelaman fish apartment e. Penyediaan data dan sumber informasi SDI f. Penggunaan teknologi penangkapan ikan g. Penerapan cold chain system pada kapal perikanan h. Penyediaan dokumen pengembangan Kawasan pelabuhan perikanan i. Penyelenggaraan operasional Pelabuhan dan kesyahbandaran j. Penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan usaha k. Pengembangan SPBN
		Meningkatnya Produksi Perikanan	1. Penggunaan benih dan induk unggul yang didukung penerapan teknologi, produksi pakan dan lingkungan perairan yang kondusif	2. Peningkatan produksi perikanan budidaya, melalui: a. Intensifikasi dan penerapan teknologi produksi perikanan budidaya yang adaptif b. pengembangan pakan ikan mandiri c. peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya d. Pengembangan sentra/Kawasan/kampung perikanan budidaya e. Peningkatan sarana dan prasarana produksi benih dan calon induk unggul
				3. Pengendalian sebaran hama penyakit ikan melalui a. Fasilitasi monitoring kualitas lingkungan budidaya b. Penyebarluasan informasi terkait dengan perubahan iklim c. Fasilitasi pengujian kesehatan dan hama

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
				penyakit ikan d. Fasilitasi penyebaran informasi terkait dengan hama dan penyakit ikan e. Fasilitasi pendataan dan pembinaan peredaran Obat Ikan
		Meningkatnya Produksi Garam	2. Peningkatan produksi garam yang berkualitas, terintegrasi, dan berteknologi	4. Pengembangan usaha garam rakyat melalui: a. Pembangunan dan revitalisasi prasarana antara lain saluran tambak garam dan jalan produksi b. Pemberian bantuan sarana produksi c. Peningkatan kompetensi SDM petambak garam d. Peningkatan luasan tambak garam yang menerapkan teknologi e. Penyusunan data potensi garam rakyat Jawa Tengah
				5. Pemberdayaan perempuan dan taruna pesisir melalui: a. Sosialisasi dan pelatihan teknologi tepat guna serta pelatihan manajemen usaha mulai dari pra produksi hingga paska produksi dan pemasaran; b. Pemberian bantuan sarana prasarana usaha;
2	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Meningkatnya Konsumsi Ikan	Angka Peningkatan mutu produk dan jaminan keamanan pangan usaha pengolahan dan pemasaran tradisional serta mendorong usaha pengolahan dan pemasaran modern untuk berorientasi ekspor	1. Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melalui : a. pemenuhan kebutuhan bahan baku; b. peningkatan konsumsi ikan c. peningkatan produk yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan, sanitasi dan higien d. Peningkatan kompetensi pengolah hasil perikanan e. Peningkatan sarana prasarana dan inovasi teknologi pengolah hasil perikanan f. Promosi dan pemasaran
		Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan	Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan yang	2. Perlindungan kepentingan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, melalui:

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			didukung teknologi informasi terpadu dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap	a. Pembiayaan premi asuransi nelayan b. pemberdayaan usaha perikanan tangkap skala kecil c. Pengembangan kartu nelayan yang terintegrasi dengan sistem informasi terpadu d. Fasilitasi kurikulum kelautan dan perikanan di Institusi Pendidikan e. Fasilitasi regenerasi nelayan berupa rekomendasi untuk masuk sekolah dan perguruan tinggi perikanan f. Sosialisasi dan fasilitasi perjanjian kerja laut (PKL) g. Fasilitasi peningkatan kapasitas usaha melalui kelembagaan h. Pelatihan ketrampilan dan peningkatan kompetensi awak kapal perikanan
		Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Penggunaan benih dan induk unggul yang didukung penerapan teknologi, produksi pakan dan lingkungan perairan yang kondusif	6. Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan Melalui : a. Peningkatan ketrampilan pembudidaya ikan sesuai dengan prinsip-prinsip Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPIB) b. Fasilitasi terkait dengan ijin usaha perikanan budidaya c. Fasilitasi terkait dengan informasi perubahan iklim ekstrim d. Fasilitasi terkait dengan akses permodalan usaha perikanan budidaya
3	Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan	Terwujudnya Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif	Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berpedoman pada RZWP3K dan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi habitat vital di pesisir dan	1. Pengelolaan dan peningkatan sumberdaya kelautan dan perikanan, melalui a. Penyusunan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan konservasi b. Pembentukan Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			laut	c. Pemutakhiran data potensi kelautan, pesisir dan pulau” kecil Jawa Tengah d. Rehabilitasi ekosistem mangrove dan penenggelaman terumbu karang buatan e. Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait RZWP3K yang telah terintegrasi dengan RTRW f. Sosialisasi pengelolaan Kawasan konservasi kepada stake holder terkait g. Monitoring kesesuaian pemanfaatan ruang laut h. Verifikasi teknis terkait rencana pengajuan kesesuaian pemanfaatan ruang laut i. Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, pengamanan daerah asuhan ikan (jalur Ia atau 0-2 mil dari alat tangkap aktif bermesin dan peningkatan kerjasama antar provinsi dan lintas sektoral dalam pengaturan nelayan andon. j. Peningkatan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat tentang RZWP3K dan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem vital di laut dan pesisir k. Pemanfaatan teknologi digital dengan pengembangan sistem aplikasi yang mencakup update informasi terkait sektor kelautan dan perikanan di Jawa Tengah
				2. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan kelautan dan perikanan, melalui: a. Meningkatkan angka penanganan kasus pelanggaran peraturann perundangan kelautan dan perikanan. b. Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS),

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
				Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan perikanan. d. Meningkatkan sinergitas stakeholder kelautan dan perikanan dalam antisipasi konflik antar nelayan. e. Meningkatkan cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP.



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diambil dari program yang menunjang secara langsung pencapaian Tujuan dan Sasaran serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada satu urusan pilihan (kelautan dan perikanan).

6.1. Rencana Program

Dalam perkembangan periode waktu tiga tahun, upaya mewujudkan kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan dan mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan di Jawa Tengah, dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, program dimaksud adalah :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
3. Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
4. Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

6.2. Kegiatan

Kegiatan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan tersebut meliputi :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

- b. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - c. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi PPP Tegalsari
 - d. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi PPP Asemdayong
 - e. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi PPP Wonokerto
 - f. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi PPP Klidanglor
 - g. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi PPP Tawang
 - h. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi PPP Morodemak
 - i. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi PPP Bajomulyo
 - j. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi PPP Tasikagung
 - k. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi PPP Karimunjawa
 - l. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi PPP Lohgending
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, terdiri dari :
- a. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
 - b. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - c. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A
 - d. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut Balai Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A
3. Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- a. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - b. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
 - c. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat
 - d. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur
 - e. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan
 - f. Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat
 - g. Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur
 - h. Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan

4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
- a. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
 - b. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - c. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat
 - d. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat
 - e. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur
 - f. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur
 - g. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan
 - h. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari :
- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - b. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
 - c. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - d. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan								33.247.799.000		22.345.706.000		33.338.476.000		88.931.981.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	%		1		1,1		1,2		1,2		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Meningkatnya Produksi Garam *							1.859.567.000		1.259.567.000		1.859.567.000		4.978.701.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Produksi garam *	Ton		133320	1.859.567.000	134640	1.259.567.000	135960	1.859.567.000	403920	4.978.701.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL **					1.859.567.000		1.259.567.000		1.859.567.000		4.978.701.000		
				Persentase produksi garam **	%		1	1.859.567.000	2	1.259.567.000	3	1.859.567.000	3	4.978.701.000	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil	
		3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ***					1.859.567.000		1.259.567.000		1.859.567.000		4.978.701.000		
				Jumah KUGAR yang meningkat kompetensinya ***	Kelompok		25	80.567.000	25	85.000.000	25	100.000.000	75	265.567.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
		3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ****					80.567.000		85.000.000		100.000.000		265.567.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024		2025			2026					
							Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Jumlah petambak garam yang difasilitasi dan dibina ****	Orang		125	80.567.000	125	85.000.000	125	100.000.000	375	265.567.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil; JAWA TENGAH	
				Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan ***	Kelompok		4	65.000.000	4	70.000.000	4	80.000.000	12	215.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		
		3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ****					65.000.000		70.000.000		80.000.000		215.000.000			
				Jumlah masyarakat pesisir yang meningkat kapasitas usahanya ****	Orang		100	65.000.000	100	70.000.000	100	80.000.000	300	215.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil; JAWA TENGAH	
				Jumlah KUGAR yang meningkat teknologinya ***	Kelompok		5	1.186.950.000	5	976.370.000	5	1.358.132.000	15	3.521.452.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		
		3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ****					1.186.950.000		976.370.000		1.358.132.000		3.521.452.000			
				Jumlah Sarana dan Prasarana yang diberikan ke petambak garam ****	Jenis		2	697.000.000	2	620.000.000	2	758.132.000	2	2.075.132.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil; JAWA TENGAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Luas lahan garam yang menerapkan teknologi ****	Ha		20	489.950.000	20	356.370.000	20	600.000.000	60	1.446.320.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil; JAWA TENGAH
				Jumlah sentra garam rakyat yang didata potensinya ***	Lokasi		5	527.050.000	5	128.197.000	5	321.435.000	5	976.682.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
		3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ****					527.050.000		128.197.000		321.435.000		976.682.000		
				Jumlah Kab/Kota yang melaporkan data potensi garam ****	Kabupaten/Kota		9	527.050.000	9	128.197.000	9	321.435.000	9	976.682.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Produksi Perikanan *							31.388.232.000		21.086.139.000		31.478.909.000		83.953.280.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Produksi perikanan *	Ton		927350	31.388.232.000	952718	21.086.139.000	979038	31.478.909.000	2859106	83.953.280.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP **					20.494.032.000		11.941.939.000		18.034.709.000		50.470.680.000		
				Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdayong **	%		72,72	1.163.190.000	72,72	663.190.000	72,72	663.190.000	72,72	2.489.570.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025			2026	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ***					1.163.190.000		663.190.000		663.190.000		2.489.570.000						
				Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan ***	Jenis		5	135.000.000	5	205.630.000	6	200.000.000	6	540.630.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B					
		3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan ****					135.000.000		205.630.000		200.000.000		540.630.000						
				Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan ****	Dokumen		80	25.000.000	110	50.000.000	140	50.000.000	330	125.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B; PEMALANG				
				Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan ****	Unit		65	20.000.000	90	50.000.000	120	50.000.000	120	120.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B; PEMALANG				
				Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan ****	Laporan		12	15.000.000	12	30.000.000	12	50.000.000	12	95.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B; PEMALANG				
				Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan ****	Orang		60	75.000.000	90	75.630.000	120	50.000.000	120	200.630.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B; PEMALANG				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024		2025			2026		Target			Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan ***	Jenis		5	200.000.000	5	180.000.000	6	170.000.000	6	550.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B		
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan Perikanan ****					200.000.000		180.000.000		170.000.000		550.000.000			
				Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai ****	Unit		40	80.000.000	80	90.000.000	120	85.000.000	120	255.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B; PEMALANG	
				Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP ****	%		70	120.000.000	80	90.000.000	90	85.000.000	90	295.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B; PEMALANG	
				Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan ***	%		14	100.000.000	28	90.000.000	42	90.000.000	42	280.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B		
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan Perikanan ****					100.000.000		90.000.000		90.000.000		280.000.000			
				Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan ****	Dokumen		1	100.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	3	280.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B; PEMALANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024		2025			2026		Target			Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik ***	%		40	657.595.000	50	118.355.000	60	129.830.000	60	905.780.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B		
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					657.595.000		118.355.000		129.830.000		905.780.000			
				Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki ****	Unit		1	657.595.000	1	118.355.000	1	129.830.000	3	905.780.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B; PEMALANG	
				Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi ***	%		5	25.000.000	8	25.000.000	10	25.000.000	10	75.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B		
		3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan ****					25.000.000		25.000.000		25.000.000		75.000.000			
				Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi ****	Orang		15	25.000.000	25	25.000.000	30	25.000.000	80	75.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B; PEMALANG	
				Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya ***	%		20	45.595.000	30	44.205.000	40	48.360.000	40	138.160.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					45.595.000		44.205.000		48.360.000		138.160.000		
				Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya ****	Orang		4	45.595.000	6	44.205.000	8	48.360.000	8	138.160.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B; PEMALANG
				Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo **	%		100	1.134.616.000	100	934.616.000	100	1.284.616.000	100	3.353.848.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	
		3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ***					1.134.616.000		934.616.000		1.284.616.000		3.353.848.000		
				Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan ***	Jenis		9	432.034.000	9	456.034.000	9	520.034.000	9	1.408.102.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan ****					432.034.000		456.034.000		520.034.000		1.408.102.000		
				Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan ****	Dokumen		2700	298.234.000	2800	307.234.000	2900	356.234.000	8400	961.702.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	PATI; Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024		2025			2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan ****	Unit		100	62.200.000	200	67.200.000	300	72.200.000	300	201.600.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	PATI; Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	
				Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan ****	Laporan		12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	12	165.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	PATI; Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	
				Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan ****	Orang		300	21.600.000	320	26.600.000	350	31.600.000	350	79.800.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	PATI; Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	
				Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan ***	Jenis		7	21.100.000	7	26.100.000	7	31.100.000	7	78.300.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA		
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan Perikanan ****					21.100.000		26.100.000		31.100.000		78.300.000			
				Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai ****	Unit		2700	21.100.000	2800	26.100.000	2900	31.100.000	2900	78.300.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	PATI; Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	
				Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP ****	%		100	-	100	-	100	-	100	-	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	PATI; Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan ***	%		29	141.455.000	43	146.455.000	57	201.455.000	57	489.365.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					141.455.000		146.455.000		201.455.000		489.365.000		
				Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan ****	Dokumen		1	141.455.000	1	146.455.000	1	201.455.000	3	489.365.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	PATI; Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A
				Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik ***	%		65	525.627.000	68	286.327.000	71	507.327.000	71	1.319.281.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					525.627.000		286.327.000		507.327.000		1.319.281.000		
				Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki ****	Unit		1	525.627.000	1	286.327.000	1	507.327.000	3	1.319.281.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	PATI; Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A
				Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi ***	%		85	14.400.000	90	19.700.000	95	24.700.000	95	58.800.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan					14.400.000		19.700.000		24.700.000		58.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi			
							2024		2025			2026		Target			Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			

				Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi ****	Orang		30000	14.400.000	35000	19.700.000	40000	24.700.000	120000	58.800.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	PATI; Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A			
				Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya ***	%		6	-	12	-	18	-	18	-	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA				
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					-		-		-		-					
				Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya ****	Orang		1	-	1	-	1	-	1	-	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	PATI; Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A			
				Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa **	%		63,63	632.483.000	72,27	632.483.000	72,27	632.483.000	72,27	1.897.449.000	Dinas Kelautan dan Perikanan				
		3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ***					632.483.000		632.483.000		632.483.000		1.897.449.000					
				Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan ***	Jenis		5	67.000.000	5	77.000.000	5	88.000.000	5	232.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan ****					67.000.000		77.000.000		88.000.000		232.000.000		
				Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan ****	Dokumen		60	20.000.000	70	22.000.000	70	23.000.000	200	65.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA; Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
				Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan ****	Unit		45	10.000.000	50	15.000.000	60	20.000.000	60	45.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA; Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
				Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan ****	Laporan		12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	90.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA; Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
				Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan ****	Orang		45	7.000.000	60	10.000.000	75	15.000.000	75	32.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA; Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
				Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan ***	Jenis		3	207.000.000	3	192.951.000	3	167.000.000	3	566.951.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan Perikanan ****					207.000.000		192.951.000		167.000.000		566.951.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai ****	Unit		50	15.000.000	70	15.000.000	80	17.000.000	80	47.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA; Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
				Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP ****	%		60	192.000.000	60	177.951.000	60	150.000.000	60	519.951.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA; Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
				Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan ***	%		40	100.000.000	50	100.532.000	50	138.583.000	50	339.115.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					100.000.000		100.532.000		138.583.000		339.115.000		
				Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan ****	Dokumen		3	100.000.000	3	100.532.000	5	138.583.000	11	339.115.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA; Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
				Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik ***	%		50	223.483.000	60	225.000.000	70	200.000.000	70	648.483.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					223.483.000		225.000.000		200.000.000		648.483.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki ****	Unit		2	223.483.000	3	225.000.000	4	200.000.000	9	648.483.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA; Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
				Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi ***	%		50	15.000.000	60	17.000.000	70	18.900.000	70	50.900.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan ****					15.000.000		17.000.000		18.900.000		50.900.000		
				Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi ****	Orang		50	15.000.000	70	17.000.000	84	18.900.000	204	50.900.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA; Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
				Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya ***	%		65	20.000.000	70	20.000.000	80	20.000.000	80	60.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					20.000.000		20.000.000		20.000.000		60.000.000		
				Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya ****	Orang		50	20.000.000	60	20.000.000	65	20.000.000	65	60.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA; Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024		2025			2026					
							Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Klidanglor **	%		70	1.420.948.000	70	1.220.948.000	70	1.870.948.000	70	4.512.844.000			
		3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ***					1.420.948.000		1.220.948.000		1.870.948.000		4.512.844.000			
				Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan ***	Jenis		9	95.348.000	9	108.000.000	9	120.000.000	9	323.348.000			
		3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan ****					95.348.000		108.000.000		120.000.000		323.348.000			
				Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan ****	Dokumen		2700	23.348.000	2800	27.000.000	2900	30.000.000	8400	80.348.000		BATANG; Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
				Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan ****	Unit		1000	24.000.000	1100	27.000.000	1200	30.000.000	1200	81.000.000		BATANG; Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
				Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan ****	Laporan		12	24.000.000	12	27.000.000	12	30.000.000	12	81.000.000		BATANG; Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
				Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan ****	Orang		100	24.000.000	110	27.000.000	120	30.000.000	120	81.000.000		BATANG; Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan ***	Jenis		6	24.000.000	6	27.000.000	6	30.000.000	6	81.000.000		
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan Perikanan ****					24.000.000		27.000.000		30.000.000		81.000.000		
				Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai ****	Unit		1000	24.000.000	1200	27.000.000	1500	30.000.000	1500	81.000.000		BATANG; Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
				Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP ****	%		2	-	3	-	4	-	4	-		BATANG; Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
				Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan ***	%		5	24.000.000	10	27.000.000	15	30.000.000	15	81.000.000		
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan Perikanan ****					24.000.000		27.000.000		30.000.000		81.000.000		
				Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan ****	Dokumen		1	24.000.000	1	27.000.000	1	30.000.000	3	81.000.000		BATANG; Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
				Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik ***	%		50	650.000.000	60	452.182.000	70	667.401.000	70	1.769.583.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					650.000.000		452.182.000		667.401.000		1.769.583.000		
				Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki ****	Unit		1	650.000.000	1	452.182.000	1	667.401.000	3	1.769.583.000		BATANG; Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
				Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi ***	%		5	24.000.000	10	27.000.000	15	30.000.000	15	81.000.000		
		3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan ****					24.000.000		27.000.000		30.000.000		81.000.000		
				Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi ****	Orang		3000	24.000.000	3500	27.000.000	3800	30.000.000	10300	81.000.000		BATANG; Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
				Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya ***	%		5	603.600.000	10	579.766.000	16	993.547.000	16	2.176.913.000		
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					603.600.000		579.766.000		993.547.000		2.176.913.000		
				Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan	Orang		1	603.600.000	1	579.766.000	1	993.547.000	1	2.176.913.000		BATANG; Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				kompetensinya ****												
				Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan **	%		72	1.051.835.000	72	526.835.000	72	1.026.835.000	72	2.605.505.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ***					1.051.835.000		526.835.000		1.026.835.000		2.605.505.000		
				Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan ***	Jenis		5	80.000.000	6	106.000.000	7	84.000.000	7	270.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan ****					80.000.000		106.000.000		84.000.000		270.000.000		
				Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan ****	Dokumen		128	20.000.000	140	26.000.000	180	20.000.000	448	66.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	KOTA TEGAL; Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
				Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan ****	Unit		10	20.000.000	15	25.000.000	20	17.000.000	20	62.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	KOTA TEGAL; Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan ****	Laporan		12	20.000.000	12	30.000.000	12	25.000.000	12	75.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	KOTA TEGAL; Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
				Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan ****	Orang		30	20.000.000	40	25.000.000	50	22.000.000	50	67.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	KOTA TEGAL; Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
				Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan ***	Jenis		3	20.000.000	4	52.000.000	5	52.000.000	5	124.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06 .03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					20.000.000		52.000.000		52.000.000		124.000.000		
				Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai ****	Unit		110	10.000.000	120	26.000.000	130	27.000.000	130	63.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	KOTA TEGAL; Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
				Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP ****	%		42	10.000.000	46	26.000.000	48	25.000.000	48	61.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	KOTA TEGAL; Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
				Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan ***	%		20	70.000.000	20	30.000.000	20	25.000.000	20	125.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					70.000.000		30.000.000		25.000.000		125.000.000		
				Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan ****	Dokumen		1	70.000.000	1	30.000.000	1	25.000.000	3	125.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	KOTA TEGAL; Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
				Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik ***	%		40	567.635.000	45	24.635.000	50	551.635.000	50	1.143.905.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					567.635.000		24.635.000		551.635.000		1.143.905.000		
				Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki ****	Unit		1	567.635.000	1	24.635.000	1	551.635.000	3	1.143.905.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	KOTA TEGAL; Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
				Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi ***	%		7	13.600.000	11	13.600.000	15	13.600.000	15	40.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan ****					13.600.000		13.600.000		13.600.000		40.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi ****	Orang		10	13.600.000	15	13.600.000	20	13.600.000	45	40.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	KOTA TEGAL; Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
				Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya ***	%		30	300.600.000	32	300.600.000	34	300.600.000	34	901.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					300.600.000		300.600.000		300.600.000		901.800.000		
				Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya ****	Orang		3	300.600.000	3	300.600.000	3	300.600.000	3	901.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	KOTA TEGAL; Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
				Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending **	%		63	3.022.035.000	63	1.172.035.000	63	1.372.035.000	63	5.566.105.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	
		3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ***					3.022.035.000		1.172.035.000		1.372.035.000		5.566.105.000		
				Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan ***	Jenis		5	461.280.000	5	461.280.000	5	461.280.000	5	1.383.840.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan ****					461.280.000		461.280.000		461.280.000		1.383.840.000		
				Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan ****	Dokumen		30	220.320.000	36	220.320.000	40	220.320.000	106	660.960.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	KEBUMEN; Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A
				Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan ****	Unit		108	110.320.000	118	110.320.000	128	110.320.000	128	330.960.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	KEBUMEN; Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A
				Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan ****	Laporan		12	90.320.000	12	90.320.000	12	90.320.000	12	270.960.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	KEBUMEN; Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A
				Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan ****	Orang		90	40.320.000	120	40.320.000	150	40.320.000	150	120.960.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	KEBUMEN; Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A
				Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan ***	Jenis		7	358.308.000	7	358.308.000	7	358.308.000	7	1.074.924.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					358.308.000		358.308.000		358.308.000		1.074.924.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai ****	Unit		165	128.308.000	165	128.308.000	165	128.308.000	165	384.924.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	KEBUMEN; Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A
				Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP ****	%		25	230.000.000	30	230.000.000	40	230.000.000	40	690.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	KEBUMEN; Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A
				Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan ***	%		30	50.000.000	50	50.000.000	80	50.000.000	80	150.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000		
				Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan ****	Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	KEBUMEN; Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A
				Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik ***	%		54	2.102.127.000	54	252.127.000	54	452.127.000	54	2.806.381.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					2.102.127.000		252.127.000		452.127.000		2.806.381.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025			2026	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki ****	Unit		1	2.102.127.000	1	252.127.000	1	452.127.000	3	2.806.381.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	KEBUMEN; Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A				
				Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi ***	%		50	20.320.000	60	20.320.000	70	20.320.000	70	60.960.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN					
		3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan ****					20.320.000		20.320.000		20.320.000		60.960.000						
				Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi ****	Orang		80	20.320.000	90	20.320.000	100	20.320.000	270	60.960.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	KEBUMEN; Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A				
				Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya ***	%		20	30.000.000	30	30.000.000	70	30.000.000	70	90.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA					
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000						
				Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya ****	Orang		2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	90.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	KEBUMEN; Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak **	%		81	1.237.530.000	81	855.626.000	81	1.345.626.000	81	3.438.782.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
		3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ***					1.237.530.000		855.626.000		1.345.626.000		3.438.782.000		
				Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan ***	Jenis		6	385.826.000	7	414.408.000	8	457.849.000	8	1.258.083.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan ****					385.826.000		414.408.000		457.849.000		1.258.083.000		
				Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan ****	Dokumen		300	164.826.000	300	173.408.000	300	192.849.000	900	531.083.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	DEMAK; Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
				Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan ****	Unit		50	130.000.000	55	140.000.000	60	150.000.000	60	420.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	DEMAK; Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
				Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan ****	Laporan		12	21.000.000	12	21.000.000	12	25.000.000	12	67.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	DEMAK; Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan ****	Orang		100	70.000.000	100	80.000.000	100	90.000.000	100	240.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	DEMAK; Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
				Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan ***	Jenis		4	150.000.000	5	103.000.000	6	166.498.000	6	419.498.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06 .03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					150.000.000		103.000.000		166.498.000		419.498.000		
				Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai ****	Unit		150	70.000.000	150	53.000.000	150	75.000.000	150	198.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	DEMAK; Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
				Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP ****	%		100	80.000.000	100	50.000.000	100	91.498.000	100	221.498.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	DEMAK; Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
				Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan ***	%		42	78.760.000	57	50.000.000	71	90.000.000	71	218.760.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06 .03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					78.760.000		50.000.000		90.000.000		218.760.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan ****	Dokumen		1	78.760.000	1	50.000.000	1	90.000.000	3	218.760.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	DEMAK; Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
				Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik ***	%		55	492.944.000	66	133.038.000	77	461.279.000	77	1.087.261.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					492.944.000		133.038.000		461.279.000		1.087.261.000		
				Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki ****	Unit		1	492.944.000	1	133.038.000	1	461.279.000	3	1.087.261.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	DEMAK; Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
				Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi ***	%		20	100.000.000	20	120.000.000	20	130.000.000	20	350.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan ****					100.000.000		120.000.000		130.000.000		350.000.000		
				Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi ****	Orang		100	100.000.000	150	120.000.000	150	130.000.000	400	350.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	DEMAK; Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
				Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya ***	%		7	30.000.000	14	35.180.000	21	40.000.000	21	105.180.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2024		2025			2026	Target	Rp			Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					30.000.000		35.180.000		40.000.000		105.180.000				
				Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya ****	Orang		2	30.000.000	3	35.180.000	4	40.000.000	4	105.180.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	DEMAK; Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A		
				Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung **	%		100	3.222.398.000	100	1.359.979.000	100	3.859.979.000	100	8.442.356.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A			
		3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ***					3.222.398.000		1.359.979.000		3.859.979.000		8.442.356.000				
				Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan ***	Jenis		6	192.323.000	7	180.851.000	8	160.851.000	8	534.025.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN			
		3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan ****					192.323.000		180.851.000		160.851.000		534.025.000				
				Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan ****	Dokumen		3500	19.825.000	4000	19.825.000	4500	19.825.000	12000	59.475.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A; REMBANG		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024		2025			2026		Target			Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan ****	Unit		3000	51.472.000	3500	40.000.000	4000	20.000.000	4000	111.472.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A; REMBANG	
				Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan ****	Laporan		12	30.186.000	12	30.186.000	12	30.186.000	12	90.558.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A; REMBANG	
				Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan ****	Orang		80	90.840.000	100	90.840.000	120	90.840.000	120	272.520.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A; REMBANG	
				Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan ***	Jenis		5	182.420.000	6	132.420.000	7	182.420.000	7	497.260.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA		
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan Perikanan ****					182.420.000		132.420.000		182.420.000		497.260.000			
				Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai ****	Unit		3000	135.000.000	3100	100.000.000	3200	135.000.000	3200	370.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A; REMBANG	
				Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP ****	%		10	47.420.000	15	32.420.000	20	47.420.000	20	127.260.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A; REMBANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan ***	%		42,86	60.960.000	57,14	80.880.000	71,43	60.960.000	71,43	202.800.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					60.960.000		80.880.000		60.960.000		202.800.000		
				Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan ****	Dokumen		1	60.960.000	1	80.880.000	1	60.960.000	3	202.800.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A; REMBANG
				Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik ***	%		100	2.029.419.000	100	247.749.000	100	2.666.472.000	100	4.943.640.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					2.029.419.000		247.749.000		2.666.472.000		4.943.640.000		
				Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki ****	Unit		1	2.029.419.000	1	247.749.000	0	2.666.472.000	2	4.943.640.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A; REMBANG
				Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi ***	%		25	35.076.000	35	35.076.000	50	35.076.000	50	105.228.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan					35.076.000		35.076.000		35.076.000		105.228.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025			2026	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				

				Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi ****	Orang		3000	35.076.000	4000	35.076.000	5000	35.076.000	12000	105.228.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A; REMBANG				
				Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya ***	%		3,7	722.200.000	7,4	683.003.000	11,11	754.200.000	11,11	2.159.403.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA					
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					722.200.000		683.003.000		754.200.000		2.159.403.000						
				Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya ****	Orang		1	722.200.000	2	683.003.000	3	754.200.000	3	2.159.403.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A; REMBANG				
				Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang **	%		62,62	1.028.826.000	71,72	828.826.000	81,82	1.128.826.000	81,82	2.986.478.000	Dinas Kelautan dan Perikanan					
		3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ***					1.028.826.000		828.826.000		1.128.826.000		2.986.478.000						
				Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan ***	Jenis		6	260.000.000	7	260.000.000	8	270.000.000	8	790.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan ****					260.000.000		260.000.000		270.000.000		790.000.000		
				Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan ****	Dokumen		100	50.000.000	150	50.000.000	200	50.000.000	450	150.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL; Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
				Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan ****	Unit		10	60.000.000	15	60.000.000	20	60.000.000	20	180.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL; Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
				Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan ****	Laporan		12	50.000.000	12	50.000.000	12	60.000.000	12	160.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL; Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
				Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan ****	Orang		60	100.000.000	90	100.000.000	120	100.000.000	120	300.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL; Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
			Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan ***		Jenis		6	100.000.000	7	100.000.000	8	120.000.000	8	320.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan Perikanan ****					100.000.000		100.000.000		120.000.000		320.000.000		
				Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai ****	Unit		3500	50.000.000	4000	50.000.000	4500	60.000.000	4500	160.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL; Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP ****	%		43	50.000.000	57	50.000.000	71	60.000.000	71	160.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL; Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
				Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan ***	%		20	100.000.000	20	75.000.000	20	100.000.000	20	275.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06 .03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					100.000.000		75.000.000		100.000.000		275.000.000		
				Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan ****	Dokumen		1	100.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	3	275.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL; Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
				Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik ***	%		46	508.826.000	50	293.826.000	53	566.585.000	53	1.369.237.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06 .03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					508.826.000		293.826.000		566.585.000		1.369.237.000		
				Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki ****	Unit		1	508.826.000	1	293.826.000	1	566.585.000	3	1.369.237.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL; Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
				Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja	%		6	30.000.000	7	50.000.000	8	30.000.000	8	110.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Laut/Asuransi ***												
		3.25.03.1.06 .02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan ****					30.000.000		50.000.000		30.000.000		110.000.000		
				Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransij ****	Orang		60	30.000.000	70	50.000.000	80	30.000.000	210	110.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL; Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
				Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya ***	%		18	30.000.000	25	50.000.000	33	42.241.000	33	122.241.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06 .03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					30.000.000		50.000.000		42.241.000		122.241.000		
				Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya ****	Orang		2	30.000.000	2	50.000.000	2	42.241.000	2	122.241.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL; Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
				Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari **	%		72	2.387.900.000	72	1.187.900.000	72	1.937.900.000	72	5.513.700.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A	
		3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ***					2.387.900.000		1.187.900.000		1.937.900.000		5.513.700.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan ***	Jenis		9	645.980.000	9	645.980.000	9	645.980.000	9	1.937.940.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan ****					645.980.000		645.980.000		645.980.000		1.937.940.000		
				Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan ****	Dokumen		2500	355.264.000	3000	355.264.000	3500	355.264.000	9000	1.065.792.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	KOTA TEGAL; Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A
				Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan ****	Unit		100	157.516.000	200	157.516.000	300	157.516.000	300	472.548.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	KOTA TEGAL; Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A
				Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan ****	Laporan		12	21.600.000	12	21.600.000	12	21.600.000	12	64.800.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	KOTA TEGAL; Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A
				Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan ****	Orang		300	111.600.000	350	111.600.000	400	111.600.000	400	334.800.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	KOTA TEGAL; Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A
				Jumlah fungsi pengusaha yang dilaksanakan ***	Jenis		7	104.200.000	7	104.200.000	7	104.200.000	7	312.600.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					104.200.000		104.200.000		104.200.000		312.600.000		
				Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai ****	Unit		1100	48.960.000	1300	48.960.000	1500	48.960.000	1500	146.880.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	KOTA TEGAL; Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A
				Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP ****	%		100	55.240.000	100	55.240.000	100	55.240.000	100	165.720.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	KOTA TEGAL; Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A
				Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan ***	%		16	55.000.000	33	55.000.000	50	55.000.000	50	165.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					55.000.000		55.000.000		55.000.000		165.000.000		
				Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan ****	Dokumen		1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	3	165.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	KOTA TEGAL; Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A
				Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik ***	%		60	1.410.000.000	70	210.000.000	80	960.000.000	80	2.580.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					1.410.000.000		210.000.000		960.000.000		2.580.000.000		
				Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki ****	Unit		1	1.410.000.000	1	210.000.000	1	960.000.000	3	2.580.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	KOTA TEGAL; Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A
				Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi ***	%		85	141.600.000	90	141.600.000	95	141.600.000	95	424.800.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan ****					141.600.000		141.600.000		141.600.000		424.800.000		
				Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi ****	Orang		5000	141.600.000	6000	141.600.000	7000	141.600.000	18000	424.800.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	KOTA TEGAL; Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A
				Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya ***	%		15	31.120.000	30	31.120.000	50	31.120.000	50	93.360.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					31.120.000		31.120.000		31.120.000		93.360.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya ****	Orang		1	31.120.000	1	31.120.000	1	31.120.000	1	93.360.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	KOTA TEGAL; Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A
				Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto **	%		81,82	2.356.440.000	81,82	776.440.000	81,82	1.076.440.000	81,82	4.209.320.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ***					2.356.440.000		776.440.000		1.076.440.000		4.209.320.000		
				Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan ***	Jenis		7	67.000.000	7	62.500.000	7	67.500.000	7	197.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan ****					67.000.000		62.500.000		67.500.000		197.000.000		
				Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan ****	Dokumen		900	20.000.000	900	25.000.000	900	30.000.000	2700	75.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	KOTA PEKALONGAN; Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
				Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan ****	Unit		70	17.000.000	80	7.500.000	90	7.500.000	90	32.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	KOTA PEKALONGAN; Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan ****	Laporan		12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	30.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	KOTA PEKALONGAN; Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
				Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan ****	Orang		40	20.000.000	40	20.000.000	40	20.000.000	40	60.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	KOTA PEKALONGAN; Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
				Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan ***	Jenis		4	206.000.000	4	318.000.000	4	230.000.000	4	754.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan Perikanan ****					206.000.000		318.000.000		230.000.000		754.000.000		
				Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai ****	Unit		40	6.000.000	80	18.000.000	120	30.000.000	120	54.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	KOTA PEKALONGAN; Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
				Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP ****	%		70	200.000.000	80	300.000.000	90	200.000.000	90	700.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	KOTA PEKALONGAN; Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan ***	%		14	100.000.000	28	100.000.000	28	100.000.000	28	300.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000		
				Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan ****	Dokumen		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	KOTA PEKALONGAN; Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
				Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik ***	%		39	1.938.440.000	42	228.440.000	46	588.940.000	46	2.755.820.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					1.938.440.000		228.440.000		588.940.000		2.755.820.000		
				Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki ****	Unit		1	1.938.440.000	1	228.440.000	1	588.940.000	3	2.755.820.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	KOTA PEKALONGAN; Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
				Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi ***	%		5	5.000.000	7	7.500.000	9	10.000.000	9	22.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024		2025			2026					
							Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan ****					5.000.000		7.500.000		10.000.000		22.500.000			
				Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi ****	Orang		10	5.000.000	15	7.500.000	20	10.000.000	45	22.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	KOTA PEKALONGAN; Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
				Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya ***	%		9	40.000.000	18	60.000.000	27	80.000.000	27	180.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B		
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan ****					40.000.000		60.000.000		80.000.000		180.000.000			
				Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya ****	Orang		4	40.000.000	6	60.000.000	8	80.000.000	8	180.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	KOTA PEKALONGAN; Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
				Persentase produksi perikanan tangkap **	%		5	1.835.831.000	5	1.783.061.000	5	1.835.831.000	5	5.454.723.000	Bidang Perikanan Tangkap		
		3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil ***					461.831.000		409.061.000		461.831.000		1.332.723.000			
				Jumlah pelabuhan yang menerapkan Standar Pelabuhan Perikanan ***	Dokumen		3	310.836.000	4	242.989.000	4	279.152.000	4	832.977.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2024		2025			2026	Target	Rp			Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		3.25.03.1.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap ****					310.836.000		242.989.000		279.152.000		832.977.000				
				Jumlah KUB yang difasilitasi Kelembagaannya ****	Kelompok		2	75.000.000	3	75.000.000	4	75.000.000	4	225.000.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	Bidang Perikanan Tangkap; JAWA TENGAH		
				Jumlah pelabuhan perikanan yang ditingkatkan tata kelola dan operasional kepelabuhanannya ****	Lokasi		1	235.836.000	1	167.989.000	1	204.152.000	3	607.977.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	Bidang Perikanan Tangkap; JAWA TENGAH		
				Jumlah produksi perikanan yang didaratkan ***	Ton		327350	150.995.000	343717,5	166.072.000	360903,37	182.679.000	1031970,87	499.746.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN			
		3.25.03.1.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan ****					150.995.000		166.072.000		182.679.000		499.746.000				
				Jumlah Kabupaten/Kota Yang Melaporkan Data ****	Kabupaten/Kota		34	150.995.000	34	166.072.000	34	182.679.000	34	499.746.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	Bidang Perikanan Tangkap; JAWA TENGAH		
		3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ***					1.374.000.000		1.374.000.000		1.374.000.000		4.122.000.000				
				Jumlah Kapal yang menerapkan dokumen kapal perikanan ***	Unit		240	710.000.000	280	760.000.000	280	770.000.000	280	2.240.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN , KAPAL DAN ALAT TANGKAP			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024		2025			2026		Target			Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		3.25.03.1.02.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap ****					710.000.000		760.000.000		770.000.000		2.240.000.00			
				Jumlah Kapal Perikanan yang Terdaftar Melalui TDKP ****	Unit		160	560.000.000	200	600.000.000	200	600.000.000	200	1.760.000.00	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN , KAPAL DAN ALAT TANGKAP	Bidang Perikanan Tangkap; JAWA TENGAH	
				Jumlah rekomendasi alokasi usaha perikanan yang dikeluarkan ****	Unit		40	150.000.000	40	160.000.000	40	170.000.000	40	480.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN , KAPAL DAN ALAT TANGKAP	Bidang Perikanan Tangkap; JAWA TENGAH	
				Persentase Kapal Perikanan yang menerapkan teknologi Penangkapan Ikan ***	%		0,25	664.000.000	0,25	614.000.000	0,25	604.000.000	0,25	1.882.000.00	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN , KAPAL DAN ALAT TANGKAP		
		3.25.03.1.02.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap ****					664.000.000		614.000.000		604.000.000		1.882.000.00			
				Jumlah kapal yang difasilitasi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan ****	Unit		50	564.000.000	50	514.000.000	50	504.000.000	50	1.582.000.00	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN , KAPAL DAN ALAT TANGKAP	Bidang Perikanan Tangkap; JAWA TENGAH	
				Jumlah lokasi kapal yang menerapkan Teknologi Penangkapan Ikan ****	Lokasi		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	300.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN , KAPAL DAN ALAT TANGKAP	Bidang Perikanan Tangkap; JAWA TENGAH	
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA **					10.894.200.000		9.144.200.000		13.444.200.000		33.482.600.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2024		2025			2026	Target	Rp			Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan **	%		100	1.242.890.000	100	1.242.890.000	100	1.242.890.000	100	3.728.670.000	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A			
		3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut ***					1.242.890.000		1.242.890.000		1.242.890.000		3.728.670.000				
				Jumlah Kasus Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Ditangani ***	Kasus		350	505.840.000	375	505.840.000	400	505.840.000	1125	1.517.520.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN			
		3.25.04.1.05.06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****					505.840.000		505.840.000		505.840.000		1.517.520.000				
				Jumlah Kab/Kota yang Melaporkan Data Peredaran Obat Ikan ****	Kabupaten/Kota		35	39.900.000	35	39.900.000	35	39.900.000	35	119.700.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A; JAWA TENGAH		
				Jumlah Lokasi Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan ****	Lokasi		35	439.990.000	40	439.990.000	45	439.990.000	45	1.319.970.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A; JAWA TENGAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah Pelaku Usaha yang Terakses Informasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan ****	Orang		350	25.950.000	400	25.950.000	450	25.950.000	450	77.850.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A; JAWA TENGAH
				Persentase Pengguna Layanan Pengujian ***	%		20	722.050.000	20	722.050.000	20	722.050.000	20	2.166.150.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	
		3.25.04.1.05.07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi ****					722.050.000		722.050.000		722.050.000		2.166.150.000		
				Jumlah Parameter Pengujian ****	Unit		1	357.750.000	1	357.750.000	1	357.750.000	1	1.073.250.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A; JAWA TENGAH
				Jumlah sampel yang diuji melalui laboratorium ****	sampel		400	114.392.000	450	114.392.000	500	114.392.000	500	343.176.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah Sertifikasi Laboratorium yang memenuhi standar teknis (2 Sertifikat) ****	Sertifikat		2	249.908.000	2	249.908.000	2	249.908.000	2	749.724.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A; JAWA TENGAH
				Persentase Petugas Laboratorium yang Meningkatkan Kompetensinya ***	%		29	15.000.000	29	15.000.000	29	15.000.000	29	45.000.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	
		3.25.04.1.05.07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi ****					15.000.000		15.000.000		15.000.000		45.000.000		
				Jumlah jenis pelatihan yang diikuti petugas ****	Jenis		5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	45.000.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A; JAWA TENGAH
				Persentase produksi ikan konsumsi air laut **	%		5	7.645.000.000	5	5.895.000.000	5	10.195.000.000	5	23.735.000.000	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A	
		3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut ***					730.000.000		625.000.000		1.480.000.000		2.835.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah Jenis Pelatihan Keterampilan yang diikuti tenaga teknis SDM Loka Air Laut ***	Jenis		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	
				Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya ***	Lokasi		1	680.000.000	1	575.000.000	1	1.430.000.000	1	2.685.000.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut ****					280.000.000		230.000.000		830.000.000		1.340.000.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	
				Jumlah Sarana dan Prasarana yang direhabilitasi/dibangun ****	Unit		5	280.000.000	5	230.000.000	5	830.000.000	15	1.340.000.000		
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut ****													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah Produksi Ikan Konsumsi ****			11.500	400.000.000	12.075	345.000.000	12.6798	600.000.000		1.345.000.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat ***					6.915.000.000		5.270.000.000		8.715.000.000		20.900.000.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	
					Lokasi		9	6.915.000.000	9	5.270.000.000	9	8.715.000.000	9	20.900.000.000		
				Jumlah Ikan Endemik Lokal yang di Produksi ****	Ekor		100000	100.000.000	200000	50.000.000	300000	120.000.000	600000	270.000.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	
				Jumlah Kolam yang dilakukan Rehabilitasi ****	Unit		9	1.300.000.000	9	380.000.000	9	2.665.000.000	9	4.345.000.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah Produksi Benih Unggul ****	Ekor		30.000.000	435.000.000	31500.000	295.000.000	33000000	570.000.000	33000000	1.300.000.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A; KOTA SEMARANG
				Jumlah Produksi Calon Induk Bermutu ****	Ekor		5.000	2.810.000.000	5.250	2.615.000.000	5.500	2.870.000.000	5.500	8.295.000.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A; KOTA SEMARANG
				Jumlah Produksi Ikan Konsumsi ****	Kg		10.000	2.270.000.000	10.500	1.930.000.000	11.000	2.490.000.000	11.000	6.690.000.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A; KOTA SEMARANG
		3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut ****					5.245.000.000		2.900.000.000		6.065.450.000		14.210.450.000		
				Jumlah unit pembenihan yang memiliki sertifikat CPIB ****	Unit		5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	15	450.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas; JAWA TENGAH
				Jumlah unit pembesaran ikan yang memiliki SP4 CBIB / sertifikat CBIB ****	Unit		10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	30	300.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah unit produksi pakan ikan yang memiliki sertifikat CPPIB ****	Unit		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	SEKSI PENGEMBANG AN KOMODITAS	Bidang Usaha dan Pengemban gan Komoditas; JAWA TENGAH
		3.25.04.1.01 .03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan ****					150.000.000		150.000.000		150.000.000		450.000.000		
				Jumlah Kabupaten Kota yang melaporkan data ****	Kabupaten/K ota		35	150.000.000	35	150.000.000	35	150.000.000	35	450.000.000	SEKSI PENGEMBANG AN KOMODITAS	
		3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut ***					1.556.310.0 00		1.556.310.0 00		1.556.310.0 00		4.668.930.00 0		
				Jumlah teknologi budidaya yang diterapkan oleh pembudidaya ***	Jenis		2	1.556.310.0 00	3	1.556.310.0 00	4	1.556.310.0 00	4	4.668.930.00 0	SEKSI PENGEMBANG AN KOMODITAS	
		3.25.04.1.05 .05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****					1.556.310.0 00		1.556.310.0 00		1.556.310.0 00		4.668.930.00 0		
				Jumlah kelompok yang menerima sarana dan prasarana perikanan budidaya ****	Kelompok		30	1.556.310.0 00	30	1.556.310.0 00	30	1.556.310.0 00	90	4.668.930.00 0	SEKSI PENGEMBANG AN KOMODITAS	Bidang Usaha dan Pengemban gan Komoditas; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024		2025			2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah								62.359.486.000		64.076.808.000		67.462.740.000		193.899.034.000	Dinas Kelautan dan Perikanan		
				Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka		82		83		84		84		Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah *							61.159.486.000		62.876.808.000		66.162.740.000		190.199.034.000	Dinas Kelautan dan Perikanan		
				Indeks Kepuasan Masyarakat *	Angka		83	61.159.486.000	84	62.876.808.000	85	66.162.740.000	85	190.199.034.000	Dinas Kelautan dan Perikanan		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI **					61.159.486.000		62.876.808.000		66.162.740.000		190.199.034.000			
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	%		100	898.000.000	100	898.000.000	100	898.000.000	100	2.694.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A		
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					140.000.000		140.000.000		140.000.000		420.000.000			
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%		100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	420.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; REMBANG
		X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000		
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; REMBANG
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000		
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan		12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	36	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; REMBANG
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					608.000.000		608.000.000		608.000.000		1.824.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan		1	608.000.000	1	608.000.000	1	608.000.000	3	1.824.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****					8.000.000		8.000.000		8.000.000		24.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan		12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	36	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; REMBANG
		X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****					600.000.000		600.000.000		600.000.000		1.800.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan		12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	36	1.800.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; REMBANG
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					150.000.000		150.000.000		150.000.000		450.000.000		
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000		
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit		1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; REMBANG
		X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****	Unit		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; REMBANG
		X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit		1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; REMBANG
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	%		100	279.000.000	100	279.000.000	100	289.000.000	100	847.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					70.000.000		70.000.000		70.000.000		210.000.000		
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%		100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	210.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****					15.000.000		15.000.000		15.000.000		45.000.000		
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	45.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					25.000.000		25.000.000		25.000.000		75.000.000		
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket		1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3	75.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024		2025			2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan		12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	36	90.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA; OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					134.000.000		134.000.000		144.000.000		412.000.000			
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan		1	134.000.000	1	134.000.000	1	144.000.000	3	412.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B		
		X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****					4.000.000		4.000.000		4.000.000		12.000.000			
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan		12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	36	12.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA; OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****					130.000.000		130.000.000		140.000.000		400.000.000			
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan		12	130.000.000	12	130.000.000	12	140.000.000	36	400.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA; OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					75.000.000		75.000.000		75.000.000		225.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit		1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	3	225.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****					15.000.000		15.000.000		15.000.000		45.000.000		
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****	Unit		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	45.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	%		100	318.000.000	100	318.000.000	100	318.000.000	100	954.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					110.000.000		110.000.000		110.000.000		330.000.000		
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%		100	110.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	330.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000		
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan		12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	36	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					58.000.000		58.000.000		58.000.000		174.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan		1	58.000.000	1	58.000.000	1	58.000.000	3	174.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ***					8.000.000		8.000.000		8.000.000		24.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan		12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	36	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan		12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	36	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					150.000.000		150.000.000		150.000.000		450.000.000		
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000		
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit		1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****	Unit		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000		
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit		1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN; OPD Provinsi
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	%		100	398.000.000	100	398.000.000	100	398.000.000	100	1.194.000.000	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A	
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					140.000.000		140.000.000		140.000.000		420.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024		2025			2026		Target			Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%		100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	420.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000			
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000			
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000			
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan		12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	36	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					108.000.000		108.000.000		108.000.000		324.000.000			
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan		1	108.000.000	1	108.000.000	1	108.000.000	3	324.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024		2025			2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****					8.000.000		8.000.000		8.000.000		24.000.000			
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan		12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	36	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****					100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000			
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan		12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	36	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					150.000.000		150.000.000		150.000.000		450.000.000			
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000			
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit		1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024		2025			2026					
							Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000			
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****	Unit		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000			
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit		1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi	
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	%		100	798.000.000	100	798.000.000	100	798.000.000	100	2.394.000.000	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A		
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					140.000.000		140.000.000		140.000.000		420.000.000			
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%		100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	420.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000			
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2024		2025			2026	Target	Rp			Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000				
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi		
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000				
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan		12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	36	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi		
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					508.000.000		508.000.000		508.000.000		1.524.000.000				
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan		1	508.000.000	1	508.000.000	1	508.000.000	3	1.524.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA			
		X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****					8.000.000		8.000.000		8.000.000		24.000.000				
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan		12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	36	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi		
		X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****					500.000.000		500.000.000		500.000.000		1.500.000.000				
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan		12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	36	1.500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					150.000.000		150.000.000		150.000.000		450.000.000		
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000		
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit		1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****	Unit		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000		
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit		1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	%		100	179.000.000	100	179.000.000	100	179.000.000	100	537.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					70.000.000		70.000.000		70.000.000		210.000.000		
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%		100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	210.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****					15.000.000		15.000.000		15.000.000		45.000.000		
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	45.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; TEGAL
		X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					25.000.000		25.000.000		25.000.000		75.000.000		
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket		1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3	75.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; TEGAL
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan		12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	36	90.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					34.000.000		34.000.000		34.000.000		102.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan		1	34.000.000	1	34.000.000	1	34.000.000	3	102.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****					4.000.000		4.000.000		4.000.000		12.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan		12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	36	12.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; TEGAL
		X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan		12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	36	90.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					75.000.000		75.000.000		75.000.000		225.000.000		
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit		1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	3	225.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024		2025			2026		Target			Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000			
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; TEGAL	
		X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****					15.000.000		15.000.000		15.000.000		45.000.000			
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****	Unit		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	45.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; TEGAL	
		X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000			
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; TEGAL	
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	%		100	338.000.000	100	338.000.000	100	338.000.000	100	1.014.000.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A		
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					140.000.000		140.000.000		140.000.000		420.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024		2025			2026		Target			Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%		100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	420.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000			
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; TEGAL	
		X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000			
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; TEGAL	
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000			
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan		12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	36	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; TEGAL	
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					48.000.000		48.000.000		48.000.000		144.000.000			
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan		1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	3	144.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024		2025			2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****					8.000.000		8.000.000		8.000.000		24.000.000			
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan		12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	36	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; TEGAL	
		X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****					40.000.000		40.000.000		40.000.000		120.000.000			
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan		12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	36	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; TEGAL	
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					150.000.000		150.000.000		150.000.000		450.000.000			
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000			
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit		1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; TEGAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****	Unit		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; TEGAL
		X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000		
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit		1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; TEGAL
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	%		100	328.000.000	100	328.000.000	100	328.000.000	100	984.000.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					140.000.000		140.000.000		140.000.000		420.000.000		
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%		100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	420.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	MAGELANG; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2024		2025			2026	Target	Rp			Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000				
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	MAGELANG; OPD Provinsi		
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000				
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan		12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	36	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	MAGELANG; OPD Provinsi		
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					38.000.000		38.000.000		38.000.000		114.000.000				
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan		1	38.000.000	1	38.000.000	1	38.000.000	3	114.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA			
		X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****					8.000.000		8.000.000		8.000.000		24.000.000				
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan		12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	36	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	MAGELANG; OPD Provinsi		
		X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000				
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan		12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	36	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	MAGELANG; OPD Provinsi		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					150.000.000		150.000.000		150.000.000		450.000.000		
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000		
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit		1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	MAGELANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****	Unit		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	MAGELANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000		
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit		1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	MAGELANG; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	%		100	348.000.000	100	353.000.000	100	358.000.000	100	1.059.000.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					140.000.000		145.000.000		150.000.000		435.000.000		
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%		100	140.000.000	100	145.000.000	100	150.000.000	100	435.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI
		X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000		
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****					60.000.000		65.000.000		70.000.000		195.000.000		
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan		12	60.000.000	12	65.000.000	12	70.000.000	36	195.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					58.000.000		58.000.000		58.000.000		174.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan		1	58.000.000	1	58.000.000	1	58.000.000	3	174.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ***					8.000.000		8.000.000		8.000.000		24.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan		12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	36	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI
		X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan		12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	36	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					150.000.000		150.000.000		150.000.000		450.000.000		
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000		
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit		1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI
		X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****	Unit		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI
		X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000		
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit		1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	%		100	508.000.000	100	508.000.000	100	508.000.000	100	1.524.000.000	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					140.000.000		140.000.000		140.000.000		420.000.000		
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar	%		100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	420.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				layanan ***												
		X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000		
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000		
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan		12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	36	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					218.000.000		218.000.000		218.000.000		654.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan		1	218.000.000	1	218.000.000	1	218.000.000	3	654.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****					8.000.000		8.000.000		8.000.000		24.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan		12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	36	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****					210.000.000		210.000.000		210.000.000		630.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan		12	210.000.000	12	210.000.000	12	210.000.000	36	630.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					150.000.000		150.000.000		150.000.000		450.000.000		
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000		
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit		1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****	Unit		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000		
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit		1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	%		100	189.000.000	100	189.000.000	100	189.000.000	100	567.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					70.000.000		70.000.000		70.000.000		210.000.000		
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%		100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	210.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****					15.000.000		15.000.000		15.000.000		45.000.000		
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	45.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					25.000.000		25.000.000		25.000.000		75.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket		1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3	75.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan		12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	36	90.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					44.000.000		44.000.000		44.000.000		132.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan		1	44.000.000	1	44.000.000	1	44.000.000	3	132.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****					4.000.000		4.000.000		4.000.000		12.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan		12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	36	12.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****					40.000.000		40.000.000		40.000.000		120.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan		12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	36	120.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024		2025			2026		Target			Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					75.000.000		75.000.000		75.000.000		225.000.000			
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit		1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	3	225.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B		
		X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000			
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL; OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****					15.000.000		15.000.000		15.000.000		45.000.000			
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****	Unit		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	45.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL; OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000			
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL; OPD Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	%		100	358.000.000	100	358.000.000	100	358.000.000	100	1.074.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					140.000.000		140.000.000		140.000.000		420.000.000		
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%		100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	420.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000		
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000		
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan		12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	36	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					68.000.000		68.000.000		68.000.000		204.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan		1	68.000.000	1	68.000.000	1	68.000.000	3	204.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ***					8.000.000		8.000.000		8.000.000		24.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan		12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	36	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan		12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	36	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					150.000.000		150.000.000		150.000.000		450.000.000		
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024		2025			2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000			
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit		1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG; OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000			
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****	Unit		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000			
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit		1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG; OPD Provinsi	
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	%		100	189.000.000	100	189.000.000	100	189.000.000	100	567.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan		
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					70.000.000		70.000.000		70.000.000		210.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%		100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	210.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****					15.000.000		15.000.000		15.000.000		45.000.000		
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	45.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi; PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					25.000.000		25.000.000		25.000.000		75.000.000		
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket		1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3	75.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi; PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan		12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	36	90.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi; PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					44.000.000		44.000.000		44.000.000		132.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan		1	44.000.000	1	44.000.000	1	44.000.000	3	132.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****					4.000.000		4.000.000		4.000.000		12.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan		12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	36	12.000.000		OPD Provinsi; PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****					40.000.000		40.000.000		40.000.000		120.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan		12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	36	120.000.000		OPD Provinsi; PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					75.000.000		75.000.000		75.000.000		225.000.000		
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit		1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	3	225.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi; PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****					15.000.000		15.000.000		15.000.000		45.000.000		
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****	Unit		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	45.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi; PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi; PEKALONGAN
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	%		100	199.000.000	100	199.000.000	100	199.000.000	100	597.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					70.000.000		70.000.000		70.000.000		210.000.000		
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%		100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	210.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****					15.000.000		15.000.000		15.000.000		45.000.000		
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	45.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi; PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					25.000.000		25.000.000		25.000.000		75.000.000		
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket		1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3	75.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi; PEMALANG
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan		12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	36	90.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi; PEMALANG
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					54.000.000		54.000.000		54.000.000		162.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan		1	54.000.000	1	54.000.000	1	54.000.000	3	162.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****					4.000.000		4.000.000		4.000.000		12.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan		12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	36	12.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi; PEMALANG
		X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan		12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	36	150.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi; PEMALANG
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					75.000.000		75.000.000		75.000.000		225.000.000		
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit		1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	3	225.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi; PEMALANG
		X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****					15.000.000		15.000.000		15.000.000		45.000.000		
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****	Unit		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	45.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi; PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi; PEMALANG
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	%		100	458.000.000	100	458.000.000	100	458.000.000	100	1.374.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A	
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					140.000.000		140.000.000		140.000.000		420.000.000		
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%		100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	420.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000		
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2024		2025			2026	Target	Rp			Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000				
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan		12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	36	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL; OPD Provinsi		
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					168.000.000		168.000.000		168.000.000		504.000.000				
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan		1	168.000.000	1	168.000.000	1	168.000.000	3	504.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA			
		X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****					8.000.000		8.000.000		8.000.000		24.000.000				
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan		12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	36	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL; OPD Provinsi		
		X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****					160.000.000		160.000.000		160.000.000		480.000.000				
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan		12	160.000.000	12	160.000.000	12	160.000.000	36	480.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL; OPD Provinsi		
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					150.000.000		150.000.000		150.000.000		450.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2024		2025			2026	Target	Rp			Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA			
		X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000				
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit		1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL; OPD Provinsi		
		X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000				
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****	Unit		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL; OPD Provinsi		
		X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000				
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit		1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL; OPD Provinsi		
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	%		100	54.668.486.000	100	56.380.808.000	100	59.651.740.000	100	170.701.034.000	SEKRETARIAT			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ***					42.303.486.000		51.075.000.000		53.601.740.000		146.980.226.000		
				Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ***	Dokumen		1	42.303.486.000	1	51.075.000.000	1	53.601.740.000	3	146.980.226.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ****					41.223.486.000		49.995.000.000		52.251.740.000		143.470.226.000		
				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN ****	Orang		327	41.223.486.000	327	49.995.000.000	327	52.251.740.000	327	143.470.226.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ****					950.000.000		950.000.000		1.200.000.000		3.100.000.000		
				Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN ****	Dokumen		12	950.000.000	12	950.000.000	12	1.200.000.000	36	3.100.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ****					130.000.000		130.000.000		150.000.000		410.000.000		
				Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah ****	Laporan		1	130.000.000	1	130.000.000	1	150.000.000	3	410.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ***					110.000.000		110.000.000		150.000.000		370.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ***	Dokumen		1	110.000.000	1	110.000.000	1	150.000.000	3	370.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ****					110.000.000		110.000.000		150.000.000		370.000.000		
				Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen		1	110.000.000	1	110.000.000	1	150.000.000	3	370.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ***					355.000.000		355.000.000		400.000.000		1.110.000.000		
				Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ***	%		100	355.000.000	100	355.000.000	100	400.000.000	100	1.110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ****					20.000.000		20.000.000		30.000.000		70.000.000		
				Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian ****	Dokumen		12	20.000.000	12	20.000.000	12	30.000.000	36	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai ****					35.000.000		35.000.000		50.000.000		120.000.000		
				Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai ****	Dokumen		1	35.000.000	1	35.000.000	1	50.000.000	3	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ****					300.000.000		300.000.000		320.000.000		920.000.000		
				Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ****	Orang		30	300.000.000	30	300.000.000	30	320.000.000	90	920.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					1.535.000.000		1.375.808.000		1.725.000.000		4.635.808.000		
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%		100	1.535.000.000	100	1.375.808.000	100	1.725.000.000	100	4.635.808.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****					60.000.000		25.808.000		70.000.000		155.808.000		
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket		1	60.000.000	1	25.808.000	1	70.000.000	3	155.808.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					200.000.000		100.000.000		220.000.000		520.000.000		
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket		1	200.000.000	1	100.000.000	1	220.000.000	3	520.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****					25.000.000		30.000.000		35.000.000		90.000.000		
				Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****	Paket		1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	3	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor ****					200.000.000		205.000.000		210.000.000		615.000.000		
				Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan ****	Paket		1	200.000.000	1	205.000.000	1	210.000.000	3	615.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ****					200.000.000		100.000.000		210.000.000		510.000.000		
				Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan ****	Paket		1	200.000.000	1	100.000.000	1	210.000.000	3	510.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****					15.000.000		20.000.000		25.000.000		60.000.000		
				Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****	Dokumen		1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	3	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****					800.000.000		850.000.000		900.000.000		2.550.000.000		
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan		12	800.000.000	12	850.000.000	12	900.000.000	36	2.550.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ****					10.000.000		15.000.000		20.000.000		45.000.000		
				Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah ****	Laporan		12	10.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000	36	45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2024		2025			2026	Target	Rp			Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD ****					25.000.000		30.000.000		35.000.000		90.000.000				
				Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah ****	Dokumen		1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	3	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi		
		X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ***					7.625.000.000		725.000.000		825.000.000		9.175.000.000				
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ***	Unit		1	7.625.000.000	1	725.000.000	1	825.000.000	3	9.175.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
		X.XX.01.1.07.03	Pengadaan Alat Besar ****					6.000.000.000		-		-		6.000.000.000				
				Jumlah unit alat besar yang disediakan ****	Unit		1	6.000.000.000	0	-	0	-	1	6.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH; OPD Provinsi		
		X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****					900.000.000		110.000.000		120.000.000		1.130.000.000				
				Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan ****	Unit		1	900.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	3	1.130.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi		
		X.XX.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****					325.000.000		250.000.000		275.000.000		850.000.000				
				Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan ****	Unit		1	325.000.000	1	250.000.000	1	275.000.000	3	850.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		X.XX.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****					400.000.000		365.000.000		430.000.000		1.195.000.000		
				Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan ****	Unit		1	400.000.000	1	365.000.000	1	430.000.000	3	1.195.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					1.630.000.000		1.630.000.000		1.750.000.000		5.010.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan		1	1.630.000.000	1	1.630.000.000	1	1.750.000.000	3	5.010.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****					30.000.000		35.000.000		40.000.000		105.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan		12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	36	105.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****					600.000.000		570.000.000		660.000.000		1.830.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan		12	600.000.000	12	570.000.000	12	660.000.000	36	1.830.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****					1.000.000.000		1.025.000.000		1.050.000.000		3.075.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum	Laporan		12	1.000.000.000	12	1.025.000.000	12	1.050.000.000	36	3.075.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				kantor yang disediakan ****												
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					1.110.000.000		1.110.000.000		1.200.000.000		3.420.000.000		
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit		1	1.110.000.000	1	1.110.000.000	1	1.200.000.000	3	3.420.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ****					400.000.000		425.000.000		450.000.000		1.275.000.000		
				Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya ****	Unit		1	400.000.000	1	425.000.000	1	450.000.000	3	1.275.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel ****					15.000.000		20.000.000		25.000.000		60.000.000		
				Jumlah mebel yang dipelihara ****	Unit		1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	3	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****					60.000.000		70.000.000		80.000.000		210.000.000		
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****	Unit		1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	3	210.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		X.XX.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud ****					60.000.000		70.000.000		80.000.000		210.000.000		
				Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara ****	Unit		1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	3	210.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****					300.000.000		225.000.000		350.000.000		875.000.000		
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit		1	300.000.000	1	225.000.000	1	350.000.000	3	875.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****					275.000.000		300.000.000		215.000.000		790.000.000		
				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit		1	275.000.000	1	300.000.000	1	215.000.000	3	790.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	%		100	348.000.000	100	348.000.000	100	348.000.000	100	1.044.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					140.000.000		140.000.000		140.000.000		420.000.000		
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%		100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	420.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000		
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000		
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan		12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	36	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					58.000.000		58.000.000		58.000.000		174.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan		1	58.000.000	1	58.000.000	1	58.000.000	3	174.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****					8.000.000		8.000.000		8.000.000		24.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan		12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	36	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

		X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan		12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	36	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					150.000.000		150.000.000		150.000.000		450.000.000		
				Mengukur kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah baik secara internal maupun eksternal ***	Unit		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000		
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit		1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024		2025			2026		Target			Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****	Unit		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK; OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000			
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit		1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK; OPD Provinsi	
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	%		100	358.000.000	100	358.000.000	100	358.000.000	100	1.074.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A		
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***					140.000.000		140.000.000		140.000.000		420.000.000			
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%		100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	420.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000			
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI	
		X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000		
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan		12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	36	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					68.000.000		68.000.000		68.000.000		204.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan		1	68.000.000	1	68.000.000	1	68.000.000	3	204.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****					8.000.000		8.000.000		8.000.000		24.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan		12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	36	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI
		X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan		12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	36	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***					150.000.000		150.000.000		150.000.000		450.000.000		
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000		
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit		1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI
		X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****	Unit		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI
		X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000		
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit		1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah *							1.200.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000		3.700.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Indeks Manajemen Risiko *	Angka		82	1.200.000.000	83	1.200.000.000	84	1.300.000.000	84	3.700.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI **					1.200.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000		3.700.000.000		
				Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah **	%		100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.300.000.000	100	3.700.000.000	SEKRETARIAT	
		X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ***					1.200.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000		3.700.000.000		
				Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ***	%		100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.300.000.000	100	3.700.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ****				600.000.000		600.000.000		650.000.000		1.850.000.000		
				Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah ****	Dokumen		5	600.000.000	5	600.000.000	5	650.000.000	15	1.850.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	-, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****				600.000.000		600.000.000		650.000.000		1.850.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan Perikanan				Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah ****	Laporan		1	600.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	3	1.850.000.00	SUB BAGIAN PROGRAM	-, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
								7.214.558.000		6.574.558.000		8.012.258.000		21.801.374.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Persentase luasan mangrove yang direhabilitasi	%		0,75		0,79		0,84		0,84		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif *							7.214.558.000		6.574.558.000		8.012.258.000		21.801.374.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR)I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan *	%		62	7.214.558.000	63	6.574.558.000	64	8.012.258.000	64	21.801.374.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL **					3.597.700.000		2.957.700.000		4.395.400.000		10.950.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif **	%		5	1.285.200.000	5	1.285.200.000	5	1.285.200.000	5	3.855.600.000	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil	
		3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi ***					1.285.200.000		1.285.200.000		1.285.200.000		3.855.600.000		
				Jumlah Kawasan Konservasi yang ditetapkan ***	Lokasi		1	515.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	3	1.515.000.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	
		3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat ****					515.000.000		500.000.000		500.000.000		1.515.000.000		
				Jumlah kajian pencadangan kawasan konservasi ****	Dokumen		1	515.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	3	1.515.000.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil; JAWA TENGAH
				Jumlah pelaku usaha yang diverifikasi persyaratan KKPRL ***	Orang		5	770.200.000	5	785.200.000	5	785.200.000	15	2.340.600.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	
		3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat ****					770.200.000		785.200.000		785.200.000		2.340.600.000		
				Jumlah dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) ****	Dokumen		5	220.000.000	5	240.000.000	5	270.000.000	15	730.000.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil; JAWA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																TENGAH
				Jumlah stakeholder yang melaporkan data kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil ****	Unit		20	135.200.000	20	120.200.000	20	125.200.000	20	380.600.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil; JAWA TENGAH
				Jumlah Stakeholder yang memahami peraturan perundang-undangan ****	Orang		200	180.000.000	200	180.000.000	200	140.000.000	600	500.000.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil; JAWA TENGAH
				Jumlah Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Yang Dimanfaatkan ****	Lokasi		10	235.000.000	10	245.000.000	10	250.000.000	30	730.000.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil; JAWA TENGAH
				Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat **	%		3,7	941.900.000	4	621.900.000	4,5	1.271.900.000	4,5	2.835.700.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
		3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi ***					891.900.000		571.900.000		1.221.900.000		2.685.700.000		
				Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola ***	Lokasi		2	545.000.000	2	225.000.000	2	407.650.000	6	1.177.650.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ****					545.000.000		225.000.000		407.650.000		1.177.650.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah dokumen rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi ****	Dokumen		1	245.000.000	1	75.000.000	1	135.000.000	3	455.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
				Jumlah Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) kawasan konservasi yang dibentuk ****	Unit		1	250.000.000	1	100.000.000	1	175.000.000	1	525.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
				Jumlah stakeholder yang memahami ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi ****	Orang		60	50.000.000	60	50.000.000	60	97.650.000	180	197.650.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
				Luasan Wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil yang terehabilitasi ***	Ha		2	346.900.000	2,2	346.900.000	2,4	814.250.000	2,4	1.508.050.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ****					346.900.000		346.900.000		814.250.000		1.508.050.000		
				Jumlah Mangrove yang ditanam pada tahun berjalan ****	Batang		20000	246.900.000	22000	246.900.000	24000	563.000.000	66000	1.056.800.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024		2025			2026					
							Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Jumlah Terumbu Karang Buatan Yang ditenggelamkan pada tahun berjalan ****	Unit		5	100.000.000	5	100.000.000	5	251.250.000	15	451.250.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
		3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi ***					50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000			
				Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu ***	%		100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	150.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN		
		3.25.02.1.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional ****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000			
				Persentase Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha ****	%		100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	150.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025			2026	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan **	%		1,39	438.000.000	2,93	438.000.000	4,61	895.500.000	4,61	1.771.500.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A					
		3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi ***					369.130.000		369.130.000		826.630.000		1.564.890.000						
				Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terehabilitasi ***	Ha		2	369.130.000	2,2	369.130.000	2,4	826.630.000	2,4	1.564.890.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN					
		3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ****					369.130.000		369.130.000		826.630.000		1.564.890.000						
				Jumlah Mangrove yang ditanam pada tahun berjalan ****	Batang		20000	369.130.000	22000	369.130.000	24200	826.630.000	66200	1.564.890.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A				
		3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi ***					68.870.000		68.870.000		68.870.000		206.610.000						
				Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu ***	%		100	68.870.000	100	68.870.000	100	68.870.000	100	206.610.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3.25.02.1.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional ****					68.870.000		68.870.000		68.870.000		206.610.000		
				Persentase Fasilitas pelayanan perizinan berusaha ****	%		100	68.870.000	100	68.870.000	100	68.870.000	100	206.610.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
				Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur **	%		3,7	932.600.000	7,8	612.600.000	12,3	942.800.000	12,3	2.488.000.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
		3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi ***					860.000.000		540.000.000		870.200.000		2.270.200.000		
				Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola ***	Lokasi		2	550.000.000	2	175.000.000	2	250.000.000	2	975.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ****					550.000.000		175.000.000		250.000.000		975.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah dokumen rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi ****	Dokumen		1	250.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	3	400.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
				Jumlah Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) kawasan konservasi yang dibentuk ****	Unit		1	250.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	400.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
				Jumlah stakeholder yang memahami ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi ****	Orang		60	50.000.000	60	50.000.000	60	75.000.000	180	175.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
				Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terehabilitasi ***	Ha		2	310.000.000	2,2	365.000.000	2,4	620.200.000	6,6	1.295.200.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ****					310.000.000		365.000.000		620.200.000		1.295.200.000		
				Jumlah Mangrove yang ditanam pada tahun berjalan ****	Batang		20000	210.000.000	22000	265.000.000	24200	470.200.000	66200	945.200.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024		2025			2026					
							Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Jumlah Terumbu Karang Buatan Yang ditenggelamkan pada tahun berjalan ****	Unit		5	100.000.000	5	100.000.000	5	150.000.000	15	350.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
		3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi ***					72.600.000		72.600.000		72.600.000		217.800.000			
				Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu ***	%		100	72.600.000	100	72.600.000	100	72.600.000	100	217.800.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN		
		3.25.02.1.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional ****					72.600.000		72.600.000		72.600.000		217.800.000			
				Persentase Fasilitas pelayanan perizinan berusaha ****	%		100	72.600.000	100	72.600.000	100	72.600.000	100	217.800.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP **					75.000.000		75.000.000		75.000.000		225.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024		2025			2026					
							Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya **	%		44,44	75.000.000	50	75.000.000	55,55	75.000.000	55,55	225.000.000	Bidang Perikanan Tangkap		
		3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ***					75.000.000		75.000.000		75.000.000		225.000.000			
				Jumlah lokasi yang dilindungi SDI nya ***	Lokasi		1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	3	225.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN , KAPAL DAN ALAT TANGKAP		
		3.25.03.1.02 .03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap ****					75.000.000		75.000.000		75.000.000		225.000.000			
				Jumlah Nelayan Yang Mengetahui Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) Ramah Lingkungan ****	Orang		100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	300	225.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN , KAPAL DAN ALAT TANGKAP		
		3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN **					3.541.858.000		3.541.858.000		3.541.858.000		10.625.574.000			
				Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah	%		61	226.000.000	61	226.000.000	61	226.000.000	61	678.000.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				kerja Cabdin Wilayah Barat **												
		3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil ***					226.000.000		226.000.000		226.000.000		678.000.000		
				Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan ***	Kali		10	226.000.000	10	226.000.000	10	226.000.000	10	678.000.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil ****					226.000.000		226.000.000		226.000.000		678.000.000		
				Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi ****	Unit		30	226.000.000	30	226.000.000	30	226.000.000	90	678.000.000	SEKSI PENGAWASAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
				Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan **	%		61	130.262.000	61	130.262.000	61	130.262.000	61	390.786.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2024		2025			2026	Target	Rp			Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil ***					130.262.000		130.262.000		130.262.000		390.786.000				
				Jumlah patroli pengawasan dengan speedboat yang dilaksanakan ***	Kali		10	130.262.000	10	130.262.000	10	130.262.000	10	390.786.000	SEKSI PENGAWASAN			
		3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil ****					130.262.000		130.262.000		130.262.000		390.786.000				
				Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi ****	Unit		20	130.262.000	20	130.262.000	20	130.262.000	60	390.786.000	SEKSI PENGAWASAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A		
				Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur **	%		61	230.000.000	61	230.000.000	61	230.000.000	61	690.000.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A			
		3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil ***					230.000.000		230.000.000		230.000.000		690.000.000				
				Jumlah patroli pengawasan dengan speedboat yang dilaksanakan ***	Kali		10	230.000.000	10	230.000.000	10	230.000.000	10	690.000.000	SEKSI PENGAWASAN			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil ****					230.000.000		230.000.000		230.000.000		690.000.000		
				Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi ****	Unit		30	230.000.000	30	230.000.000	30	230.000.000	90	690.000.000	SEKSI PENGAWASAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
				Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan **	%		70	1.339.045.000	70	1.339.045.000	70	1.339.045.000	70	4.017.135.000	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	
		3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil ***					1.047.445.000		1.047.445.000		1.047.445.000		3.142.335.000		
				Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Aktif yang dibina Membantu Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ***	Kelompok		35	230.000.000	35	230.000.000	35	230.000.000	105	690.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) ****					230.000.000		230.000.000		230.000.000		690.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025			2026	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang Menerima Sarana dan prasarana ****	Kelompok		5	230.000.000	5	230.000.000	5	230.000.000	15	690.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; JAWA TENGAH				
				Jumlah pelaku usaha sektor Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP ***	Orang		18	388.850.000	18	388.850.000	18	388.850.000	54	1.166.550.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN					
		3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil ****					66.950.000		66.950.000		66.950.000		200.850.000						
				Jumlah pelaku usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP ****	Orang		60	66.950.000	60	66.950.000	60	66.950.000	180	200.850.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; JAWA TENGAH				
		3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil ****					210.950.000		210.950.000		210.950.000		632.850.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2024		2025			2026	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP ****	Orang		60	210.950.000	60	210.950.000	60	210.950.000	180	632.850.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; JAWA TENGAH				
		3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil ****					110.950.000		110.950.000		110.950.000		332.850.000						
				Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP ****	Orang		60	110.950.000	60	110.950.000	60	110.950.000	180	332.850.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; JAWA TENGAH				
				Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan sampai dengan 12 mil ***	%		100	428.595.000	100	428.595.000	100	428.595.000	300	1.285.785.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN					
		3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil ****					44.950.000		44.950.000		44.950.000		134.850.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024		2025			2026		Target			Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Persentase Kasus yang ditangani pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil ****	%		100	44.950.000	100	44.950.000	100	44.950.000	100	134.850.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; JAWA TENGAH	
		3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil ****					282.695.000		282.695.000		282.695.000		848.085.000			
				Persentase Kasus yang ditangani pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil ****	%		100	282.695.000	100	282.695.000	100	282.695.000	100	848.085.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN		
		3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil ****					100.950.000		100.950.000		100.950.000		302.850.000			
				Persentase Kasus yang ditangani pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil ****	%		100	100.950.000	100	100.950.000	100	100.950.000	100	302.850.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; JAWA TENGAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024		2025			2026					
							Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ***					291.600.000		291.600.000		291.600.000		874.800.000			
				Jumlah pelaku usaha sektor Perikanan di di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP ***	Orang		180	141.000.000	180	141.000.000	180	141.000.000	540	423.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN		
		3.25.05.1.02.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya ****					51.000.000		51.000.000		51.000.000		153.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah pelaku usaha pada usaha penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP ****	Orang		60	51.000.000	60	51.000.000	60	51.000.000	180	153.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya ****					48.000.000		48.000.000		48.000.000		144.000.000		
				Jumlah pelaku usaha pada usaha pembudidaya di di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota	Orang		60	48.000.000	60	48.000.000	60	48.000.000	180	144.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP ****												
		3.25.05.1.02.03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****					42.000.000		42.000.000		42.000.000		126.000.000		
				Jumlah pelaku usaha pada usaha pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP ****	Orang		60	42.000.000	60	42.000.000	60	42.000.000	180	126.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya ***	%		100	150.600.000	100	150.600.000	100	150.600.000	100	451.800.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.02.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya ****					47.600.000		47.600.000		47.600.000		142.800.000		
				Persentase Kasus yang ditangani pada pelaku usaha pada usaha penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota	%		100	47.600.000	100	47.600.000	100	47.600.000	100	142.800.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya *****												
		3.25.05.1.02.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya *****					42.000.000		42.000.000		42.000.000		126.000.000		
				Persentase Kasus yang ditangani pada pelaku usaha pada usaha Pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya *****	%		100	42.000.000	100	42.000.000	100	42.000.000	100	126.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024		2025			2026		Target			Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		3.25.05.1.02.03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****					61.000.000		61.000.000		61.000.000		183.000.000			
				Persentase Kasus yang ditangani pada pelaku usaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya ****	%		100	61.000.000	100	61.000.000	100	61.000.000	100	183.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN		
				Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat **	%		2	465.900.000	2	465.900.000	2	465.900.000	2	1.397.700.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A		
		3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil ***					345.900.000		345.900.000		345.900.000		1.037.700.000			
				Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan	%		100	345.900.000	100	345.900.000	100	345.900.000	100	1.037.700.000	SEKSI PENGAWASAN		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Pengawasan 12 mil ***												
		3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil ****					80.000.000		80.000.000		80.000.000		240.000.000		
				Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil ****	Orang		24	80.000.000	24	80.000.000	24	80.000.000	72	240.000.000	SEKSI PENGAWASAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
		3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil ****					225.900.000		225.900.000		225.900.000		677.700.000		
				Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil ****	Orang		56	225.900.000	56	225.900.000	56	225.900.000	168	677.700.000	SEKSI PENGAWASAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
		3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil ****					40.000.000		40.000.000		40.000.000		120.000.000		
				Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil ****	Orang		24	40.000.000	24	40.000.000	24	40.000.000	72	120.000.000	SEKSI PENGAWASAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024		2025			2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
																A	
		3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ***					120.000.000		120.000.000		120.000.000		360.000.000			
				Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya ***	%		100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	360.000.000	SEKSI PENGAWASAN		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3.25.05.1.02.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya ****					40.000.000		40.000.000		40.000.000		120.000.000		
				Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhanpada usaha penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewengan nya ****	Orang		15	40.000.000	15	40.000.000	15	40.000.000	45	120.000.000	SEKSI PENGAWASAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
		3.25.05.1.02.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya					40.000.000		40.000.000		40.000.000		120.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

				Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangan nya ****	Orang		30	40.000.000	30	40.000.000	30	40.000.000	90	120.000.000	SEKSI PENGAWASAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
		3.25.05.1.02.03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****					40.000.000		40.000.000		40.000.000		120.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya ****	Orang		30	40.000.000	30	40.000.000	30	40.000.000	90	120.000.000	SEKSI PENGAWASAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
				Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan **	%		2	680.651.000	2	680.651.000	2	680.651.000	2	2.041.953.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
		3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil ***					288.237.000		288.237.000		288.237.000		864.711.000		
				Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil ***	%		100	288.237.000	100	288.237.000	100	288.237.000	100	864.711.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil ****					94.921.000		94.921.000		94.921.000		284.763.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil ****	Orang		15	94.921.000	15	94.921.000	15	94.921.000	45	284.763.000	SEKSI PENGAWASAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
		3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil ****					130.279.000		130.279.000		130.279.000		390.837.000		
				Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil ****	Orang		30	130.279.000	30	130.279.000	30	130.279.000	90	390.837.000	SEKSI PENGAWASAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
		3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil ****					63.037.000		63.037.000		63.037.000		189.111.000		
				Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil ****	Orang		18	63.037.000	18	63.037.000	18	63.037.000	54	189.111.000	SEKSI PENGAWASAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024		2025			2026					
							Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ***					392.414.000		392.414.000		392.414.000		1.177.242.000			
				Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya ***	%		100	392.414.000	100	392.414.000	100	392.414.000	100	1.177.242.000	SEKSI PENGAWASAN		
		3.25.05.1.02.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya ****					169.600.000		169.600.000		169.600.000		508.800.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya ****	Orang		15	169.600.000	15	169.600.000	15	169.600.000	45	508.800.000	SEKSI PENGAWASAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
		3.25.05.1.02.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya ****					96.190.000		96.190.000		96.190.000		288.570.000		
				Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas	Orang		15	96.190.000	15	96.190.000	15	96.190.000	45	288.570.000	SEKSI PENGAWASAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024		2025			2026					
							Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangan nya ****													
		3.25.05.1.02.03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****					126.624.000		126.624.000		126.624.000		379.872.000			
				Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya ****	Orang		30	126.624.000	30	126.624.000	30	126.624.000	90	379.872.000	SEKSI PENGAWASAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah	%		2	470.000.000	2	470.000.000	2	470.000.000	2	1.410.000.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Timur **												
		3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mjl ***					350.000.000		350.000.000		350.000.000		1.050.000.000		
				Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil ***	%		100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	1.050.000.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil ****					80.000.000		80.000.000		80.000.000		240.000.000		
				Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil ****	Orang		30	80.000.000	30	80.000.000	30	80.000.000	90	240.000.000	SEKSI PENGAWASAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
		3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mjl ****					230.000.000		230.000.000		230.000.000		690.000.000		
				Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil ****	Orang		30	230.000.000	30	230.000.000	30	230.000.000	90	690.000.000	SEKSI PENGAWASAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil ****					40.000.000		40.000.000		40.000.000		120.000.000		
				Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil ****	Orang		30	40.000.000	30	40.000.000	30	40.000.000	90	120.000.000	SEKSI PENGAWASAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
		3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ***					120.000.000		120.000.000		120.000.000		360.000.000		
				Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya ***	%		100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	360.000.000	SEKSI PENGAWASAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024		2025			2026		Target			Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		3.25.05.1.02.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya ****					40.000.000		40.000.000		40.000.000		120.000.000			
				Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhanpada usaha penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewengan nya ****	Orang		18	40.000.000	18	40.000.000	18	40.000.000	54	120.000.000	SEKSI PENGAWASAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
		3.25.05.1.02.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya					40.000.000		40.000.000		40.000.000		120.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

				Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangan nya ****	Orang		18	40.000.000	18	40.000.000	18	40.000.000	54	120.000.000	SEKSI PENGAWASAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
		3.25.05.1.02.03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****					40.000.000		40.000.000		40.000.000		120.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya ****	Orang		30	40.000.000	30	40.000.000	30	40.000.000	90	120.000.000	SEKSI PENGAWASAN	JAWA TENGAH; Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan								6.248.670.000		2.881.890.000		8.144.890.000		17.275.450.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	Angka		107,78		108,05		108,32		108,32		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI) *							2.506.440.000		2.056.890.000		3.181.890.000		7.745.220.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Angka Konsumsi Ikan *	kg/kapita/tahun		40,12	2.506.440.000	40,92	2.056.890.000	41,74	3.181.890.000	41,74	7.745.220.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN **					2.506.440.000		2.056.890.000		3.181.890.000		7.745.220.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah produksi olahan ikan **	Ton		160000	1.793.384.000	160800	1.343.834.000	161604	2.468.834.000	482404	5.606.052.000	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
		3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ***					60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000		
				Persentase Unit Pengolahan Ikan yang terdata ***	%		20	60.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000	20	180.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
		3.25.06.1.01.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		
				Jumlah pengolah dan pemasar yang difasilitasi perijinan ****	Orang		30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	90	90.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2024		2025			2026					
							Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		3.25.06.1.01.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000			
				Jumlah Kabupaten Kota yang melaporkan Data ****	Kabupaten/Kota		35	30.000.000	35	30.000.000	35	30.000.000	35	90.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas; JAWA TENGAH	
		3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar ***					1.703.384.000		1.253.834.000		2.378.834.000		5.336.052.000			
				Jumlah jenis pelatihan peningkatan keterampilan dan kompetensi ***	Jenis		2	180.000.000	2	125.000.000	2	200.000.000	2	505.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK		
		3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing ****					180.000.000		125.000.000		200.000.000		505.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah SDM dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang meningkat keterampilannya ****	Orang		300	180.000.000	300	125.000.000	300	200.000.000	900	505.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
				Jumlah Poklaksar yang Meningkat Usahanya ***	Unit		5	585.000.000	5	450.000.000	5	900.000.000	5	1.935.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
		3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing ****					585.000.000		450.000.000		900.000.000		1.935.000.000		
				Jumlah pengolah dan pemasar yang difasilitasi akses permodalan dan kemitraan ****	Orang		90	135.000.000	90	75.000.000	90	150.000.000	270	360.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
				Jumlah sarana yang diberikan kepada pengolah dan pemasar ****	Paket		10	450.000.000	10	375.000.000	10	750.000.000	30	1.575.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
				Jumlah Usaha Kelautan dan Perikanan yang dipromosikan ***	Unit		35	938.384.000	35	678.834.000	35	1.278.834.000	35	2.896.052.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing ****					938.384.000		678.834.000		1.278.834.000		2.896.052.000		
				Jumlah masyarakat terakses GEMARIKAN ****	Orang		2000	803.384.000	2000	603.834.000	2000	1.128.834.000	6000	2.536.052.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
				Jumlah masyarakat terakses GEMARIKAN ****	Orang		2000	803.384.000	2000	603.834.000	2000	1.128.834.000	6000	2.536.052.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
				Jumlah masyarakat terakses GEMARIKAN ****	Orang		2000	803.384.000	2000	603.834.000	2000	1.128.834.000	6000	2.536.052.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
				Jumlah Pengolah dan Pemasar yang difasilitasi Pemasaran ****	Orang		120	135.000.000	120	75.000.000	120	150.000.000	360	360.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
				Jumlah Pengolah dan Pemasar yang difasilitasi Pemasaran ****	Orang		120	135.000.000	120	75.000.000	120	150.000.000	360	360.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2024		2025			2026	Target	Rp			Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				Jumlah Pengolah dan Pemasar yang difasilitasi Pemasaran ****	Orang		120	135.000.000	120	75.000.000	120	150.000.000	360	360.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK			
		3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ***					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000				
				Jumlah Pemetaan dan Pemantauan Logistik Hasil Perikanan ***	Dokumen		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	90.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK			
		3.25.06.1.03.01	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000				
				Jumlah Pelaku Usaha Perikanan dan Penyedia Layanan Jasa Logistik yang dibina ****	Orang		25	30.000.000	25	30.000.000	25	30.000.000	75	90.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK			
				Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan **	%		4	713.056.000	4	713.056.000	4	713.056.000	4	2.139.168.000	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar ***					713.056.000		713.056.000		713.056.000		2.139.168.000		
				Jumlah Certificate Analisis Test (CAT) yang diterbitkan berdasarkan laporan hasil pengujian produk hasil perikanan ***	Sertifikat		400	412.584.000	425	397.924.000	450	332.689.000	4875	1.143.197.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing ****					412.584.000		397.924.000		332.689.000		1.143.197.000		
				Jumlah Dokumen ISO 17025:2017 ****	Dokumen		1	95.255.000	1	105.000.000	1	85.000.000	1	285.255.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A; KOTA SEMARANG
				Jumlah Prasarana Laboratorium Penujian Yang Memadai ****	Paket		2	95.255.000	2	102.924.000	2	143.964.000	2	342.143.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A; KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah Sarana Laboratorium Pengujian Yang Memadai ****	Unit		2	222.074.000	2	190.000.000	2	103.725.000	2	515.799.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A; KOTA SEMARANG
				Jumlah Rekomendasi sertifikat Good Manufacturing Product (GMP) yang diterbitkan ***	Sertifikat		100	88.000.000	100	100.000.000	100	95.000.000	300	283.000.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar ****					88.000.000		100.000.000		95.000.000		283.000.000		
				Jumlah unit pengolahan ikan (UPI) yang dibina kelayakan dasar ****	Unit		80	88.000.000	80	100.000.000	80	95.000.000	80	283.000.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A; JAWA TENGAH
				Jumlah Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) ***	Dokumen		1	212.472.000	1	215.132.000	1	285.367.000	3	712.971.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar ****					212.472.000		215.132.000		285.367.000		712.971.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah Dokumen ISO 17065:2012 dan ISO 9001:2015 ****	Dokumen		2	97.378.000	2	80.132.000	2	101.129.000	2	278.639.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A; JAWA TENGAH
				JUmlah DOKumen Kesesuaian Produk Yang Akan Disertifikasi ****	Dokumen		5	60.094.000	5	70.000.000	5	98.000.000	5	228.094.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A; JAWA TENGAH
				Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya ****	Orang		20	55.000.000	20	65.000.000	20	86.238.000	20	206.238.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan *							3.692.230.000		775.000.000		4.913.000.000		9.380.230.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Nilai Tukar Nelayan *	Angka		105	3.692.230.000	105,5	775.000.000	106	4.913.000.000	106	9.380.230.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP **					3.692.230.000		775.000.000		4.913.000.000		9.380.230.000		
				Indeks harga yang diterima oleh nelayan **	Angka		108,27	3.692.230.000	108,54	775.000.000	108,81	4.913.000.000	108,81	9.380.230.000	Bidang Perikanan Tangkap	
		3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil ***					3.617.230.000		700.000.000		4.838.000.000		9.155.230.000		
				Jumlah Nelayan yang memperoleh perlindungan ***	Orang		1050	3.617.230.000	1050	700.000.000	1050	4.838.000.000	1050	9.155.230.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3.25.03.1.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap ****					3.617.230.000		700.000.000		4.838.000.000		9.155.230.000		
				Jumlah Dokumen Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan ****	Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	Bidang Perikanan Tangkap; JAWA TENGAH
				Jumlah Nelayan yang diberikan premi asuransi ****	Orang		10000	3.417.230.000	0	500.000.000	10000	4.638.000.000	10000	8.555.230.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	Bidang Perikanan Tangkap; JAWA TENGAH
				Jumlah nelayan yang terdaftar kartu nelayan ****	Orang		100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	225.000.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	Bidang Perikanan Tangkap; JAWA TENGAH
				Jumlah RTP yang difasilitasi usahanya ****	Kelompok		50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	225.000.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	Bidang Perikanan Tangkap; JAWA TENGAH
		3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ***					75.000.000		75.000.000		75.000.000		225.000.000		
				Jumlah nelayan yang meningkat ketrampilan dan kompetensi ***	Orang		60	75.000.000	60	75.000.000	60	75.000.000	60	225.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN , KAPAL DAN ALAT TANGKAP	
		3.25.03.1.02.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap ****					75.000.000		75.000.000		75.000.000		225.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2024		2025			2026	Target	Rp			Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				Jumlah Nelayan Yang Ditingkatkan Kompetensinya ****	Orang		60	75.000.000	60	75.000.000	60	75.000.000	180	225.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN , KAPAL DAN ALAT TANGKAP			
	Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan *							50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan			
				Nilai Tukar Pembudidaya Ikan *	Angka		110	50.000.000	110,5	50.000.000	112	50.000.000	112	150.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan			
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA **					50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000				
				Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya **	Angka		111,27	50.000.000	111,55	50.000.000	111,83	50.000.000	111,83	150.000.000	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas			
		3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut ***					50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000				
				Jumlah Pembudidaya Ikan yang Meningkat Keterampilannya ***	Orang		60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	60	150.000.000	SEKSI PENGEMBANG AN KOMODITAS			
		3.25.04.1.05 .07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi ****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000				
				Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang di fasilitasi sosialisasi kelembagaan ****	Kelompok		1	20.000.000	2	20.000.000	3	20.000.000	6	60.000.000	SEKSI PENGEMBANG AN KOMODITAS			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2024		2025			2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah pembudidaya ikan yang mengikuti pelatihan *****	Orang		50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	150	90.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	



BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pada bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan Dinas Kelautan dan Perikanan meliputi indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan yang menggambarkan kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dan indikator kinerja program dan kegiatan yang menggambarkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 7.1.
 Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
 Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun			Kondisi Akhir Kinerja
		2021	2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan (%)	1,3	1,4	1	1,10	1,20	1,20
2	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan	NA	NA	107,78	108,05	108,32	108,32
3	Persentase Luasan Mangrove Yang Direhabilitasi	NA	NA	0,75	0,79	0,84	0,84

- Keterangan.
- a. IKU merupakan indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran yang telah tertuang dalam Bab IV;
 - b. Pengisian tabel ini harus sama dengan Bab IV, baik indikator maupun targetnya.

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD		TARGET CAPAIAN TAHUN			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Produksi Garam ** Bidang Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil (%)	(29,85)	0,05	1	2	3	3
2	Persentase Kawasan Konservasi Yang Ditata Menuju Pengelolaan Yang Efektif ** Bidang Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil (%)	2,5	2,5	5	5	5	5
3	Persentase Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi Di Wilayah Kerja Cabdin Wilayah Barat ** (%)	2	1	3,7	4	4,5	4,5
4	Persentase Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi Di Wilayah Kerja Cabdin Wilayah Selatan ** (%)	1	1	1,39	2,93	4,61	4,61
5	Persentase Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi Di Wilayah Kerja Cabdin Wilayah Timur ** (%)	2	0,57	3,7	7,8	12,3	12,3
6	Persentase Produksi Perikanan Tangkap ** Bidang Perikanan Tangkap (%)	(23,00)	0,04	5	5	5	5
7	Persentase Lokasi Yang Dilindungi Sumber Daya Ikannya ** Bidang Perikanan Tangkap (%)	NA	NA	44,44	50	55,55	55,55

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD		TARGET CAPAIAN TAHUN			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Indeks Harga Yang Diterima Oleh Nelayan ** Bidang Perikanan Tangkap (Angka)	NA	NA	108,27	108,54	108,81	108,81
9	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan PPP Tasikagung ** (%)	81,82	90,91	100	100	100	100
10	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan PPP Bajomulyo ** (%)	100	90,91	100	100	100	100
11	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan PPP Karimunjawa ** (%)	54,55	63,64	63,63	72,27	72,27	72,27
12	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan PPP Morodemak ** (%)	81,82	90,91	81	81	81	81
13	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan PPP Tawang ** (%)	50	72,73	62,62	71,72	81,82	81,82
14	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan PPP Klidanglor ** (%)	81,82	90,91	70	70	70	70
15	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan PPP Wonokerto ** (%)	72,73	90,91	81,82	81,82	81,82	81,82
16	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan PPP Asemdayong ** (%)	89,20	90	72,72	72,72	72,72	72,72

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD		TARGET CAPAIAN TAHUN			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan PPP Tegalsari ** (%)	100	100	72	72	72	72
18	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan PPP Larangan ** (%)	100	100	72	72	72	72
19	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan PPP Lohgending ** (%)	81,82	90,91	63	63	63	63
20	Produksi Perikanan Budidaya ** Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas (Ton)	523.357,99	533.011,18	600.000	609.000	618.135	1.827.135
21	Indeks Harga Yang Diterima Oleh Pembudidaya ** Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas (Angka)	NA	NA	111,27	111,55	111,83	111,83
22	Persentase Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan ** Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A (%)	100	100	100	100	100	100
23	Persentase Produksi Ikan Konsumsi Air Laut ** Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A (%)	NA	NA	5	5	5	5
24	Jumlah Produksi Olahan Ikan ** Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas (Ton)	NA	NA	160.000	160.800	161.604	482.404

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD		TARGET CAPAIAN TAHUN			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Persentase Dokumen Kelayakan Mutu Yang Diterbitkan ** Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A (%)	15	2	4	4	4	4
26	Persentase Kepatuhan Pelaku Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan ** Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (%)	NA	NA	70	70	70	70
27	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Yang Diawasi Dari Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing Di Wilayah Kerja Cabdin Wilayah Barat ** (%)	NA	NA	61	61	61	61
28	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Yang Diawasi Dari Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing Di Wilayah Kerja Cabdin Wilayah Selatan ** (%)	NA	NA	61	61	61	61
29	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Yang Diawasi Dari Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing Di Wilayah Kerja Cabdin Wilayah Timur ** (%)	NA	NA	61	61	61	61
30	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Sektor Kelautan Dan Perikanan Di Wilayah Kerja Cabdin Wilayah Barat ** (%)	6	2	2	2	2	2

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD		TARGET CAPAIAN TAHUN			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Sektor Kelautan Dan Perikanan Di Wilayah Kerja Cabdin Wilayah Selatan ** (%)	6	2	2	2	2	2
32	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Sektor Kelautan Dan Perikanan Di Wilayah Kerja Cabdin Wilayah Timur ** (%)	6	2	2	2	2	2
33	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah ** SEKRETARIAT	100	100	100	100	100	100
34	Persentase Tingkat Ketercapaian Kinerja Perangkat Daerah ** SEKRETARIAT	100	100	100	100	100	100
35	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah ** Dinas Kelautan dan Perikanan	100	100	100	100	100	100
36	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah ** Dinas Kelautan dan Perikanan	100	100	100	100	100	100
37	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah ** Dinas Kelautan dan Perikanan	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD		TARGET CAPAIAN TAHUN			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
38	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah ** Dinas Kelautan dan Perikanan	100	100	100	100	100	100
39	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah ** Dinas Kelautan dan Perikanan	100	100	100	100	100	100
40	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah ** Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	100	100	100	100	100	100
41	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah ** Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	100	100	100	100	100	100
42	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah ** Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	100	100	100	100	100	100
43	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah ** Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD		TARGET CAPAIAN TAHUN			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
44	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah ** Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A	100	100	100	100	100	100
45	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah ** Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	100	100	100	100	100	100
46	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah ** Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	100	100	100	100	100	100
47	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah ** Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	100	100	100	100	100	100
48	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah ** Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	100	100	100	100	100	100
49	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah ** Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD		TARGET CAPAIAN TAHUN			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
50	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah ** Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A	100	100	100	100	100	100
51	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah ** Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	100	100	100	100	100	100

Keterangan.

- a. Indikator dalam tabel ini merupakan seluruh indikator program yang telah ditetapkan pada Bab VI dan sama dengan RPJMD Bab VII;
- b. Pengisian Indikator dan targetnya harus sama dengan tabel pada Bab VI dan RPJMD Bab V